



# **SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN DI DAERAH LAMPUNG**



12

38/1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Dep. P dan K  
Tidak diperdagangkan.

**SEJARAH PENGARUH  
PELITA TERHADAP  
KEHIDUPAN MASYARAKAT  
PEDESAAN DI DAERAH  
LAMPUNG**

307.72  
SEJ



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI  
KEBUDAYAAN DAERAH  
JAKARTA 1983.**

PERPUSTAKAAN  
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor Induk : 200 / 6008

Tanggal terima :

Tanggal catat : 17-6-88

~~Beli~~/hadiah dari : Proyek IKPD

Nomor buku : 367-720454010 Sej

Kopi ke : 1

## PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Lampung Tahun 1981/1982.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Pemerintah Daerah. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. Husin Sayuti, Drs. Bukri, Drs. Soepangat, Syajono HS. BA. dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Sutrisno Kutoyo.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, September 1983

Pemimpin Proyek,



**Drs. H. Bambang Suwondo**

**NIP. 130 117 589**



## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1981/1982 telah berhasil menyusun naskah Sejarah Pengaruh Pelita terhadap kehidupan masyarakat Pedesaan di Daerah Lampung.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari Pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, September 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan,



**Prof. Dr. Haryati Soebadio**  
NIP. 130 119 123.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
KATA SAMBUTAN .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Ruang lingkup .....	4
E. Pertanggung jawaban Penulisan .....	5
BAB II. Keadaan Desa sebelum Pelita .....	7
A. Lingkungan Alam dan Penduduk .....	7
B. Perekonomian Masyarakat Desa .....	12
C. Pendidikan .....	14
D. Sosial Budaya .....	28
E. Struktur Pemerintahan .....	34
F. Cara Pemilihan Pemimpin Pemerintahan Desa .....	35
G. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerintah .....	35
H. Organisasi Politik dan Non Politik .....	36
BAB III. Pelaksanaan Pelita di daerah di bidang Pemerintah Desa .....	38
A. Landasan Pelaksanaannya .....	38
B. Pelaksanaannya .....	46
C. Hasil Pelaksanaan .....	54
BAB IV. Pengaruh Pelita di bidang Pemerintah Desa .....	73
A. Struktur Pemerintahan .....	73
B. Cara Pemilihan Dan Peranan Aparat Desa .....	76
C. Kepemimpinan Non Formal .....	81
D. Organisasi Politik dan Non Politik .....	82
BAB V. Rangkuman Dan Kesimpulan .....	85
Biologi .....	89
Daftar Informan/Responden .....	91

Contoh Pengisian Kuesioner yang telah diperoleh . . .	112
I. Identitas Responden . . . . .	112
I. Identitas Desa . . . . .	112

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.	Penduduk, Luas kabupaten serta Kepadatan Penduduk Propinsi Lampung 1980 .....	9
Tabel 2.	Penduduk Propinsi Lampung Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1980 Luas dan Kepadatan .....	10
Tabel 3.	Jumlah Kecamatan, Desa, Kepala Keluarga dan Penduduk di Propinsi Lampung Keadaan akhir tahun 1974 – 1980 .....	10
Tabel 4.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhannya menurut hasil sensus 1961, 1971 dan 1980. Di Propinsi Lampung .....	11
Tabel 5.	Data Persekolahan di Lampung tahun 1966 – 1980 ..	15
Tabel 6.	Jumlah Sekolah 1950 – 1969 .....	16
Tabel 7.	Jumlah Murid 1950 – 1969 .....	17
Tabel 8.	Jumlah Guru 1950 – 1969 .....	18
Tabel 9.	Jumlah Sekolah, Murid, Kelas dan Guru SD, SMTP dan SMTA Perjenis Sekolah Propinsi Lampung tahun 1980/1981 .....	19
Tabel 10.	Perkiraan Daya Tampung Pendidikan Dasar Terhadap Penduduk Usia 7 – 12 tahun (SD Negeri/ Swasta dan MI) 1981/1982 .....	20
Tabel 11.	Perkiraan Daya Tampung SMTP/Neg/Swasta 1981/ 1982 di Propinsi Lampung .....	21
Tabel 12.	Statistik Persekolahan Propinsi Lampung tahun 1979/1980. 1980/1981 .....	22

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembangunan nasional yang berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah semata seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya atau kepuasan batiniah saja seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara keduanya.

Pembangunan juga harus merata di seluruh tanah air dan diselenggarakan bukan hanya untuk kepentingan sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.<sup>1)</sup>

Adapun pembangunan nasional telah dilaksanakan sejak dimulainya Repelita I pada tahun 1969/1970. Dengan usaha-usaha yang dilakukan selama Repelita I bangsa Indonesia bukan saja telah dapat menyelamatkan diri dari kehancuran ekonomi serta kehidupan bangsa yang porak-poranda di masa lampau, melainkan telah pula dapat meletakkan dasar untuk memungkinkan terlaksananya pembangunan nasional dalam tahap-tahap pembangunan selanjutnya.

Bertolak dari hasil-hasil yang telah dicapai dalam Repelita I dan kesinambungan yang telah menjadi patokan, maka dalam Repelita II telah ditingkatkan hasil-hasil positif yang telah dicapai selama Repelita I sambil menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan sejauh mungkin menghindarkan akibat negatif yang timbul bersama dengan hasil-hasil tersebut.<sup>2)</sup>

Selanjutnya sekarang sejak tanggal 1 April 1979 sampai 31

<sup>1</sup> *Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga. 1979/1980 - 1983/1984. Jilid I (Rancangan) halaman 1 - 1.*

<sup>2</sup> *Ibid., halaman 1 - 2.*



Maret 1984 kita telah memasuki Repelita III, yang mana tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Demikian juga pembangunan itu dilaksanakan di daerah Lampung. Sejak Repelita I sampai Repelita III tahun ketiga telah banyak kita lihat hasil-hasil pembangunan di daerah ini.

Dalam Repelita III akan dikembangkan asas pemerataan yang akan dituangkan dalam delapan jalur pemerataan, yaitu :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut sejauh mungkin seluruh lapisan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Usaha pemerintah memberikan subsidi kepada desa-desa di seluruh tanah air adalah untuk memancing dana dari masyarakat sehingga dalam pembangunan itu mereka dapat menghimpun dana yang dalam kenyataannya secara swasembada terkumpul dalam jumlah yang lebih besar dari pada bantuan pemerintah itu sendiri.

Pemerintah telah membimbing dan melaksanakan pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat perkotaan dan pedesaan secara serentak membangun daerahnya masing-masing. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, pada tahun terakhir Repelita III (tahun ajaran 1979) kesempatan belajar pada Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dapat menampung sejumlah 23,9 juta murid. Keadaan ini berarti dapat menyerap 93,1% dari anak usia 7 - 12 tahun (81,4% pada SD dan 11,7% pada MI)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 1 - 9.

Masih banyak lagi hal-hal yang telah dilaksanakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Segala aktifitas pembangunan itu tentu saja mempunyai pengaruh positif dan mungkin di sana-sini masih ada yang negatif. Selama Repelita I sampai III dalam banyak hal telah dilaksanakan pembangunan di seluruh tanah air, sehingga dirasakan perlu untuk mengetahui pengaruh apa yang timbul akibat dari pembangunan itu. Dalam kesempatan penelitian yang dilaksanakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, maka salah satu aspek yang diteliti, yaitu aspek sejarah, maka yang ditekankan di sini adalah sejarah Pengaruh Pelita dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Tetapi dalam pelaksanaan penelitian ini penekanan penelitian yang diutamakan ialah ditinjau dari aspek pemerintahan desa saja. Banyak hal yang dapat diteliti, namun untuk kesempatan kali ini hanyalah yang menyangkut pemerintahan desa. Bagaimana perangkat desa dilaksanakan sejak sebelum Pelita dan sesudah Pelita.

Jika kita menyinggung lebih lanjut kehidupan desa dan peranannya, maka dapat kita lihat bahwa sebahagian besar dari jumlah penduduk negara kita (sekitar 86%) berdiam di desa dan mata pencaharian utamanya adalah di bidang pertanian. Karena itu tidak sedikit kebutuhan hidup masyarakat kita tergantung pada desa. Tetapi di pihak lain, berdasarkan adanya laju transportasi yang makin membaik maka desa pun tidak dapat pula menghindarkan diri dari pengaruh kota; demikian juga karena makin lajunya alat-alat komunikasi yang lainnya.

Sadar akan pentingnya kedudukan pedesaan dalam rangka pembangunan negara maka pemerintah pun selalu meningkatkan perhatiannya kepada desa, misalnya sebagai salah satu indikator, bantuan pembangunan desa pada tiap Pelita terlihat kecenderungan meningkat.

## **B. RUMUSAN PERMASALAHAN**

1. Walaupun periode yang kita masuki dengan topik seperti yang tercantum dalam judul penelitian ini, mungkin ada yang meragukan sebagai sejarah dalam pengertian murni karena dekatnya waktu periode ini dengan kita sekarang ini, namun di bidang sejarah ini tetap menggunakan penulisan sejarah dalam pengertian sejarah kontemporer.

2. Pelita telah dilaksanakan dalam dua tahap dan dewasa ini kita sedang memasuki tahapan ketiga, maka itu perlu diteliti dan dicatat secara cermat pengaruh-pengaruh yang telah ditimbulkannya. Karena itu tentu dapat dipastikan bahwa hasil-hasil yang telah diperoleh dari tahap Pelita yang telah dilaksanakan itu membawa pengaruh-pengaruh dalam kehidupan kita khususnya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan.
3. Makin diperlukannya pengetahuan sejarah untuk lebih menyempurnakan kemungkinan langkah-langkah pembangunan yang akan datang.
4. Secara khusus, dalam penelitian ini dilihat perkembangan pemerintahan desa sejak adanya dan dilaksanakannya Pelita oleh Pemerintah. Hal ini termasuk peraturan-peraturan yang telah berlaku mengatur pemerintahan desa baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian kita melihat suatu perkembangan sistem pemerintahan desa seperti yang terjadi di Lampung, yaitu dari pemerintahan marga yang bersifat otonom teritorial genealogis, kemudian pemerintahan negeri dengan menyatukan beberapa marga yang kemudian kurang efektif sehingga dihapuskan dan kemudian dengan peraturan yang akan diuraikan dalam bab berikut menjadi pemerintahan desa sebagai eselon pemerintahan terbawah di negara kita ini.

### C. TUJUAN PENELITIAN

#### 1. Tujuan Umum.

- a. Agar Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Ditsenitra) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai data dan informasi tentang adanya pengaruh Pelita di dalam kehidupan masyarakat pedesaan, sehingga pengambilan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih disempurnakan.
- b. Merupakan sumbangan kepada mereka yang menaruh minat terhadap usaha penulisan sejarah kontemporer Indonesia.

#### 2. Tujuan Khusus.

- a. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mem-

- pengaruhi kehidupan masyarakat pedesaan di daerah Lampung.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tersebut berkesan bagi masyarakat pedesaan di daerah Lampung.
  - c. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat pedesaan ddalam bidang pemerintahan desa.
  - d. Untuk mencari jalan pemecahan masalah tersebut sehingga dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan mengenai pemerintahan desa.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Adapun yang dimaksud dengan ruang lingkup dalam penelitian ini :

1. Ruang lingkup geografis, dan
2. Ruang lingkup permasalahan.

Mengenai ruang lingkup permasalahan ialah permasalahan yang menyangkut kehidupan masyarakat pedesaan. Oleh karena ruang lingkup tersebut terlalu luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan seperti : sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya dan sebagainya sehingga perlu dibatasi, bahwa ruang lingkup dalam penelitian ini hanyalah yang menyangkut pemerintah desa.

Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lingkup geografis, ialah meliputi wilayah daerah tingkat I Lampung. Tetapi karena wilayah daerah ini terlalu luas dan banyaknya desa dalam setiap kabupaten, maka tentu tidak dapat dijangkau. Oleh karena itu maka diambil desa sampel sebanyak 10 desa, yaitu dua desa dalam Kotamadya Tanjungkarang – Telukbetung : Kampung Sawah Lama dan Gedong Pakuon Talang; tiga desa dalam Kabupaten Lampung Selatan : Kotaagung, Pringsewu dan Sukaratu; dua desa di Kabupaten Lampung Tengah : Gunung Sugih dan Pekalongan; dan tiga desa di Kabupaten Lampung Utara : Ujung Gunung Hilir, Bukit Kemuning dan Blambangan.

#### **E. PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN**

Penelitian yang menghasilkan naskah ini pada dasarnya masih

jauh dari sempurna disebabkan beberapa faktor antara lain data yang diperoleh tidak lengkap sehingga tidak dapat diolah secara kuantitatif. Namun demikian sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang mengutamakan pengaruh Pelita terutama dalam bidang pemerintahan desa, maka lebih banyak pengolahan data dengan menggunakan data kualitatif.

Tahap-tahap yang telah dilalui dalam menghasilkan laporan ini telah dilakukan berturut-turut :

1. Persiapan  
Pada tahap ini telah dipersiapkan alat pengumpul data seperti pedoman wawancara, pengisian kuesioner dan penetapan desa sampel.
2. Studi Kepustakaan.  
Peraturan-peraturan yang menunjang pembentukan desa dan buku-buku yang disebut dalam daftar kepustakaan.
3. Tahap Pengumpulan Data.  
Pengumpulan data sepenuhnya dibantu oleh para mahasiswa tingkat V Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Universitas Lampung sebanyak 15 orang sebagai enumerator.
4. Pengolahan Data.  
Ternyata alat pengumpul data yang telah dipersiapkan tidak dapat diolah sebagaimana mestinya sehingga penulisan ini lebih banyak ditekankan dari bahan-bahan yang relevan untuk mengetahui pengaruh Pelita dalam pemerintahan desa.
5. Penyusunan Laporan dan Penulisan Laporan.  
Dalam penulisan ini sebenarnya terdiri dari satu tim yang terdiri dari Drs. Bukri, Drs. Husin Sayuti, Drs. Supangat dan Syajono Hs. BA. Untuk memudahkan pembagian pekerjaan, maka Bab I, Bab II dan Bab V ditulis oleh Drs. Husin Sayuti dengan dibantu oleh Syajono Hs. BA, sedangkan Bab III dan Bab IV ditulis oleh Drs. Supangat, sedangkan Drs. Bukri meneliti kembali semua bab yang telah ditulis oleh anggota tim lainnya.

—oOo—



## B A B II

### KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

#### A. LINGKUNGAN ALAM DAN PENDUDUK

Letak astronomis Propinsi Lampung di antara  $3^{\circ} 45'$  sampai  $6^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $105^{\circ} 45'$  sampai  $103^{\circ} 48'$  Bujur Timur dengan batas-batas :

sebelah utara dengan Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan yang dipisahkan oleh sungai Mesuji,  
sebelah selatan dengan Selat Sunda,  
sebelah timur dengan Laut Jawa, dan  
sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Dalam garis besarnya morfologi daerah ini dapat dibedakan menjadi daerah pegunungan di sebelah barat dan dataran rendah di sebelah timur. Pegunungan di sebelah barat merupakan sebagian rantai pegunungan Bukit Barisan, yaitu suatu geantiklinal yang sejak jaman Pleistosen mendapat relief sedikit dan kemudian daerah itu makin melengkung dan membuat patahan longitudinal dengan lereng-lereng yang curam.

Bagian timur yang datar adalah daerah geosinklinal sebagian tersusun dari lapisan-lapisan terakhir yang terlipat-lipat. Bagian ini dapat dianggap sebagai landasan yang sebagian besar tertutup oleh tuf vulkanis yang sama. Satu-satunya eruption yang termuda ialah basalt Sukadana di landaian bagian selatan. Sedang bagian pantai timur lainnya membentang dataran aluvial yang agak lebar dan mempunyai corak rawa.

Sehubungan dengan keadaan morfologi tersebut di atas, maka hampir semua sungai di Lampung mengalir dari barat ke timur, terutama sungai-sungai yang agak besar seperti Way Mesuji, Way Tulang Bawang, Way Seputih, Way Terusan dan Sekampung. Yang mengalir ke arah selatan hanya sungai-sungai kecil seperti Way Semangka, Way Ngarip, Way Batu dan Way Ratai.

Di bagian barat juga ada sungai-sungai kecil yang pendek-pendek yang mengalir ke arah barat, yaitu Way Tembang, Way Merang, Way Temuli, Way Hambang dan Way Cengek. Di samping itu terdapat juga danau-danau yang mempunyai potensi untuk irigasi dan perikanan, yaitu danau Ranau (sebagian masuk Propinsi Sumatera Selatan), danau Jepara dan danau Bawang Lampung. Di propinsi Lampung hanya Gunung Pesagi yang terletak pada ketinggian lebih dari 2.000 m (2.262 m), sedangkan gunung-gunung lainnya di bawah 2.000 m (gunung Segigak : 1.779 m), gunung Subhanallah : 1.623 m, gunung Rindingan : 1.508 m.

Sebagian besar penduduk Propinsi Lampung tinggal di daerah pedesaan. Dari penduduk seluruhnya yang berjumlah : 4.624.238 yang mendiami daerah perkotaan hanyalah sekitar 284.167 orang yang mendiami kota Tanjungkarang Telukbetung. Kalau sekiranya penduduk yang tinggal di kota-kota kecil seperti Kedaton, Panjang, Pringsewu, Kotaagung, Talangpadang, Metro, Kotabumi dan Kalianda maka paling banyak 575.559 orang yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat perkotaan. Tetapi kenyataannya mereka yang tinggal di kota-kota kecil (rural) tersebut lebih banyak hidup seperti masyarakat pedesaan dari pada sebagai masyarakat perkotaan (urban).

Mengenai penduduk, luas kabupaten serta kepadatan penduduk Propinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL I**  
**PENDUDUK, LUAS KABUPATEN SERTA KEPADATAN**  
**PENDUDUK PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1980**

No.	Tingkat II	Jumlah Penduduk	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk Kolom (3) dibagi Kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>K O T A</b>			
1.	Kabupaten Lampung Selatan	157.489	144,54	1.090
2.	Kabupaten Lampung Tengah	87.200	273,29	319
3.	Kabupaten Lampung Utara	46.703	96,06	486
4.	Kodya T. Karang – T. Betung	284.167	52,62	5.400
	Sub Jumlah (Kota)	575.559	566,51	1.016
	<b>PEDESAAN</b>			
1.	Kabupaten Lampung Selatan	1.609.294	6.621,34	234
2.	Kabupaten Lampung Tengah	1.603.720	8.916,21	180
3.	Kabupaten Lampung Utara	835.665	19.271,44	43
4.	Kodya T. Karang – T. Betung	—	—	—
	Sub Jumlah (Pedesaan)	4.048.679	34.813,69	116
	<b>KOTA DAN PEDESAAN</b>			
1.	Kabupaten Lampung Selatan	1.766.783	6.765,88	261
2.	Kabupaten Lampung Tengah	1.690.920	9.189,50	184
3.	Kabupaten Lampung Utara	882.368	19.368,50	46
4.	Kodya T. Karang – T. Betung	284.167	52,62	5.400
	<b>J U M L A H</b>	4.624.238	35.376,50	131

Catatan : Tidak termasuk tuna wisma, awak kapal dan rumah tangga terapung.

**TABEL 2**  
**PENDUDUK PROPINSI LAMPUNG BERDASARKAN SENSUS PENDUDUK**  
**TAHUN 1980, LUAS DAN KEPADATAN**

No.	Tingkat	Jumlah Penduduk	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
1.	Kodya T Karang – T. Betung	284.167	52,62	5.400
2.	Kabupaten Lampung Utara	882.368	19.368,50	46
3.	Kabupaten Lampung Tengah	1.690.920	9.189,50	184
4.	Kabupaten Lampung Selatan	1.766.783	6.765,88	261
J U M L A H		4.624.238	35.376,50	131

**TABEL 3**  
**JUMLAH KECAMATAN, DESA, KEPALA KELUARGA DAN PENDUDUK**  
**DI PROPINSI LAMPUNG, KEADAAN AKHIR TAHUN 1974 – 1980**

No.	Tahun	B a n y a k n y a			
		Kecamatan	D e s a	Kepala Kel.	Penduduk
1.	1974	71	1.426	556.222	3.163.000
2.	1975	71	1.466	586.014	3.308.883
3.	1976	71	1.489	666.368	3.646.059
4.	1977	71	1.492	677.826	3.707.324
5.	1978	71	1.498	709.334	3.820.481
6.	1979	71	1.501	736.799	4.000.336
7.	1980	71	1.496	871.666	4.624.238 *

**Keterangan :** \*) Hasil Sensus Penduduk 1980, tidak termasuk tuna wisma, rumah tangga terapung dan awak kapal.

**Sumber :** BAPPEDA – Kantor Statistik Propinsi Lampung, Lampung Dalam Angka L(') 1980, Edisi 13.

Dalam tahun 1980 terlihat dari tabel di atas terdapat penggabungan lima desa ke dalam desa yang terdekat lainnya atau juga aparat pemerintah desa yang bergabung menjadi satu.

Mengenai mobilitas penduduk di daerah Lampung terjadi juga, baik bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal. Mobilitas horisontal bagi masyarakat Lampung sering terjadi disebabkan mencari tempat kediaman baru sebagai akibat pelaksanaan sistem mata pencaharian hidup mereka, yaitu perdagangan. Mula-mula perpindah-

**TABEL 4**  
**JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHANNYA MENURUT**  
**HASIL SENSUS 1961, 1971 DAN 1980 DI PROPINSI LAMPUNG**

Kab./Kodya	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Per Tahun		
	Okt. 1961	Sept. 1961	Okt. 1980 )	Antara 1961-1971	Antara 1971-1980
1. Kod. Tjk./Tlb.	133.901	198.986	284.275	4,08	4,00
2. Lamp. Selatan	685.392	1.114.765	1.767.084	5,04	5,19
3. Lamp. Tengah	514.084	998.947	1.690.947	6,03	5,19
4. Lamp. Utara	334.134	464.834	882.479	3,39	7,30
Prop. Lampung	1.667.513	2.777.008	4.624.785	5,29	5,77

**Keterangan :** \*) Hasil Sensus Penduduk 1980, termasuk tuna wisma, awak kapal dan rumah tangga terapung.

**Sumber :** *Biro Pusat Statistik Jakarta*

an itu hanya dilaksanakan dalam lingkungan marga sendiri, tapi berkembang ke lain marga.

Adapun mobilitas penduduk vertikal juga, terutama setelah kemerdekaan, akibat perkembangan beberapa kota-kota di daerah Lampung. Setelah menjadi propinsi sendiri lepas dari Propinsi Sumatera Selatan, banyak masyarakat menjadi penghuni kota-madya. Kenyataan menunjukkan bahwa di kalangan pamongpraja suku Lampung menduduki jumlah mayoritas. Demikian juga generasi muda sekarang memasuki berbagai lapangan pekerjaan selain pertanian.

Migrasi atau perpindahan penduduk yang menyolok di daerah Lampung ialah transmigrasi, yaitu masuknya penduduk baru ke Lampung. Hal ini wajar karena sudah sejak lama Lampung menjadi daerah transmigrasi. Faktor-faktor penyebabnya ialah karena daerah Lampung adalah subur dan masih jarang penduduknya. Lagi pula daerahnya dipisahkan oleh selat yang sempit dan mudah ditempuh dari Pulau Jawa yang padat penduduknya.



Karena daerah Lampung menghasilkan aneka hasil bumi dan kekayaan alam, maka sudah sejak dulu Lampung menarik orang dari luar dan menjadi arena perebutan. Banten pernah menanamkan pengaruhnya di Lampung. Transmigrasi kecil-kecilan diperkirakan sudah terjadi pada abad ke-16 dan 17. Daerah Lampung Utara, sudah sejak lama menjadi daerah perladangan orang dari Semendo, Ogan dan Muaradua.

Arus transmigrasi yang semakin deras ialah sejak Pemerintahan Hindia Belanda memasukkan tenaga kerja dari Jawa, disusul dengan pembentukan daerah-daerah kolonisasi.

Sejak tahun 1905 hingga tahun 1941 daerah Lampung sudah menjadi tujuan utama transmigrasi, terutama dari Jawa. Setelah kemerdekaan transmigrasi ini telah dilakukan pula sejak tahun 1950. Demikian transmigrasi ke Lampung berjalan terus hingga sekarang, baik diorganisasi oleh Pemerintah maupun secara spontan. Penduduk Lampung tumbuh dengan rata-rata 5,6% sehingga sejak tahun 1978, pemerintah menetapkan daerah Lampung tertutup sebagai daerah transmigrasi.

## **B. PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA**

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok besar yaitu masyarakat penduduk asli Lampung dan masyarakat transmigrasi yang berasal terutama dari Jawa dan Bali. Daerah Lampung merupakan daerah yang cukup penting dalam bidang pertanian di Indonesia. Berjenis-jenis tanaman bahan makanan seperti ubi-ubian, jagung, kacang-kacangan, sayur-mayur, maupun tanaman perdagangan atau tanaman keras seperti kopi, karet, lada, kelapa dan sebagainya tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang cukup baik pula. Secara umum masyarakat mengolah tanah untuk tanaman pangan, sedangkan masyarakat penduduk asli terutama menanam tanaman keras seperti cengkih, lada, kopi dan kelapa.

Hasil-hasil pertanian tersebut di atas telah banyak membawa kemakmuran bagi petani itu sendiri dan juga bagi penduduk di daerah ini. Selain itu juga hasil-hasil pertanian tersebut, telah banyak memberikan penghasilan bagi pemerintah daerah dan pusat. Pada awal kemerdekaan, terutama setelah pengakuan kedaulatan, yaitu sejak tahun 1950, keadaan perekonomian daerah Lampung sangat tidak menentu. Sebagai daerah yang merupakan karesidenan sebagai

bagian dari daerah Sumatera Selatan, kebijaksanaan pemerintah dan perekonomian ditentukan dari ibukota Propinsi Sumatera Selatan di Palembang. Kegiatan pembangunan pada awal kemerdekaan itu terutama pada masyarakat pedesaan sangat jauh dari terjangkau.

Jalan-jalan rusak berat, jalan utama kelas propinsi sulit dilalui oleh kendaraan umum, apalagi jalan pedesaan yang hanya dapat dilewati dengan jalan kaki atau gerobak sapi, sedangkan dengan kendaraan mobil roda empat pada umumnya tidak dapat dilalui sama sekali. Sebagai contoh pada awal tahun 1950-an, jalan ke Talang Padang yang jaraknya kurang dari 70 km, ditempuh tidak kurang dari lima sampai enam jam. Tetapi pada tahun 1982 dapat ditempuh kurang dari dua jam.

Sebagai daerah pertanian ada beberapa faktor yang menyebabkan daerah Propinsi Lampung merupakan daerah pertanian yang penting di Indonesia, yaitu faktor alam fisis yang meliputi kondisi klimatologi, morfologis (land form) soils dan hidrologis yang baik bagi pertumbuhan tanaman-tanaman pertanian daerah tropis.<sup>1)</sup>

Selain faktor dalam fisis tersebut, juga faktor manusianya cukup menguntungkan, misalnya para petani di daerah ini berasal dari Jawa dan Bali yang relatif telah cukup maju dalam pertanian pada sawah ataupun dalam pengusahaan pertanian palawija dan sayur-sayuran di tanah kering dan sawah.

Selain dua faktor di atas yang menyebabkan daerah Propinsi Lampung merupakan daerah pertanian yang cukup penting di Indonesia, juga dengan adanya dan dilaksanakannya program-program pemerintah pusat dan daerah di bidang pertanian khususnya di bidang lainnya, terutama mengenai prasarana-prasarana produksi baik di masa sebelumnya maupun sejak Pelita I.

Pertanian di daerah Propinsi Lampung terbagi atas pertanian/perkebunan besar/modern seperti pertanian jagung oleh PT. Mitsugoro yang merupakan usaha patungan antara Mitsui dari Jepang dan Kosgoro dari Indonesia; perkebunan karet dan kelapa sawit milik Pemerintah/Negara. Sebelumnya yaitu pada zaman penjajahan dan pendudukan Belanda dan Jepang, perusahaan itu milik asing (Belanda) yang kemudian dinasionalisasi menjadi milik pemerintah.

Selain pertanian/perkebunan modern tersebut di atas di daerah Lampung yang lebih luas lagi lahannya dan lebih penting lagi peranannya dalam kehidupan ekonomi ialah pertanian/perkebunan rakyat

1 Tim Peneliti FK UNILA—Monografi Propinsi Lampung, 1972, hal. 30

yang meliputi penanaman padi, palawija, sayur-sayuran, berbagai tanaman keras dan sebagainya.

Berbeda dengan perkebunan/pertanian besar/modern di atas, pertanian/perkebunan rakyat ini belum atau baru sedikit sekali melaksanakan sistem pertanian ilmiah (scientific method). Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomis seperti faktor sosial kultural yang ada pada masyarakat tani. Tetapi sekarang berangsur-angsur dengan adanya bimbingan pemerintah dengan pemberian kredit seperti Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal), sudah mulai kelihatan hasilnya berupa kemajuan peningkatan hasil rata-rata per hektar dalam bilangan kuintal padi per ton.

Sebagai gambaran produksi rata-rata tiap hektar tanaman padi di daerah Lampung cukup besar, yaitu 3,34 ton/ha untuk sawah dan 1,37 ton/ha untuk ladang, sedangkan produksi rata-rata tiap hektar padi sawah di Indonesia 3 ton/ha, di Sumatera 1,3 ton/ha. Setelah diadakan Bimas, produksi rata-rata tiap hektar sawah di Lampung telah meningkat, yaitu 3,785 ton per hektar untuk padi bukan PB, sedangkan untuk PB produksi rata-rata tiap hektarnya mencapai 5,13 ton/hektar. Keadaan ini menggambarkan pada Pelita I, sedangkan pada Pelita II dan Pelita III produksi sawah ada yang mencapai 7 sampai 8 ton per hektar.

Luas pertanian ladang di daerah Lampung dalam tahun 1970 kira-kira dua kali luas persawahan dan pada tahun sebelumnya kira-kira 2½ kali persawahan. Pertanian dengan sistem berladang sudah tidak dapat lagi dikembalikan, sebab kerugian-kerugian yang ditimbulkan cukup banyak, antara lain erosi tanah semakin besar, tata air jadi kurang teratur, di mana pada musim kemarau airnya sedikit sekali, sedangkan dalam musim hujan airnya melimpah-limpah (banjir), dan banyak lagi kerugian lain.

### **C. PENDIDIKAN**

Perkembangan pendidikan dasar telah dimulai pada zaman penjajahan Belanda dan zaman Jepang. Namun demikian terdapat perubahan yang mendasar mengenai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Pada zaman penjajahan tujuan utama ialah untuk mendidik tenaga murah untuk kepentingan penjajah, namun pada zaman kemerdekaan tujuan pendidikan ialah untuk membentuk warganegara yang Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada permulaan zaman kemerdekaan, sekolah-sekolah tersebut dibuka kembali, tetapi jumlah murid SD yang pasti pada saat itu tidak diperoleh datanya. Pada yang dapat dikumpulkan adalah keadaan persekolahan antara tahun 1966 – 1980.

**TABEL 5**

**DATA PERSEKOLAHAN DI LAMPUNG TAHUN 1966 – 1980**

Tahun	S D	Jumlah Murid	SLTP	Jumlah Murid	SLTA	Jumlah Murid
1966	939	201.995	70	12.338	23	3.267
1967	933	224.727	72	14.619	24	5.015
1968	1.024	218.508	103	16.337	24	5.772
1969	1.154	251.954	110	16.640	32	6.010
1970	1.173	265.294	122	18.822	33	3.557
1971	1.239	290.294	135	21.246	43	7.605
1972	1.314	297.542	133	22.395	43	8.166
1973	1.372	302.560	172	25.621	56	13.103
1974	—	—	168	29.576	45	10.496
1975	1.441	363.752	188	33.685	47	13.076
1976	1.914	412.427	207	38.790	55	15.594
1977	1.926	463.480	232	45.237	60	17.728
1978	2.148	548.585	253	51.567	76	22.136
1979	2.212	648.674	310	62.752	92	25.545
1980	2.624	709.215	343	76.252	99	22.835

**Keterangan :**

1. SD, SMTP dan SMTA Negeri dan Swasta
2. Data SD tahun 1974 tidak didapat.

TABEL 6

## JUMLAH SEKOLAH 1950 – 1969

No.	D e s a	Kecamatan	Dati II	Sek.	Pem.	Swt
1.	Gedung Pakuwon	T. Betung Selatan	Kodya Tjk/Tlb	SD SMTP SMTA	— — —	2 — —
2.	Kampung Sawah	T. Karang Timur	sda sda	SD SMTP SMTA	4 — —	2 — —
3.	Kota Agung	Kota Agung	Lampung Selatan	SD SMTP SMTA	1 1 —	— — —
4.	Pringsewu	Pringsewu	sda	SD SMTP SMTA	9 3 2	3 6 6
5.	Sukaratu	Kalianda	sda	SD SMTP SMTA	1 — —	— — —
6.	Gunung Sugih	Gunung Sugih	Lampung Tengah	SD SMTP SMTA	1 1 —	— — —
7.	Pekalongan	Pekalongan	sda	SD SMTP SMTA	— — —	— — —
8.	Blambangan	Abung Selatan	Lampung	SD SMTP SMTA	1 — —	1 — —
9.	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	sda	SD SMTP SMTA	1 1 —	— — —
10.	Ujung Gunung Hilir	Menggala	sda	SD SMTP SMTA	4 — —	— — —



**TABEL 7**  
**JUMLAH MURID 1950 – 1969**

No.	D e s a	Kecamatan	Dati II	Sek.	Putra	Putri	Jumlah
1.	Gedong Pakuon	T. Betung Selatan	Kodya Tjk/Tlb	SD SMTP SMTA	1.990 — —	1.990 — —	3.890 — —
2.	Kampung Sawah Lama	T. Karang Timur	sda	SD SMTP SLTA	— — —	— — —	— — —
3.	Kota Agung	Kota Agung	Lampung Selatan	SD SMTP SMTA	187 26 10	193 22 13	380 48 23
4	Pringsewu	Pringsewu	sda	SD SMTP SMTA	3.226 2.127 1.137	3.229 1.798 831	6.455 3.925 1.968
5.	Sukaratu	Kalianda	sda	SD SMTP SMTA	— — —	— — —	— — —
6.	Gunung Sugih	Gunung Sugih	Lampung Tengah	SD SMTP SMTA	155 55 —	45 25 —	200 80 —
7.	Pekalongan	Pekalongan	sda	SD SMTP SMTA	— — —	— — —	— — —
8.	Blambangan	Agung Selatan	Lampung Utara	SD SMTP SMTA	117 — —	113 — —	230 — —
9.	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	sda	SD SMTP SMTA	213 70 —	177 40 —	390 110 —
10.	Ujung Gunung Hilir	Menggala	sda	SD SMTP SMTA	563 — —	504 — —	1.067 — —

**TABEL 8**  
**JUMLAH GURU 1950 – 1969**

No.	De s a	Kecamatan	Dati II	Sek.	Jumlah
1.	Gedong Pakuwon	Teluk	Kodya	SD	65
		Betung	Tjk./Tlb.	SMTP	—
		Selatan		SMTA	—
2.	Kampung Sawah	Tanjung	sda	SD	—
		Karang		SMTP	—
				SMTA	—
3.	Kota Agung	Kota Agung	Lampung	SD	9
			Selatan	SMTP	2
				SMTA	—
4.	Pringsewu	Pringsewu	sda	SD	148
				SMTP	270
				SMTA	140
5.	Sukaratu	Kalianda	sda	SD	5
				SMTP	—
				SMTA	—
6.	Gunung Sugih	Gunung Sugih	Lampung	SD	4
			Tengah	SMTP	4
				SMTA	—
7.	Pekalongan	Pekalongan	sda	SD	—
				SMTP	—
				SMTA	—
8.	Blambangan	Abung Selatan	Lampung	SD	26
			Utara	SMTP	—
				SMTA	—
9.	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	sda	SD	34
				SMTP	18
				SMTA	—
10.	Ujung Gunung Hilir	Manggala	sda	SD	36
				SMTP	—
				SMTA	—

**TABEL 9**  
**JUMLAH SEKOLAH, MURID, KELAS DAN GURU SD, SMTP DAN SMTA**  
**PER JENIS SEKOLAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1980/1981**

Jenis Sekolah	Sekolah			Murid			Kelas			Guru			Lulusan '79/'80
	Neg.	Swt	Jml	Neg.	Swt	Jml	Neg.	Swt	Jml	Neg	Swt	Jml	
1. SD	2.110	408	2.518	621.947	87.267	709.215	17.773	2.550	20.323	15.398	1.953	17.351	40.638
2. SMP	60	275	335	30.248	43.601	73.849	631	893	1.524	1.190	727	1.917	14.696
3. SKKP	1	—	1	276	—	276	12	—	12	31	—	31	81
4. ST	2	3	5	523	308	831	25	9	34	73	46	119	320
Jumlah SMTP	63	278	341	31.047	43.909	74.956	668	902	1.570	1.294	773	2.067	15.097
5. SMA	15	46	61	9.416	7.017	16.433	211	177	388	346	618	964	2.234
6. SMEA	5	5	10	1.970	568	2.538	47	24	71	91	91	182	804
7. SMKK/ SMTK	1	—	1	286	—	286	10	—	10	26	—	26	81
8. STM/SMT Pert.	3	11	14	1.158	2.602	3.760	41	87	128	120	252	372	1.165
9. SPG	7	12	19	3.011	2.540	5.551	73	67	140	149	163	312	1.204
10. SGO	1	2	3	349	216	565	9	6	15	15	30	45	54
Jumlah SMTA	32	76	108	16.190	12.943	29.133	391	361	752	747	1.154	1.901	5.542
Jumlah Semua	2.201	762	2.967	669.184	144.120	813.304	18.832	3.813	22.645	17.439	3.880	21.319	61.277

**TABEL 10**  
**PERKIRAAN DAYA TAMPUNG PENDIDIKAN DASAR**  
**TERHADAP PENDUDUK USIA 7 - 12 TAHUN**  
**(SD NEGERI/SWASTA DAN MI) 1981/1982**

Kabupaten/Kodya	Penduduk Usia 12 - 1980	Penduduk Usia 7 - 12 tahun yang bersekolah			Proyek- si Pen- duduk 7 - 12 th. 1981	Perkiraan Daya Tam- pung SD 1981/1982			Perkiraan Pend. 7-12 yang bersekolah 1981/	
		SD Neg	SD Sw/MI	Jum- lah		Kl. 6 yang akan keluar	Dari Unit + lok baru	Jum- lah	Jml.	%
1. Tanjung Karang Teluk Betung	49.169	39.668	11.703	51.890 (104%)	52.031	5.596	960	6.556	57.927	111
2. Lampung Selatan	317.268	218.702	28.646	247.348 (78%)	335.732	19.030	31.320	50.350	297.698	89
3. Lampung Tengah	306.345	207.715	20.610	228.325 (75%)	324.174	21.696	38.040	59.736	288.061	89
4. Lampung Utara	158.898	125.627	6.263	131.890 (83%)	168.534	11.534	17 400	28.834	160.828	96
Propinsi Lampung	831.680	591.712	67.222	658.934	880.083	57.856	87.720	145.576	804.514	91

**TABEL 11**  
**PERKIRAAN DAYA TAMPUNG SMTP/SMTA NEG/SWT 1981/1982 PROPINSI LAMPUNG**

**I SMTP NEGERI DAN SWASTA**

Kabupaten/kota- madya	Perkiraan Lulusan s/d Tahun 1980/1981	Kelas III SMTP Negeri yang akan ke- luar		Tam- bahan Lokal dan Kelas	Perkiraan Daya Tampung 1981/1982							Prosentase Terhadap Lu- lusan SD tahun 1980/1981		
		SMP Neg	SMTP Kjr		Jumlah		Kelas III SMTP Swt akan ke- luar		Jml Daya tampung Neg & Swt			Neg	Swt	Jml
					Lo- kal	Murid	SMP	SMTP	Jml	Lo- kal	Murid			
1. Tanjung Karang Teluk Betung	5.590	35	6	—	41	1.640	52	2	54	95	3.800	29	39	68
2. Lampung Selatan	15.823	45	—	9	54	2.160	99	2	101	155	6.200	14	25	39
3. Lampung Tengah	20.611	50	2	10	62	2.480	112	—	112	174	6.960	12	22	34
4. Lampung Utara	10.957	47	—	23	70	2.800	33	—	33	103	4.120	17	23	40
Propinsi Lampung	52.981	177	8	42	227	9.080	296	4	300	527	21.080	17	23	40

**TABEL 12**  
**STATISTIK PERSEKOLAHAN PROPINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 1979/1980 – 1980/1981**

Jenis Sekolah	Tahun 1979/1980					Tahun 1980/1981						Keterangan
	Penduduk Usia sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Sek.	Ruang Kelas	Jumlah Guru	Jenis Sekolah	Penduduk Usia sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Sek.	Ruang Kelas	Jumlah Guru	
1. SD 7-12 Tahun	738.276	648.674	2.364	10.700	17.205	SD 7-12 Tahun	831.680	730.149	2.559	11.269	18.061	Data '80/81 menurut keadaan Pebruari 1980
2. SMTP 13-15 Tahun	270.771	62.757	315	1.584	3.505	SMTP 13-15 Tahun	287.504	76.349	351	1.727	4.822	
3. SMTA 16-18 Tahun	241.169	25.545	92	165	1.065	SMTA 16-18 Tahun	256.072	30.439	107	197	2.335	

Catatan : Penduduk Usia Sekolah : SD = 7 - 12 Tahun; SMTP = 13 - 15 Tahun; SMTA = 16 - 18 Tahun.

**JUMLAH BANGUNAN BARU SD, SMTP DAN SMTA  
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1979/81 – 1980/81**

No.	Tahun 1979/1980					Tahun 1980/1981			
	Tingkat Sekolah	Unit Sekolah	Ruang Kelas	Jumlah Guru	Keterangan	Unit Sekolah	Ruang Kelas	Jumlah Guru	Keterangan
1.	Sekolah Dasar	382	150	1.328	—	425	918	—	
2.	S M T P	3	15	274	3 unit = 27 Lok	4	30	398	4 unit = 24 Lok
3.	S M T A	1	5	103	1 unit = 12 Lok	1	15	154	1 unit = 15 Lok

## SLTA NEGERI DAN SWASTA

TABEL 13

Kabupaten/ Kotamadya	Perkiraan Lulus- an SMP 1980/ 1981	Perkiraan Daya Tampung Kelas I Tahun 1981/1982												Jumlah Daya Tampung SMTA Neg. Dan Swt				Prosentase terhadap lusan SMP Th. 1980/81	
		Kl. III SMTA Neg. yang akan keluar				Tam- bah- an Unit /Lo- kal	Jumlah Da- ya tampung SMTA			Kl. III SMTA Swt yang akan keluar		Jumlah Da- ya tampung SMTA Swt		Neg					
		SMA Neg	SMTA Neg Kej	SMTA Neg Keg	Jml. SMTA Neg		Lo- kal	Mu- rid	SMA	SMTA Kej	SMTA Keg	Kes- las /Lo- kal	Mu- rid /Lo- kal		Kes- las rid				
																Swt	Jml.		
Tanjungkarang Telukbetung	3.332	19	8	12	39	11	39	1.560	18	19	5	42	1.680	81	3.240	46	50	96	
Kab. Lampung Selatan	5.284	12	5	4	21	8	29	1.160	11	1	9	21	840	50	2.000	22	16	38	
Kab. Lampung Tengah	5.580	11	7	8	26	2	28	1.120	21	9	10	40	1.600	68	2.720	19	46	65	
Kab. Lampung Utara	3.035	9	3	2	14	5	19	760	9	1	5	15	600	34	1.360	25	45	70	
Propinsi Lampung	17.501	51	23	26	100	15	115	4.600	59	30	29	118	4.720	233	9.320	26	27	53	



Setelah pengakuan kedaulatan maka sejak tahun 1950, mulailah sekolah-sekolah dikembangkan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sekolah-sekolah menengah pertama mulai didirikan di kota-kota seperti di Telukbetung, Metro, Kotabumi dan Kotaagung. Usaha-usaha untuk mendirikan sekolah menengah atas baru dapat terlaksanakan di Tanjungkarang pada tahun 1952.

Dengan kata lain tingkat pendidikan di daerah Lampung sejak tahun 1952 telah terdapat Sekolah Pendidikan Dasar dan menengah. Sampai tahun 1960 di Lampung belum terdapat Perguruan Tinggi. Setelah Sekolah Menengah Atas Negeri didirikan tahun 1952, menyusul Sekolah Guru Atas pada tahun 1956, SMEA Negeri dan beberapa sekolah Menengah Swasta. Di samping itu didirikan juga sekolah-sekolah kejuruan seperti SKP/SKA yang kemudian menjadi SKKP dan SKKA, SGB, SMEA. Juga Sekolah Pendidikan Guru Jasmani yang kemudian menjadi SGO (Sekolah Guru Olahraga). Demikian keadaan pendidikan sampai tahun 1960.

Kebijakan pokok dalam pembangunan di bidang pendidikan dalam Repelita II, merupakan rangkaian kegiatan lanjutan, perluasan dan peningkatan dari berbagai usaha selama Pelita I. Masalah pendidikan yang nampak mendesak dalam Pelita II ini di antaranya : perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, pembinaan generasi muda dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

Dalam usaha perluasan kesempatan belajar/sekolah, untuk tingkat SD di Lampung telah dibangun sebanyak 734 gedung sekolah baru dari tahun 1970/1971 sampai tahun 1975. Dengan pertambahan gedung tadi tambahan murid yang dapat ditampung sebanyak 80.752 orang sehingga jumlah murid pada tahun 1975 menjadi 305.477 orang.

Akan tetapi walaupun pertambahan gedung sekolah sudah berjalan pesat (11,9% per tahun sejak 1970/1971 — 1975) dan jumlah murid yang tertampung bertambah banyak, namun barulah sekitar 50% dari anak usia Sekolah Dasar (6 — 13 tahun) dapat ditampung. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya pertambahan jumlah penduduk daerah Lampung (5,23% per tahun).

Dalam hal peningkatan dan pemerataan mutu, pada tahun 1975 oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung telah dilaksanakan berbagai kegiatan penataran

terhadap para guru dari tingkat SD, SLP, SLA. Kemudian pada tahun 1976 mereka telah melaksanakan Kurikulum 1975 sejak tahun ajaran 1977. Sehubungan dengan program relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, pada tahun 1975 dibuka SMPP (Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan) di Tanjungkarang, pembangunan SMTP (Sekolah Menengah Teknologi Pertanian) di Metro, peningkatan SMEA Tanjungkarang menjadi SMEA Pembina. Juga dilakukan pemindahan status dari beberapa ST dan SMEP menjadi SMP. Dalam peningkatan mutu pendidikan itu, tak ketinggalan usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta, seperti sekolah di bawah Yayasan Xaverius, Muhammadiyah dan sebagainya. Dalam pengadaan laboratorium-laboratorium mereka pun dapat segera menyelenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dari pemerintah.

Perkembangan Perguruan Tinggi di Lampung dimulai tahun 1960 ketika dibukanya Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi di Telukbetung yang termasuk Universitas Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Dengan modal kedua Fakultas inilah pada tanggal 23 September 1965 melalui Keputusan Menteri PTIP No. 195 tahun 1965 didirikan Universitas Lampung. Kemudian tanggal 28 Januari 1968 IKIP Jakarta Cabang Tanjungkarang diintegrasikan ke dalam Universitas Lampung, menjadi Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan.

Selanjutnya UNILA berkembang pula ketika 1 Januari 1973 Fakultas Pertanian yang dirintis sejak tahun 1967 diakui pula sebagai Fakultas Pertanian Negeri dalam lingkungan UNILA. Sejak berdirinya sampai tanggal 28 Mei 1973, Unila dipimpin oleh suatu Presidium yang diketuai oleh Gubernur Lampung, selanjutnya sejak tanggal tersebut dipimpin oleh seorang Rektor. Perkembangan Perguruan Tinggi di Lampung ditunjukkan pula dengan adanya IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Raden Intan, APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) dan beberapa perguruan tinggi swasta seperti AAN Tanjungkarang, SSLA Lampung (sebelumnya Universitas 17 Agustus Cabang Tanjungkarang), ABN Tanjungkarang.

Institut Jurnalistik Indonesia (sudah bubar), Akademi Maritim Gaya Baru, dan APP (sudah diintegrasikan kepada STIAL). AAN Tanjungkarang yang semula adalah sebuah AAN Negeri, tetapi ditutup Departemen P dan K dalam tahun 1973, sehingga sekarang

menjadi sebuah Akademi Swasta. Dan beberapa tahun yang lalu ada pula Akademi Teknik Muhammadiyah dan Akademi PUT Lampung, tetapi tidak berhasil berkembang. Beberapa Fakultas di lingkungan Unila pernah membuka cabang-cabangnya di kota-kota Kabupaten seperti Metro, Kotabumi, dan Pringsewu. Pada tahun 1970 cabang Unila berupa kelas jauh dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Pendidikan masih ada di Metro, sedangkan di Kotabumi dan Pringsewu sudah bubar.

Pada saat ini yang terus berkembang adalah Sekolah Tinggi Pendidikan Muhammadiyah di Metro dan Pringsewu. Beberapa waktu yang lalu dalam tahun 1980 ini telah diresmikan oleh GU—bermur KDH Propinsi Lampung Yasir Hadibroto sebuah bangunan kuliah STIP Pringsewu di Pringsewu, sebagai tempat kuliah dan ruang kantor dari sekolah tinggi tersebut.

Sampai saat ini masih kita akui bahwa kehidupan perguruan tinggi di Lampung masih tertinggal, terutama kualitasnya dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Berangsur-angsur Unila berkembang dan berusaha meningkatkan mutunya. Sebelumnya banyak pelajar yang tergolong dari keluarga ekonom kuat lebih bersekolah di Jawa, namun melihat perkembangan Unila yang cukup pesat maka pandangan tersebut sudah mulai berubah. Sudah banyak orang tua menyadari lebih baik sekolah di Lampung dari pada bersusah menyekolahkan anaknya ke Jawa atau ke tempat lain.

Selain Universitas Lampung, maka IAIN juga mempunyai kesempatan berkembang lebih baik. Sebagaimana halnya Unila, IAIN mendapat bantuan pemerintah Daerah Lampung untuk membuat kampus. Pada saat ini IAIN telah menempati kampus besarnya di Labuhan Batu Kedaton, Tanjungkarang.

IAIN Raden Intan Tanjungkarang didirikan secara resmi pada tahun 1968 dengan Fakultas Tarbiyah sebagai fakultas tertua. Fakultas Tarbiyah ini semula didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung tahun 1963 dan dijadikan Fakultas Tarbiyah Negeri di bawah Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan di Palembang. Menyusul pula didirikannya Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin.

IAIN Raden Intan Tanjungkarang juga dipimpin oleh seorang Rektor yang juga sebelumnya dipimpin semacam Presidium. Pada tahun 1975 Rektornya ialah Drs. Suwarno Achmadi dan sekarang

Rektornya ialah Drs. Muhammad Zen.

Demikianlah perkembangan pendidikan daerah Lampung sejak dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Di samping itu berkembang pula pendidikan prasekolah, yaitu Sekolah Taman Kanak-Kanak terutama timbul di kota-kota saja, sedangkan di desa-desa pada umumnya anak langsung memasuki sekolah dasar terlebih dahulu memasuki Taman Kanak-Kanak.

#### **D. SOSIAL BUDAYA**

Didasarkan oleh adanya sistem pelapisan sosial pada masyarakat di daerah Lampung, baik oleh penduduk asli maupun oleh penduduk yang pada hakekatnya tidaklah ada perbedaan, dan telah tumbuh satu kebersamaan dan saling pengertian.

##### **1. Lembaga Adat**

Lembaga adat pada masyarakat Lampung asli lebih tampak dan tetap berperan sesuai dengan fungsinya. Kedudukan pemuda adat ditentukan oleh garis keturunan laki-laki, artinya anak tertua laki-laki menurut garis keturunannya. Mereka juga berperan dalam adat pepadun atau dalam kepemimpinan adat dan pada masyarakat kekerabatannya. Dalam hubungan adat pepadun terdapat tiga tingkatan yaitu :

- a. *Pepadun Marga*, yang merupakan kedudukan tertinggi dalam kepemimpinan adat,
- b. *Pepadun Tiyuh*, dan
- c. *Pepadun Suku*.

Di samping adanya kepemimpinan adat atau yang juga dikenal dengan kepenyimbangan, yaitu adanya *numpang* atau masyarakat biasa. Lapisan numpang, ini adalah mereka yang tidak tentu asal-usulnya. Bagi penduduk pendatang pada umumnya mewarisi adat-istiadat asalnya namun telah terjadi sedikit demi sedikit adanya integrasi, sebagai akibat dari adanya interaksi sosial budaya.

##### **2. Lembaga Sosial**

Pada masyarakat pedesaan lembaga sosial tampak adanya kebersamaan penduduk untuk membuat lumbung desa, di mana pada musim panen mereka menyerahkan hasil bumi atau panennya, khususnya padi dengan jumlah yang ditentukan. Pada musim paceklik

mereka membongkar lumbung desa, serta menerimakannya kembali dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan musyawarah. Penerimaan kembali ini akan dibayar atau dikembalikan oleh para anggotanya pada musim panen berikutnya. Pada pembayaran kembali itu jumlahnya meningkat, dan ditentukan berdasar musyawarah bersama anggota, sehingga tidak mustahil jumlah padi pada lumbung desa terus bertambah.

Kegiatan arisan yang juga merupakan bagian dari kegiatan sosial dalam masyarakat, dan seperti sekarang banyak kita kenal, pada masa sebelum tahun 1969, belum banyak dilakukan oleh masyarakat, dan jika itu ada masih sangat terbatas. Lembaga sosial lainnya seperti panti asuhan bagi anak-anak yatim, yatim piatu masih sangat terbatas dan sedikit jumlahnya. Panti-panti asuhan tersebut pada umumnya dikelola oleh lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, Xaverius dan sebagainya. Demikian halnya dengan *amal zakat*, bagi mereka yang beragama Islam, masih diatur oleh masing-masing jamaahnya, walaupun tetap tidak bertentangan dengan aturan yang ditentukan di dalam ajaran agama Islam. Pemerintah yang menyelenggarakan suatu badan yang bernama *Bazit*, yaitu Badan Amal Zakat Fitrah yang dalam usahanya mengkoordinasi usaha sosial yang diwajibkan oleh agama.

### 3. Lembaga Kesenian dan Olah raga.

Pada umumnya kesenian daerah telah berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Kesenian daerah ini tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Bagi penduduk pendatang, mereka tidak segan-segan mengembangkan kesenian daerah asalnya. Bahkan dengan keadaan yang demikian mereka merasakan satu keadaan yang tetap seperti di tempat asalnya. Kesenian yang mereka bawa ini dapat merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dari pada usaha pemerintah dalam bidang transmigrasi.

Beberapa kesenian daerah dapat dikemukakan :

#### a. Seni Rupa

Seperi arsitektur, seni pahat, seni ukir, seni lukis, seni kerajinan (meliputi : kerajinan daun pandan rotan, bambu, dekorasi).

#### b. Seni Tari

Yang banyak sangkut pautnya dengan upacara adat. Dalam seni-

tari ini terdapat seni tari klasik dan tari kontemporer atau seni tari kreasi baru.

Seni tari klasik seperti : Tari Nyambai/Sambai atau Tari Debingi, Tari Sambai Tamu, Tari Sambai Geguai atau Tari Upah lelah, Tari Sambai Kuari Nakbai atau tari tamu dari adik perempuan, Tari Sambai Adat.

Kecuali Tari Nyambai yang dapat digolongkan dalam jenis tari klasik dikenal pula tari Kipas Sahwi atau Tari Ceti, Tari Serujung, Tari Piring. Sedangkan tari Kreasi baru (kontemporer) seperti : Tari Sembah, Tari Manjau, Tari Sebambangan, Tari Serai Serumpun.

#### c. Seni Suara

Dalam seni suara kita bedakan dalam :

- 1) Seni suara/vokal tradisional tanpa instrumentalia, adanya jenis-jenis Muayak atau Ngantau di Lampung Bagian Barat Adi atau Adi Hatang di daerah Way Lima dan Kalianda, Pisan di daerah Pubian dan Abung, Kitapun di daerah Way Kanan.
- 2) Dalam seni vokal tradisional dengan iringan instrumental, adanya seni suara : Diker atau Zikir dengan iringan kendang atau terbang besar, dan Adi/Adi Lom Lamban dengan iringan harmonium.  
Beberapa instrumen musik klasik dapat dikemukakan seperti : Serdam, yaitu suling yang terbuat dari bambu tipis, Kulintang bambu.

#### d. Seni Sastra

Dalam seni sastra daerah asli dapat kita jumpai adanya :

- a) Cerita rakyat (*Folklore*), di antaranya ialah cerita rakyat tentang : Raden Jamban Hangkirat, Cerita anak dalam, Cerita Sipahit Lidah, dan Dongeng-dongeng.
- b) Peribahasa dan pepatah, yang biasa dilakukan dalam upacara-upacara adat seperti : melamar, manjau, upacara perkawinan.
- c) Pantun, ini banyak dilakukan dalam kalangan Mulei Meranai (bujang-gadis) dengan mengadakan Bandung atau Bubandung (pantun bersahut-sahutan).

e. Seni Drama

Seni drama di daerah Lampung kurang berkembang sebagai akibat dari adanya faktor-faktor adat dan sebagainya. Walau demikian seni drama juga terdapat seperti di daerah Krui, dengan nama *Tabut*. Sebuah drama yang mengisahkan perjuangan Hasan-Husin, cucu Nabi Muhammad, dan dipagelarkan pada saat-saat tertentu. Kemudian dalam hubungan dengan olahraga, beberapa cabang olahraga telah lama memasyarakatkan di daerah Lampung. Ini kita sadari bahwa olahraga dari penggunaan alat-alat yang sederhana, serta prasarana atau lapangan olahraga yang jauh dari persyaratan yang ditentukan. Namun demikian telah memberi kesan bahwa olahraga telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Cabang olahraga yang telah lama dikenal adalah adanya gobak sodor, sepak bola, bola volley, tenis meja, kasti, pencak silat dan sebagainya.

4. Organisasi Kepemudaan

Sebagai akibat dari adanya organisasi-organisasi partai politik, dan organisasi-organisasi massa, maka terdapat banyak organisasi pemuda. Hal ini tidak saja terdapat di dalam masyarakat, tetapi juga melanda para siswa di sekolah-sekolah, bahkan di kalangan para mahasiswa di kampus-kampus. Mereka dikotak-kotakkan di dalam berbagai organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa. Dengan lahirnya Orde Baru mereka mengorganisasi dari dalam kesatuan-kesatuan aksi pemuda, pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya. Di pihak lain dalam organisasi kepramukaan, yang merupakan organisasi pendidikan di kalangan anak-anak dan pemuda sebelum tahun 1961, banyak tergabung di dalam berbagai macam organisasi kepanduan. Dengan lahirnya "Gerakan Pramuka" yang praktis baru tahun 1963 di daerah Lampung dapat terealisasi, yang di dalam awal perkembangannya masih sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat oleh adanya peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 yang merupakan pukulan yang cukup berat bagi pertumbuhan dan perkembangan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka diisuekan sebagai gerakan pionir, atau gerakan *Soekarno Jugend*. Sehingga pada masa Orde Baru sampai menjelang Pelita I Gerakan Pramuka di daerah Lampung boleh dikatakan baru mulai *take of* dengan membenahi organisasi secara

mantap di setiap tingkatan. Demikian halnya dengan organisasi-organisasi pemuda yang tergabung di dalam organisasi pemuda khususnya, pelajar dan mahasiswa, dalam rangka mengikis habis sisa-sisa G 30 S/PKI, merupakan komponen Orde Baru, secara aktif mengambil bagian di dalam kerangka perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di pihak lain dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah rakyat telah turut aktif dengan adanya organisasi Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), yang sekarang kita kenal dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3).

## **5. Lembaga Keagamaan**

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung, agama-agama yang terdapat di daerah Lampung ialah Islam, Kristen, Katholik, dan Hindu/Budha.

Pada tahun 1979 di daerah Lampung terdapat 10.330 tempat peribadatan yang terdiri dari Mesjid, langgar/mushola, gereja Protestan, gereja Katholik, kuil Hindu Bali dan Kuil Cina. Di samping agama-agama tersebut di atas, di daerah Lampung juga terdapat adanya aliran-aliran kepercayaan yang pada tahun 1977 tercatat dengan jumlah 2.672 orang.

Berdasarkan perkembangannya agama di Lampung, sebagai akibat pengaruh jaman prasejarah, adanya kepercayaan animisme. Ini masih tampak dalam kegiatan-kegiatan kehidupan masyarakat seperti : cara bercocok tanam, menuai padi, pindah rumah, upacara-upacara adat dan lain-lain.

Dapat pula dimungkinkan bahwa di daerah Lampung berkembang agama Hindu Bhairawa, sebagai wilayah kekuasaan Sriwijaya, maka tidak mustahil bahwa di Lampung telah berkembang agama Budha. Kemudian pada abad XIV, XV dan XVI berkembang Islam di daerah Lampung, yang untuk seterusnya merupakan agama yang mayoritas dianut di daerah ini. Penduduk asli merupakan penganut agama Islam yang taat yang sekaligus mewarnai tata kehidupannya. Sedang agama Katholik berkembang atau masuk di daerah Lampung dengan datangnya transmigran dari daerah Jawa sejak tahun 1905, yaitu di daerah Gedong Tataan. Kemudian disusul oleh masuknya agama Protestan yang banyak dianut oleh orang-orang yang datang dari daerah Tapanuli dan Cina keturunan.



## **6. Lembaga Kesehatan**

Lembaga-lembaga kesehatan yang dimaksud meliputi sarana-sarana seperti : Rumah Sakit/Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dan Balai Keluarga Berencana (Balai KB). Walau sudah terdapat Rumah-rumah Sakit Umum di beberapa tempat di Lampung sebelum Pelita I, seperti terdapat di Pringsewu, Tanjungkarang, Metro dan Kotabumi, fasilitas dan peralatannya tidaklah seperti yang sekarang kita jumpai, demikian halnya dengan tenaga-tenaga medisnya. Keadaan yang demikian telah menyebabkan belum adanya pemerataan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan bagi penduduk/masyarakat. Sehingga di daerah-daerah pedesaan masih banyak pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh para tenaga-tenaga tradisional seperti dukun, tabib dan sebagainya. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) masih sangat terbatas, demikian halnya dengan Puskesmas, dan Balai KB boleh dikatakan belum ada.

Tempat-tempat bersalin juga masih sedikit sekali kita jumpai, sehingga pada tahap awal pelayanan kesehatan terhadap ibu-ibu yang akan melahirkan pemerintah memberikan penyuluhan terhadap para dukun bayi. Pusat-pusat kesehatan lainnya di samping yang langsung ditangani oleh pemerintah juga terdapat pelayanan kesehatan yang dikelola oleh swasta seperti Muhammadiyah, dan Xaverius yang juga masih terbatas jumlahnya.

## **7. Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa.**

Jika kita sekarang mengenal lembaga-lembaga pembangunan desa seperti Lembaga Sosial Desa (LSD), yang sekarang bernama Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa (LKMD), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Siaran Pedesaan, Bank Pembantu Pembangunan Desa (BPPD), maka di antara lembaga-lembaga tersebut sebelum Pelita I, baru ada LSD. Sebagai lembaga yang menggerakkan pembangunan masyarakat pedesaan seperti yang diharapkan.

## **8. Lembaga Hukum.**

Di tingkat desa kita mengenal adanya aparat hukum yang ditangani oleh Lurah, atau Kepala Kampung yang dibantu oleh perangkat desa seperti adanya Hansip dan Kamra. Pada masyarakat

Jawa terdapat adanya Polisi Desa yang membantu Lurah dalam penyelesaian-penyelesaian pidana dan perdata yang timbul di wilayahnya, yang masih memungkinkan dapat diselesaikan.

Lembaga Hukum lainnya di tingkat Kecamatan, baru pada beberapa Kecamatan saja yang memiliki lembaga hukum seperti kejaksaan, di samping adanya aparat kepolisian setingkat Sektor. Di setiap Tingkat II (Kabupaten dan Kotamadya telah dijumpai adanya Kejaksaan Negeri atau Komando Resort Kepolisian). Dalam kaitannya dengan keagamaan di Tanjungkarang terdapat Pengadilan Agama Tanjungkarang. Demikian halnya dengan lembaga pemasyarakatan yang dahulu dikenal dengan penjara, di daerah Lampung terdapat beberapa Lembaga Pemasyarakatan seperti di Tanjungkarang, Metro, Menggala, **Kotabumi**, Krui dan Sukadana.

#### E. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Struktur Pemerintahan desa sebelum Pelita I pada umumnya dapat kita golongkan di dalam dua bagian, yaitu : susunan pemerintah yang terdapat pada masyarakat penduduk asli dan masyarakat Jawa yang merupakan bagian yang terbesar dibandingkan dengan penduduk pendatang lainnya.

1. Susunan pemerintah pada masyarakat penduduk asli, yang dapat dikatakan sebagai desa administratif, yaitu adanya struktur pemerintah negeri di tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan dipimpin oleh Kepala Negeri. Di bawah Kepala Negeri terdapat aparat kelurahan yang disebut Kepala Kampung atau *Krio*, yang membawahi beberapa *Punggawo*. Jadi pada tingkat ini kita mengenal adanya tiga buah tingkatan aparat pemerintah desa.
2. Susunan Pemerintahan pada masyarakat penduduk pendatang khususnya pada masyarakat transmigrasi dari Jawa, di mana di tingkat kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Aparat di bawah Lurah ialah para *Kamituo* yang memimpin daerah pedukuhan-pedukuhan. Di bawah Kamituo dikenal adanya aparat *Kebayan*, yang memimpin wilayah lingkungannya. Di samping adanya perangkat-perangkat desa tersebut, juga dikenal adanya perangkat desa seperti : *Penghulu* (yang memimpin mesjid, Imam Mesjid), P3NTR, Kaum, *Ili-ili* atau *Ulu-Ulu*, Polisi Desa.

## **F. CARA PEMILIHAN PEMIMPIN PEMERINTAHAN DESA**

Sesuai dengan asas gotong royong yang sejak dahulu diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang kita, maka dalam hubungan pemilihan pemimpin-pemimpin desa sangat erat dengan sifat kekeluargaan yang diilhami oleh khidmad kebijaksanaan dan musyawarah.

1. Di dalam masyarakat penduduk asli Lampung, sistem pemilihan perangkat desa, khususnya pada pemimpin kelurahan yaitu Kepala Negeri, Krio dan Punggawo, walau adanya pemilihan langsung dari rakyat, masih terdapat adanya kecenderungan memilih secara adat. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh sebab adanya adat masyarakat Lampung yang mengenal sistem keturunan atau genealogis.  
Sehingga perangkat-perangkat desa diangkat dengan dasar garis keturunan secara turun temurun.
2. Sedangkan masyarakat penduduk pendatang, khususnya masyarakat Jawa, sistem pemilihan perangkat desa, terutama untuk memimpin Lurah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Di sini para calon lurah berkompetisi merebut simpati rakyat dengan berbagai cara. Pada saat pemilihan para calon menggunakan lambang-lambang terutama sesuai dengan pilihannya. Rakyat memilih memasukkan suaranya (biasanya yang dipergunakan ialah lidi) ke dalam tabung yang telah disediakan dalam sebuah kamar tertutup. Suara terbanyak di antara para calon setelah dihitung di depan umum, dialah yang menjadi Lurah. Setelah mendapatkan pelantikan Lurah memilih Carik desa dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangannya. Kemudian juga memilih Polisi Desa. Untuk menentukan para Kamituo di tiap-tiap pedukuhan Lurah juga meminta pertimbangan-pertimbangan dengan para tokoh masyarakat. Lurah bersama Polisi Desa, Carik, Kamituo dan beberapa tokoh masyarakat menetapkan perangkat desa Kebayan.

## **G. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH**

Pemimpin-pemimpin masyarakat non pemerintah, pada umumnya kita kenal dengan tokoh-tokoh masyarakat, juga dikenal dengan

nama informal leader. Pada umumnya mereka ini adalah terdiri dari : para pemimpin-pemimpin adat dan para alim ulama. Dikaitkan dengan peranannya di tengah-tengah masyarakat serta statusnya di dalam masyarakat sangat berpengaruh. Oleh karena itu mereka juga merupakan komponen yang tidak dapat kita abaikan dalam suksesnya pembangunan bangsa dan negara.

Ditinjau secara historis kedua kelompok ini pernah terjadi perselisihan yang tajam, juga karena adanya faktor-faktor luar yang berusaha mempertajam perselisihan itu. Tidak sedikit kaidah-kaidah agama yang bertolak belakang dengan adat atau sebaliknya. Bagi kelompok adat dengan dalih warisan adat yang perlu dilestarikan yang kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan agama.

Di pihak lain kelompok alim ulama bersikap keras untuk menegakkan agama sesuai dengan ajarannya. Kemampuan menyatukan kedua kelompok tersebut merupakan usaha yang tidak mudah, oleh karenanya maka usaha pemerintah dengan dasar negara Pancasila sedikit demi sedikit telah dapat dirasakan hasilnya, sehingga persatuan dan kesatuan yang tidak hanya untuk pemimpin adat dan pemimpin Alim Ulama dapat hidup dalam kerukunan. Mereka di tengah-tengah masyarakat sangat dihargai, bahkan merupakan kunci dari keberhasilan suatu pembangunan, ditinjau dari sudut kepemimpinan.

## **H. ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK**

Berbicara tentang organisasi politik dan non politik di daerah pedesaan pada masa sebelum Pelita I, khususnya sebelum tahun kelahiran Orde Baru adalah berbeda dengan masa Orde Baru, di mana kehidupan politik mulai diatur sesuai dengan UUD 1945. Demikian pula halnya jika kita lihat pada masa pelaksanaan demokrasi liberal antara tahun 1950 — 1959 yang berakhir dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Partai politik pada kurun waktu 1950 — 1959 cukup banyak, seperti terlihat dari hasil pelaksanaan Pemilu 1955. Pada masa demokrasi terpimpin kehidupan politik agak terganggu. Rakyat terombang-ambing oleh sikap para pemimpin yang ingin merebut banyak simpati, yang kadang-kadang tidak kurangnya harus mengorbankan kepribadiannya sebagai miliknya yang utama dan pertama dalam kehidupan. Dengan kelahiran Orde Baru yang ditandai dengan penataan kembali tata kehidupan secara me-

nyeluruh baik kehidupan politik yang ditandai dengan penertiban partai-partai politik. Lain halnya dengan organisasi non politik, khususnya mereka yang bergerak dalam kegiatan kemasyarakatan. Organisasi non politik ini banyak bergerak di bidang sosial dan kebudayaan, seperti Muhammadiyah, organisasi-organisasi pemuda yang independen, gerakan Pramuka dan sebagainya.

—oOo—

### **B A B III**

#### **PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAH DESA**

##### **A. LANDASAN PELAKSANAANNYA**

Untuk melaksanakan Pembangunan perlu disusun lebih dahulu Rencana atau Pola Pembangunan. Pelaksanaan pembangunan itu dilaksanakan secara bertahap dan berencana, agar pembangunan itu dapat berhasil dengan baik dan mencapai sasarannya.

Perencanaan dan pentahapan pembangunan itu didasarkan pada kenyataan-kenyataan kemampuan kita yang ada serta landasan perjuangan Bangsa dan harapan rakyat Indonesia seluruhnya, karena tanpa rencana yang kongkrit dan realistis dan berlandaskan aspirasi-aspirasi rakyat itu, tidak mungkin dilaksanakan pembangunan itu dengan berhasil dan terarah.

Seperti kita ketahui pada masa-masa sejak tahun 1945 sampai tahun 1966 suasana negara kita timbul tenggelam dalam pelaksanaan pembangunan itu, sehingga pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Peristiwa-peristiwa yang menimpa dan merongrong negara kita sejak 1945 itu mempersulit pembangunan kita, karena kita harus menghadapi agresi Belanda dan selanjutnya juga peristiwa-peristiwa rongrongan dari dalam negeri kita. Selain itu juga adanya berbagai penyelewengan selama pemerintahan ORDE Lama, menyebabkan pembangunan itu sendiri menjadi terhambat atau terganggu. Semenjak Pemerintah Orde Baru pembangunan itu digiatkan kembali berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pemerintah Orde Baru menata kembali hal-hal yang telah menyimpang atau menyeleweng pada masa Orde Lama.

Dalam ketetapan MPRS No.: XIII/1966 disebutkan tentang penggantian Kabinet Dwikora dengan Kabinet Ampera. Tugas pokok Kabinet yang disebut Dwi Dharma Kabinet Ampera itu antara lain : memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Hal itu tercantum di dalam Program Kabinet Ampera yang disebut Catur Karya Kabinet Ampera.

Selanjutnya di dalam Ketetapan MPRS No. : XLI/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan disebutkan di dalam Program-

nya yang disebut Panca Krida Kabinet Pembangunan antara lain :

- I. Menciptakan Stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum.
  - II. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (ke-I)
  - III. Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XLII/1968.
  - IV. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30 S/PKI dan setiap perongrongan, penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
  - V. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara dari tingkat pusat sampai daerah.
- a. Pada tahun 1969 pemerintah telah menyusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-I (mulai 1969/1970 — 1974/1975) yang disingkat REPELITA. Repelita itu mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1969 dengan pembiayaan keseluruhannya Rp. 1.420.000.000.000,— (Rp. 1,42 trilyun atau 1.420 milyar rupiah). Repelita itu tersusun dalam 3 buku yaitu : Buku I, Buku II dan Buku III.
- Dasar Hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menyusun Repelita itu adalah Ketetapan MPRS XLI/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Di dalam Konsideran Ketetapan MPRS No. : XL/1968 ditegaskan :
- 1) Dalam rangka melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun perlu dibentuk Kabinet Pembangunan.
  - 2) Politik Kabinet Pembangunan ini sesuai dengan kehendak rakyat menuju ke arah Stabilitas dan Pembangunan Nasional.
- Pada Krida I dan II dari Panca Krida Kabinet Pembangunan seperti tersebut di atas disebut tentang Pelita I. Maka untuk melaksanakan Ketetapan MPRS No. : XLI/1968 terutama mengenai pasal 1, pemerintah melalui Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-I yang telah dituangkan di dalam Keputusan Presiden No. :

319 tahun 1968 tentang Repelita yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 1968.

Isinya sebagai berikut :

Pasal 1 : Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969 — 1973 sebagaimana termuat dalam buku I, II dan III Lampiran Keputusan Presiden ini merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti yang ditugaskan oleh MPRS.

Pasal 2 : Kebijakan-kebijaksanaan pelaksanaan Repelita akan dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, serta kebijakan-kebijaksanaan lainnya.

Pasal 3 : Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan-perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan penyesuaian terhadap Repelita.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Repelita itu adalah :

Pertama : Harus menaikkan penghasilan rakyat kecil, sehingga berarti perbaikan hidupnya.

Kedua : Disusun berdasarkan keadaan dan kemampuan-kemampuan kita dewasa ini.

Ketiga : Sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pelaksanaan Pembangunan Nasional selanjutnya.

Di dalam pelaksanaar Repelita harus dipegang teguh prinsip-prinsip :

- 1) Landasan Pancasila
- 2) Demokrasi ekonomi tetap harus merupakan pembimbing utama dari pada Rencana Pembangunan ini.
- 3) Negara Kesatuan, hal ini berarti bahwa setiap segi dari Repelita dan pelaksanaannya harus senantiasa merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkokoh kesatuan Indonesia, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan hankam.



Sasaran Pelita adalah :

- a. Sandang pangan
- b. Perbaikan prasarana
- c. Penyediaan perumahan rakyat
- d. Perluasan lapangan kerja
- e. Kesejahteraan rohani.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan itu dititikberatkan pada :

- a. Bidang Pertanian
- b. Bidang industri
- c. Bidang kesejahteraan rakyat dan mental spiritual
- d. Bidang hankam.

Bidang pertanian mendapat perhatian besar, karena sebagian besar rakyat kita adalah petani dan kebutuhan kita akan pangan masih lebih besar dari pada yang kita hasilkan. Dengan pembangunan di bidang pertanian, persawahan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, berarti makin banyak lapangan pekerjaan terbuka dan penghasilan rakyat makin naik.

Pembangunan di bidang industri ditekankan pada industri pupuk, semen, alat-alat pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Juga industri yang menghasilkan barang impor tekstil, kertas, mobil dan bahan perumahan.

Di samping itu pembangunan prasarana seperti jalan raya, listrik, telkom, air minum ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Dan apabila prasarana dapat menjangkau ke desa-desa dan kampung-kampung yang terisolir, maka pengangkutan hasil-hasil akan lebih mudah dilaksanakan, sekaligus menaikkan taraf hidup rakyat pedesaan. Bahwa pembangunan kita juga menjangkau sampai ke desa-desa dapat kita lihat dari skala prioritas proyek-proyek dan pembiayaan seperti tercantum dalam daftar di halaman berikut.

Pelaksanaan dan peningkatan pembangunan itu didasarkan atas kemampuan kita dewasa ini. Peningkatan produksi pangan dan bahan-bahan ekspor adalah dalam usaha agar dalam jangka waktu lima tahun mendatang kita tidak lagi mengimpor beras. Pembangunan dalam bidang perhubungan, pengangkutan dan telekomunikasi, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan agama juga diusahakan menjangkau sampai ke desa-desa.

Bidang / Sektor		1969/1970	1973/1974
A.	Bidang ekonomi	19,4	829
1.	Pertanian dan Irigasi	35,1	319
2.	Industri dan pertambangan	18,3	130
3.	Tenaga Listrik	10,9	100
4.	Perhubungan dan Pariwisata	27,1	230
5.	D e s a	3,0	50
B.	Bidang Sosial	19,6	172
1.	Kesehatan dan Keluarga Berencana	4,6	42
2.	Pendidikan dan Kebudayaan	10,5	95
3.	Sosial dan lain-lain	4,5	35
C.	Bidang Umum	9,5	58
1.	Pertahanan dan Keamanan	4,0	28
2.	Lain-lain	5,3	30

Dalam hal transmigrasi dan keluarga berencana maka dalam lima tahun pertama Pelita pelaksanaan transmigrasi disinkronisasikan dengan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek yang ada, seperti persawahan pasang surut, eksploitasi kehutanan dan perikanan. Mengenai pembangunan desa di dalam Repelita I paragraf 99 disebutkan bahwa : pemerintah sangat menaruh perhatian kepada pembangunan desa. Walaupun di dalam lima tahun pelaksanaan Pelita I telah diperkirakan bahwa perekonomian rakyat yang sebagian besar tinggal di desa akan naik, tetapi pemerintah merasa perlu memberikan bantuan kepada setiap desa sebesar Rp.100.000,— pada tahun pertama pembangunan, dalam rangka memajukan dan mengembangkan potensi desa sebagai satuan masyarakat. Kalau dilihat dari besarnya bantuan itu memang tidak besar, tetapi diharapkan dengan bimbingan dan pengarahan penggunaan dana tersebut secara baik, terutama untuk pengadaan bahan-bahan bangunan yang tidak dimiliki

oleh desa, bantuan uang itu dapat memberikan dorongan pengarah-an kemampuan yang dimiliki oleh desa sehingga dapat menghasilkan proyek-proyek pembangunan desa yang bermanfaat bagi rakyat di desa tersebut.

- b. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Di dalam GBHN tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi landasan pembangunan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945, karena pembangunan kita adalah pembangunan masyarakat kita seluruhnya dan pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan Pelita II adalah :

1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Sementara itu terus ditingkatkan usaha-usaha untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang ada guna pembangunan nasional dengan membina swadaya dan merangsang prakarsa serta partisipasi aktif seluruh masyarakat. Pembangunan di bidang pertanian tetap diteruskan bahkan diperluas, sehingga bidang pertanian tetap menjadi landasan pembangunan tahap-tahap berikutnya. Usaha-usaha untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dalam pembangunan nasional ditingkatkan, dengan membina swadaya dan merangsang prakarsa serta partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha untuk meratakan pembagian kembali hasil pembangunan, baik berupa penyebaran yang lebih merata pelaksanaan pembangunan bagi tiap-tiap daerah, maupun berupa peningkatan penghasilan anggota masyarakat karena kegiatan mereka yang produktif. Usaha-usaha meratakan penyebaran hasil pembangunan itu dituangkan dalam program-program yang kongkrit, yaitu berupa perhatian khusus terhadap daerah minus, sehingga penduduknya yang tergolong miskin mendapat kesempatan membangun daerahnya, berarti menikmati pula hasil pembangunan.

Usaha lain untuk meratakan penyebaran hasil pembangunan dicantumkan dalam program tersendiri yang dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang masih rendah tingkat penghasilannya seperti nelayan, pekerja-pekerja kerajinan rakyat, petani

penggarapan yang tidak memiliki tanah tersendiri dan petani yang memiliki tanah terlalu kecil. Koperasi dikembangkan dengan mengutamakan koperasi produksi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan rakyat dan kerajinan tangan. Sistem kredit BIMAS disertai penyuluhan yang intensif mengenai tehnik produksi dan pemasarannya serta penyediaan sarana produksi diusahakan untuk bidang-bidang produksi yang lain, seperti produksi palawija, kerajinan rakyat industri kecil dan sebagainya. Peningkatan pembangunan pedesaan akan mencegah derasnya perpindahan penduduk ke kota-kota besar.

Di samping itu perluasan kesempatan kerja juga perlu dituangkan dalam program-program antara lain pembangunan proyek-proyek Inpres dan proyek-proyek padat karya di daerah-daerah pedesaan yang ternyata merupakan sumber tenaga kerja yang cukup besar. Pembukaan daerah-daerah yang masih jarang penduduknya di luar pulau Jawa di samping membangkitkan potensi-potensi ekonomi yang sangat luas juga akan menambah terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas. Oleh karena itu transmigrasi termasuk transmigrasi lokal harus digerakkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan secara terarah serta dikaitkan dengan kegiatan pembangunan daerah.

Di samping transmigrasi yang digerakkan oleh pemerintah maka transmigrasi spontan akan lebih terdorong dengan makin meluasnya pembangunan dan kegiatan ekonomi di luar Jawa.

Salah satu aspek dalam pembangunan ekonomi adalah penggunaan tanah, sebab itu demi peningkatan efisiensinya perlu diadakan perencanaan penggunaan tanah (*land use planning*).

Di bidang pertanian dipelihara kelangsungan peningkatan produksi beras yang telah dicapai dalam Pelita I, dengan tujuan mencukupi kebutuhan pangan serta menjamin meratanya penyebaran kepada masyarakat pada tingkat yang menguntungkan petani produsen dan tidak memberatkan konsumen. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, maka selain pangan, maka juga diperhatikan pembangunan perumahan rakyat.

Di samping itu juga diusahakan pengolahan untuk meningkatkan ketrampilan rakyat dalam teknik pembangunan dan pemugaran perumahan di lingkungan desa, agar makin banyak rakyat yang mendiami rumah yang sehat dalam lingkungan yang sehat pula. Agar pembangunan daerah lebih serasi maka diusahakan keselarasan

antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.

Hal ini juga dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan nasional yang menjaga keserasian pertumbuhan antara daerah, antara lain dengan jalan memberikan bantuan dan rangsangan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang relatif terbelakang. Prakarsa dan partisipasi aktif dari daerah diperlukan dalam peningkatan pembangunan. Maka di samping pungutan yang intensif terhadap sumber yang ada juga digali sumber keuangan baru. Dalam rangka ini perlu diusahakan peningkatan kemampuan serta perbaikan aparatur pemerintah daerah. Pelaksanaan Keluarga Berencana terutama di Jawa dan Bali ditingkatkan agar dapat mencapai masyarakat pedesaan.

c. GBHN, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978

Pelita III meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju Swasembada pangan meningkatkan industri yang mengolah bahan-bahan baku menjadi barang jadi. Pembangunan bidang politik, sosial, budaya dan lain-lain akan ditingkatkan sepadan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan bidang ekonomi. Selain usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja juga perlu dilanjutkan dan diperluas program bantuan pembangunan dan proyek padat karya di daerah pedesaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, maka koperasi diberi ruang gerak yang lebih luas. BUUD/KUD dan koperasi primer lain dimantapkan sehingga peranan koperasi dalam meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat akan semakin besar. Pendidikan politik rakyat ditingkatkan, agar makin sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Komunikasi sosial timbal-balik rakyat maupun pemerintah juga ditingkatkan.

Organisasi-organisasi profesi/fungsional/masyarakat dimantapkan agar makin besar peranannya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan juga disempurnakan.

Pemerintahan desa diperkuat agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif. Untuk itu perlu disusun Undang-undang tentang pemerintahan desa.

Dari uraian-uraian di atas, maka jelaslah bahwa di dalam GBHN yang merupakan Pola Umum Pembangunan dan penjabarannya di dalam Pelita I, II dan III hingga dewasa ini, pembangunan masyarakat pedesaan itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Jangkauan Pelita terhadap desa itu makin mantap dan makin luas, sehingga masyarakat pedesaan itu terangsang untuk berpartisipasi secara aktif di dalam pembangunan itu. Bahkan selanjutnya desa itu dirangsang untuk mampu melaksanakan dan membiayai sendiri pembangunan-pembangunan di desanya masing-masing.

Di dalam pelaksanaannya mengenai pembangunan desa, maka sumber pembiayaannya berasal dari dua arah : dari pemerintah dan dari swadaya desa itu sendiri. Sumber dana dari pemerintah itu dapat diperinci antara lain dari : APBN, APBD Tk. I dan ada pula dari Inpres, Banpres dan pembiayaannya dari Departemen-departemen lain yang melaksanakan kegiatan di desa secara sendiri-sendiri maupun kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri.

Kegiatan-kegiatan itu antara lain : pendirian SD Inpres, perbaikan jalan dari Departemen PUTL, perbaikan jembatan, listrik masuk desa, koran masuk desa, Kejar Paket A, PKK, Hansip/Wanra dan lain-lain.

## B. PELAKSANAANNYA

Seperti kita ketahui bahwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda, untuk pemerintah desa terdapat dua buah peraturan, yaitu IGO (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie*) Stb. 1906 Nomor 83, yang berlaku untuk Jawa dan Madura, dan IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*) Stb. 1938 Nomor 490 jo Stb. 1938 Nomor 681 yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura.

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur Pemerintahan Desa secara seragam, sehingga kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis dan kurang dapat memenuhi tuntutan perkembangan seperti yang kita harapkan. Di dalam perkembangan sejarah Tata Negara Republik Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dewasa ini, maka peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemerintahan desa ataupun pemerintahan pada umumnya tercantum di dalam UUD 1945 Bab VI pasal 18 tentang

pembagian daerah Indonesia.

Kemudian berdasarkan Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut".

Peraturan ini pun tidak mengatur pemerintah desa secara seragam, karena hanya mengesahkan desa-desa yang telah ada sebelumnya sebagai kesatuan-kesatuan hukum adat, baik yang bersifat teritorial maupun genealogis, sehingga akibatnya dalam perkembangan selanjutnya terjadilah desa-desa yang beraneka ragam bentuk dan coraknya, masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri.

Pada tahun 1965 dikeluarkan undang-undang Nomor 19 tentang Desapraja. Tetapi peraturan ini dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 1966, ditangguhkan pelaksanaannya, sehingga secara informal kita masih berlandaskan peraturan-peraturan yang bersumber kepada IGOB 83 tahun 1906 untuk Jawa dan Madura dan IGOB S. 490 tahun 1938 untuk Luar Jawa. Kedua peraturan ini berfungsi sebagai constateringswet dalam arti melegalisir adat kebiasaan tata kehidupan soaial maupun pemerintahan rakyat (hukum adat).

Dengan kata lain peraturan itu hanya mengesahkan atau memperkuat adat kebiasaan dalam sistem feodal yang merupakan hukum adat yang telah berabad-abad hidup di kalangan masyarakat atau suku-suku bangsa di Indonesia.

Memang IGO/IGOB itu digerakkan oleh pemerintah kolonial dalam usaha agar rakyat Indonesia tetap terkungkung oleh adat dan tidak terjamah oleh alam kemajuan. Maka kalau diterapkan dalam situasi dan kondisi sekarang ini, timbullah peristiwa-peristiwa yang saling bertentangan, akibatnya timbullah peraturan-peraturan dari daerah Tk. I dan II untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan seperti termuat dalam ketentuan peralihan dalam pasal UUD 1945.

Undang-undang nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Di dalam

rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945 maka MPRS bersama-sama dengan pemerintah pada tahun 1968 berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 meninjau kembali produk legislatif yang berbentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang memuat materi yang bertentangan dengan UUD 1945. Maka MPRS dan Pemerintah telah berhasil mengeluarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1969 tentang tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Di dalam Ketetapan itu termuat juga mengenai Undang-Undang No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja, yang dinyatakan tidak berlaku, tetapi tidak berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan ditetapkan pada saat Undang-Undang yang menggantikannya mulai berlaku. Di dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja itu merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dan peraturan itu telah dicabut dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974.

Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah hanya mengatur Desa dari segi pemerintahannya. Adanya kesatuan-kesatuan masyarakat termasuk kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional masih tetap diakui oleh Undang-Undang tersebut. Di dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan tetap otonomi daerah masih bisa mengalami perkembangan ke samping, ke atas dan ke bawah sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 itu belum menunjukkan secara jelas mengenai "Desa" sebagai daerah yang lebih kecil. Undang-Undang itu juga merupakan suatu Undang-Undang yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Mengenai otonomi daerah selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ditegaskan bahwa :

- a. Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.



- b. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka titik berat otonomi daerah pada Daerah Tingkat II yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat.
- c. Otonomi itu berprinsip pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, artinya kalau daerah otonomi itu setelah dibina, dibimbing dan diberi kesempatan seluas-luasnya ternyata tidak mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka otonomi itu dapat dihapus. Daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang itu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang mengarah kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yang paling tepat adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, yaitu jika ditinjau dari segi kepentingan Nasional terutama dari segi daya guna dan hasilnya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Daerah. Karena ditinjau dari teknis dan pertimbangan sumber-sumber keuangan seperti pajak, retribusi dan lain-lain termasuk pembentukan aparat dan ketatalaksanaan pembangunan, pembentukan otonomi daerah sampai ke tingkat di bawah Daerah Tingkat II dapat mengurangi kelancaran pembangunan.

Daerah di bawah Daerah Tingkat II sebaiknya hanya sebagai pelaksana di bidang pembangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa adalah merupakan langkah yang sangat positif bagi pemerintah dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan administrasi Desa. Isi pokok dari Undang-Undang itu adalah menuju pada penyeragaman bentuk dan susunan Pemerintahan Desa dengan corak Nasional berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 itu disertai dengan penjelasan atas Undang-Undang tersebut dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1980 tentang Pembinaan Kesejahtera-

an Keluarga. Pada pokoknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 mengenal adanya dua jenis istilah mengenai desa yaitu : desa atau kelurahan.

Desa sesuai dengan isi Pasal 1 Ayat a pada Undang-Undang itu adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

Kelurahan adalah sejenis desa itu tetapi terbentuk di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif dan Kota-kota lainnya. Kelurahan itu tidak memiliki hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 itu tidaklah sama dengan hal otonomi menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, tetapi prinsip pengembangan otonomi tetap dimungkinkan sesuai kondisi politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan Nasional.

Di dalam pelaksanaan dan perkembangannya maka dimungkinkan pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa dan kelurahan berdasarkan peraturan dan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk. Hal itu adalah dengan maksud agar Desa dan Kelurahan itu mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, termasuk pembangunan. Selanjutnya mengenai pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa dan Kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Daerah yang bersangkutan dipandang lebih mengetahui fakta dan keadaan Desa dan Kelurahan di daerah. Di dalam pelaksanaan pemerintahan Desa dan Kelurahan dibantu oleh perangkat Desa dan perangkat Kelurahan. Kepala Desa dan Kepala Kelurahan mengemban tugas dan kewajiban penyelenggaraan dan tanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

Selain tugas-tugas itu maka Kepala Desa dan Kepala Kelurahan juga mengemban tugas untuk membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan ke-

keluargaan. Di dalam tugas itu Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dibantu oleh Lembaga Sosial Desa.

Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dikenakan syarat pendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman sederajat dengan itu. Adanya Lembaga Musyawarah Desa adalah merupakan wadah dan penyalur pendapat masyarakat di desa untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam pemerintahan Desa. Lembaga itu merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan pemuka-pemuka masyarakat di desa dalam mengambil bagian terhadap pembangunan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tersebut.

Mengenai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dapat diterangkan bahwa Pemerintahn Desa terdiri atas : Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Sedang perangkat Desa adalah : Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Dusun.

Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa antara lain :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mah Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya.
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan.
- g. Terdaftar sebagai penduduk Desa itu sekurang-kurangnya dua tahun terakhir dan tidak terputus-putus.
- h. Umur 25 tahun, setinggi-tingginya 60 tahun.
- i. Sehat rohani dan jasmani.
- j. Berijazah serendah-rendahnya SLP atau pengetahuan/pengalaman yang sederajat.

Kepala Desa dipilih langsung, umum, bebas dan rahasia dan diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan masa jabatan delapan tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Selanjutnya dibicarakan mengenai sumpah/janji yang harus diucapkan Kepala Desa sebelum memangku jabatan, syarat-syarat

berhenti atau diberhentikan sebagai Kepala Desa, hak wewenang dan Kewajiban Kepala Desa, juga terhadap Lembaga Musyawarah Desa.

Sekretaris Desa terdiri dari : Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan. Juga mengenai Kepala Dusun yang merupakan unsur pelaksanaan tugas Kepala Desa. Pada pasal 21 disebutkan bahwa Sumber Pendapatan Desa adalah :

- a. Pendapatan asli Desa itu sendiri antara lain :
  - hasil tanah Kas Desa;
  - hasil partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
  - hasil gotong royong masyarakat;
  - usaha desa yang lain.
- b. Pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah :
  - sumbangan dan bantuan Pemerintah;
  - Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah;
  - sebagian pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada desa.
- c. Pendapatan lain yang sah.

Kepala Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota Madya Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/KDH Tingkat I dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentang kepegawaian.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980, isinya selain merupakan instruksi kepada para Gubernur untuk memberikan penjelasan isi Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 kepada Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Walikota dan para Camat, juga ditegaskan tentang isi Undang-Undang tersebut. Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1980 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kedua instruksi itu adalah bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan penyempurnaan aparatur pemerintah di Desa serta institusi masyarakat pedesaan dalam bidang sosial ekonomi. Pada umumnya di desa atau Kelurahan telah berkembang kebiasaan masyarakat untuk mencapai sesuatu tujuan bersama yaitu gotong royong. Prof. Dr. Kuntjaraningrat di dalam bukunya *Mentalitet dan Pembangunan* membedakan antara gotong royong dan kerja bakti. Gotong royong itu adalah kerjasama masyarakat secara spontanitas tanpa ada yang menjadi pendamping di dalam kegiatan itu. Sedang kerja bakti adalah atas

inisiatif seseorang atau kelompok untuk mengorganisir kegiatan tersebut. Gotong royong itu memang masih hidup subur di desa-desa yang belum banyak mendapat pengaruh dari kota. Mungkin juga di kota sudah kurang efektif lagi untuk dikembangkan kegotongroyongan ini bila ditinjau dari segi mental masyarakat kota.

Di kota-kota maka organisasi masyarakat yang terhimpun di dalam Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW) dapat berkembang sesuai dinamika masyarakat kota, tetapi karena organisasi masyarakat ini kegiatannya tidak meliputi segala aspek di dalam masyarakat, maka dapat dikembangkan organisasi-organisasi lainnya seperti :

1. PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) yang sekarang sudah diintradisir secara Nasional di samping LSD. PKK itu seperti termuat di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1980 adalah bertujuan :
  - a. Meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan, terutama kegiatan yang ditujukan bagi terciptanya keluarga sejahtera, melalui jalan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
  - b. Membimbing dan mengarahkan kegiatan PKK guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin yang memungkinkan keluarga dapat mengembangkan kepribadian dan kemampuannya, sehingga dapat berperan secara optimal dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa dalam tata kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila.

Program pokok PKK itu meliputi :

- a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b) Gotong Royong;
- c) Sandang;
- d) Pangan;
- e) Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f) Pendidikan dan Ketrampilan;
- g) Kesehatan;
- h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i) Kelestarian lingkungan hidup;
- j) Perencanaan sehat.

Di tingkat desa PKK itu dibiayai dengan :  
Swadaya masyarakat;  
APBN dan APBD;

Bantuan lain yang syah dan tidak mengikat :

2. Organisasi Hansip dan Warna.
3. Koperasi Tani, Pengairan sawah.
4. Organisasi Kesenian, Olah raga, Rukun Kematian, arisan lain-lain.

### C. HASIL PELAKSANAAN

#### 1. Pemerintahan Desa

Menurut Buku I Bab IV Repelita desa diartikan sebagai daerah administratif terkecil yang berhak dan mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri. Maka secara formal, desa meliputi pengertian : wilayah, masyarakat dan pemerintahan. Kepala desa merupakan pimpinan formal yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan ketataprajaan maupun kemasyarakatan. Di samping itu masih ada pemimpin-pemimpin informal yang juga berpengaruh di dalam sikap mental dan tanggapan sosial ekonomis serta kebudayaan masyarakat. Mereka itu antara lain : tua-tua desa, pimpinan paguyuban agama, guru, dukun atau pawang, masih memiliki fungsi sosial sebagai ahli adat tradisional.

Karena pembangunan kita bertujuan untuk pembangunan pertanian yang menyangkut kehidupan masyarakat petani, maka pembangunan itu identik dengan pembangunan masyarakat pedesaan. Maka perlu diadakan suatu usaha agar pembangunan itu berhasil dengan meninjau faktor-faktor penunjang dan penghambatnya.

Pada dewasa ini masyarakat kita dalam masa transisi. Hal ini disebabkan oleh adanya dua corak masyarakat, yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa. Masyarakat yang mudah terkena pengaruh Barat yang bersistem model Barat yang maju berbaur dengan sistem sosial model pribumi. Hal ini dapat berakibat kerugian bagi golongan populasi yang berpenghasilan rendah di kota maupun di desa. Keadaan itu perlu diperhatikan karena di desa bisa berpengaruh pada usaha untuk mendinamisir masyarakat ke arah partisipasi mereka di dalam pembangunan.

Perbaikan Pemerintah Desa juga bertujuan memperbaiki mental

masyarakat dalam usaha menanamkan kepribadian masyarakat ke arah pembangunan. Perbaikan itu merupakan proses perkembangan terarah yang menyangkut anggota masyarakat secara individual maupun pengaruh dari ekstern. Secara pribadi adalah berupa kesadaran pribadi karena pendidikan. Pengaruh ekstern berupa program formal pemerintah, tetapi dapat juga berupa partisipasi warga masyarakat, misalnya mengenai pelestarian jiwa/sikap gotong royong yang dikaitkan dengan pembangunan. Pengembangan Sila kedua dari Pancasila di dalam keramah tamahan untuk mengembangkan lembaga sosial yang memberi bantuan/pertolongan bagi yang memerlukan.

Transmigrasi adalah suatu kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan. Kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan *ratio* tanah dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Lampung merupakan daerah transmigrasi juga dalam rangka kegiatan pemerintah ini. Tetapi sekarang daerah Propinsi Lampung merupakan daerah tertutup untuk transmigrasi. Kecuali transmigrasi spontan yang setiap harinya dengan mudah menyeberang dari Jawa ke Lampung.

Selain itu transmigrasi juga bertujuan menaikkan produksi pangan dan bahan-bahan pokok lainnya. Usaha ke arah ini direalisasikan dalam Panca Usaha yaitu antara lain :

- a. penggunaan pupuk penyubur tanah.
- b. penggunaan obat pemberantas hama.
- c. penggunaan bibit unggul.
- d. perbaikan sistem irigasi.
- e. bekerja menurut prinsip teknologi maju, dan lain-lainnya.

Untuk keberhasilan usaha tersebut, maka pola kebijaksanaan dilembagakan dalam bentuk kebijaksanaan pelaksanaan melalui sistem Bimas dan Inmas, yang ketentuannya dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian, karena pelaksanaannya melibatkan instansi pusat dan daerah. Untuk melengkapi bantuan tersebut, maka disalurkan juga bantuan tenaga ahli melalui Program Bimas/Inmas. Selain itu ditetapkan juga bantuan melalui TKS Butsi (Tenaga Kerja Sukarela, Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia), sebagai pelaksanaan program dari Departemen Tenaga Kerja dan Koperasi. Tugas TKB Butsi selain mendorong mengatasi masalah-masalah desa juga mem-

beri bimbingan dalam hal :

- a. Pertimbangan dan pelaksanaan pemerintah Desa.
- b. Mengelola usaha tani dengan teknik management usaha tani.
- c. Menggerakkan gotong royong dalam masalah mengatasi air bersih, sekolah, kesehatan lingkungan.

Bantuan lain adalah berupa :

- a. Bantuan barang-barang modal berupa : bibit unggul, pupuk obat pemberantas hama, peralatan usaha tani, peralatan processing produksi usaha tani.
- b. Kredit usaha tani, kredit Bimas melalui Badan Kredit Desa dan Kredit Usaha Tani Perorangan.

Penyaluran dan pelaksanaannya melalui KUD/BUUD (Koperasi Unit Desa/Badan Usaha Unit Desa) dan BRI setempat. Bantuan Pemerintah yang bersifat menunjang usaha-usaha di atas dituangkan dalam program-program yang dilaksanakan secara teknis dan konsesional. Agar program itu mendapatkan landasan yang kuat, maka diwujudkan dalam Instruksi Presiden. Inpres itu menetapkan anggaran yang bersangkutan dengan pembangunan desa, yaitu berupa :

- a) Inpres Bantuan Pembangunan Desa.
- b) Inpres Pembangunan Sekolah Dasar.
- c) Inpres Puskesmas.
- d) Inpres Peningkatan Pendidikan Pesantren.
- e) Inpres Bimas/Inmas/Panca Usaha dan lain-lain.

Maka dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan Pemerintahan Desa, diharapkan memberikan dorongan dan rangsangan agar masyarakat Desa dapat lebih berperan aktif di dalam pembangunan dan dapat lebih mengembangkan dirinya untuk ber-swastambada. Bimbingan dan rangsangan itu dapat melalui organisasi-organisasi di desa yang bersifat tradisional maupun yang bersifat non tradisional agar lebih berkembang. Organisasi tradisional itu antara lain : organisasi suku atau marga, organisasi yang bersifat gotong royong, sinoman, kematian, produksi, lumbung desa.

Organisasi yang bersifat non tradisional yaitu :

- a. yang bersifat sosial : LSD, PMD, PKK, Pendidikan masyarakat.



- b. ekonomi : koperasi, BUUD, KUD.
- c. produksi : penghijauan, padat karya, Bimas/Inmas.
- d. pengairan : pompa, pengairan.
- e. keamanan : hansip, wanra dan ronda.
- f. kependudukan : keluarga berencana.
- g. kesehatan : BKIA, kesehatan masyarakat.
- h. pendidikan : POM, kursus ketrampilan.
- i. olah raga : pencak silat, badminton.
- j. seni budaya : keroncong, wayang orang dan drama.

Suatu usaha pemerintah dalam menata kembali penduduk adalah *resettlement*. Di Lampung usaha ini adalah dalam rangka memfungsikan kembali hutan lindung dan daerah aliran sungai, agar debit air sungai dan bendungan terjamin. Dasar dari *resettlement* itu adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1972.

Sebenarnya isinya adalah mengenai pengembalian warga masyarakat dari daerah terisolir yang berstatus pradesa ke arah mata pencaharian yang tetap dan sedentair (memetap) atau stationer tempat tinggalnya. Seperti dikatakan di depan bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, stimulasi, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan masyarakat desa memberikan partisipasinya (swadaya gotong royong) berupa tenaga, uang, bahan dan lain-lainnya.

Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk pembangunan desa itu di Propinsi Lampung bersumber dari APBN, APBD Tk.I dan Inpres. Selain dana Proyek itu ada juga anggaran rutin untuk pendukung kegiatan administrasi. Dana pada tahun anggaran 1980/1981 untuk Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung adalah :

- 1) Dari APBN sebesar Rp. 418.965.000,— meliputi tujuh buah proyek :
  - a. Proyek Pemukiman Kembali Penduduk Rp. 360.420.000,-  
(*resettlement* desa)
  - b. Proyek Pemugaran Perumahan dan       Rp. 25.307.000,-  
Lingkungan Desa
  - c. Proyek Pembinaan Unit Daerah Kerja   Rp. 8.500.000,-

(Pembangunan UDKP)

- |  |     |              |
|--|-----|--------------|
| d. Proyek Pembinaan LSD                        | Rp. | 17.616.000,- |
| e. Proyek Pembinaan Bantuan Desa               | Rp. | 3.870.000,-  |
| f. Proyek Monitoring Tingkat Perkembangan Desa | Rp. | 2.617.000,-  |
| g. Proyek Pembinaan Perekonomian Desa          | Rp. | 635.000,-    |
- 2) Dana dari Inpres Desa sebesar Rp. 1.148.950.000,- terdiri dari :
- |   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| a. Bantuan langsung 1.484 desa @ Rp. 750.000,-  | Rp. | 1.113.000.000,- |
| b. Bantuan Keresasian untuk empat Kecamatan   | Rp. | 18.000.000,-    |
| c. Hadiah Juara Lomba Desa  | Rp. | 8.850.000,-     |
| d. Bantuan Pembinaan Administrasi Tingkat Kecamatan, (@ Rp. 130.000,- untuk 70 buah Kecamatan). | Rp. | 9.100.000,-     |
- 3) Dana dari APBD Tingkat I meliputi 9 buah proyek Rp. 76.029.000,- terdiri atas :
- |  |     |              |
|--|-----|--------------|
| a. Proyek Pembinaan Unit Desa Daerah Kerja Pembangunan | Rp. | 4.051.000,-  |
| b. Proyek Pelistrikan Desa                             | Rp. | 17.000.000,- |
| c. Proyek Pembinaan LSD                                | Rp. | 7.925.000,-  |
| d. Proyek Latihan Pembangunan Desa                     | Rp. | 9.374.000,-  |

e.	Proyek Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 10.000.000,-
f.	Proyek Perlombaan Desa	Rp. 6.287.000,-
g.	Proyek Monitoring Tingkat Perkembangan Desa	Rp. 3.642.000,-
h.	Proyek Pembinaan Bantuan Desa	Rp. 2.000.000,-
i.	Proyek Sarana Mobilitas	Rp. 15.750.000,-

Jumlah seluruh dana untuk pembangunan Desa dari APBN, Inpres dan APBD Tingkat I = Rp. 1.643.944.000,-. Selain itu untuk Proyek Pemukiman Kembali Penduduk (*resettlement desa*) mendapat dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp. 1.373.850.000,-. Adapun hasil yang telah dicapai, ialah :

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berdasarkan :

- a. Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1980
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 225 tahun 1980
- d. Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor: Ist/011/DPD/HK/1980 dan No. Ist/022/BD/1980, maka kegiatan-kegiatan LKMD adalah :
  - a) Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD selesai 100%.
  - b) Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja selesai 100%.
  - c) Telah dikursus 240 orang Pengurus LKMD.
  - d) Telah dikursus 210 orang Pengurus PKK
  - e) Pemberian bantuan kepada 10 Kecamatan berupa 1.500 zak semen.

Di dalam rangka mensukseskan Pemilu Tahun 1982 dilaksanakan kegiatan-kegiatan :

- a. Mempertinggi kualitas Kader-kader Pembangunan meyakini kebenaran Falsafah Pancasila dan UUD 1945.
- b. Meningkatkan penyuluhan :
  - Komunikasi langsung antar kader yang dilatih Warga ling-

- kungan, bersifat kekeluargaan.
- Komunikasi langsung melalui ceramah atau musyawarah dalam pertemuan kelompok, arisan, pengajian, di langgar/mesjid, ibu-ibu PKK, KB, generasi lainnya, LKMD tingkat Desa dan Kecamatan.
  - c. Memanfaatkan media kesenian di Desa : wayang, lawak, sandiwara, ketoprak.
  - d. Membentuk/mengefektifkan pendengar Siaran Pedesaan.
  - e. Menyebarkan/pamflet, booklet, poster mengenai Kegiatan Pembangunan Desa.

Tingkat perkembangan LKMD/LSD berdasar kategori I, II dan III.

No.	Dati II	Tingkat Perkembangan LKMD			Jumlah
		Katag I	Katag II	Katag III	
1	2	3	4	5	6
1.	Kodya Tjk. — Tlb.	—	11	19	30
2.	Kab. Lamp. Selatan	1	209	362	572
3.	Kab. Lamp. Tengah	2	270	168	440
4.	Kab. Lamp. Utara	10	287	158	455
J u m l a h		13	777	707	1.497

## 2. Bantuan Desa

Berdasar keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Ekuin/Ketua Bappenas tanggal 17 April 1980 No. 79/1980, No. 243a/KMK/03/1980, No. 1115/K/4/1980 tentang penetapan jumlah bantuan Desa tahun 1980/1981 untuk daerah Lampung mendapat alokasi sebesar Rp. 1.148.950.000,—. Dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 1980 bantuan tersebut diperinci sebagai berikut :

1. Untuk bantuan 1484 desa @ Rp. 750.000,-  
= Rp. 1.113.000.000,-
2. Bantuan keserasian (Paket Proyek) UDKP  
4 Kecamatan @ Rp. 4.500.000,- = Rp. 18.000.000,-
3. Hadiah juara lomba desa = Rp. 8.850.000,-
4. Bantuan pembinaan administrasi 70 Ke-  
camatan @ Rp. 130.000,- = Rp. 9.100.000,-

Berdasarkan surat keputusan Gubernur TK. I Lampung tanggal 21 Mei 1980 No. G. 105/DPD/HK/80 telah dialokasikan ke-4 Dati II sesuai dengan jumlah desa masing-masing.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Desa Tahun 1980/1981 untuk setiap desa sebesar Rp. 750.000,- untuk membangun :

prasarana produksi  
prasarana perhubungan  
prasarana pemasaran  
prasarana sosial.

Perencanaan dilaksanakan oleh LKMD melalui musyawarah hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam berita acara yang kemudian disusun DURP Proyek Bantuan Desa untuk diajukan kepada Bupati/Walikotamadya Kdh. Tk. II melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Dari 1484 desa telah disahkan sebanyak 1451 desa dan sisanya 33 desa (2,22%) sampai bulan Pebruari 1981.

Paket Proyek UDKP untuk Propinsi Lampung sebesar Rp. 18.000.000,- telah disahkan seluruhnya oleh Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung juga hadiah untuk Lomba Desa telah disahkan seluruhnya oleh Bupati/Walikotamadya Kdh. Tk. II.

Penyaluran bantuan ke Desa itu dapat dilihat pada daftar di halaman berikut ini. (dalam ribuan).

Dana bantuan desa Rp. 1.113.000.000,- telah disahkan 1.451 desa dengan dana Rp. 1.986.297.045,- yaitu bantuan langsung Rp. 1.088.255.000,-, Swadaya masyarakat Rp. 898.047.045,-.

No.	Macam bantuan	Dana	Tersalur	Sisa	%
1.	Bantuan Langsung	1.113.000	1.035.000	78.000	7,01
2.	Paket Proyek UDKP	18.000	9.000	9.000	50
3.	Hadiah Lomba Desa	8.850	8.850		100
4.	Biaya Adm. Kec.	9.100	5.190	3.910	42,9
	Jumlah	1.148.950	1.058.040	90.910	7,91

Direncanakan akan dibangun proyek-proyek :

Prasarana produksi	91 buah
Prasarana perhubungan	968 buah
Prasarana pemasaran	226 buah
Prasarana sosial	<u>1.347 buah</u>
Jumlah	2.632 buah

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan proyek itu adalah : Menurut pengalaman dari tahun 1978 sampai saat ini pelaksanaan bantuan desa selalu mengalami hambatan dalam hal : perencanaan, penyaluran dan laporan. Hal ini disebabkan oleh karena kepala desa baru mengalami peremajaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1978 dan Kepengurusan LKMD yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 225/1980.

Saran untuk mengatasi hambatan itu adalah penataran harus diberikan kepada pelaksana-pelaksana proyek itu antara lain Kepala Desa, LKMD, PKK.

Di dalam Pelita I disebutkan bahwa bantuan sebesar Rp. 100.000,- bagi setiap desa belum dapat merata ke semua desa. Bantuan adalah berupa perangsang agar desa itu berusaha untuk menyerahkan tenaga dan potensi yang ada untuk membangun desa dengan bahan-bahan yang tidak tersedia di desa tersebut misalnya semen, batu, pasir, kayu dan lain-lain. Dari data yang tertera di bawah ini dapat diketahui jumlah desa dan besarnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka Pelita di Propinsi Lampung.

### PELITA I

Tahun	1969/1970	besarnya	bantuan	Rp. 100.000,-	jumlah	desa	1.089
Tahun	1970/1971	besarnya	bantuan	Rp. 100.000,-	jumlah	desa	1.140
Tahun	1971/1972	besarnya	bantuan	Rp. 100.000,-	jumlah	desa	1.140
Tahun	1972/1973	besarnya	bantuan	Rp. 100.000,-	jumlah	desa	1.140
Tahun	1973/1974	besarnya	bantuan	Rp. 100.000,-	jumlah	desa	1.140

### PELITA II

Tahun	1974/1975	besarnya	bantuan	Rp. 200.000,-	jumlah	desa	1.140
Tahun	1975/1976	besarnya	bantuan	Rp. 200.000,-	jumlah	desa	1.140
Tahun	1976/1977	besarnya	bantuan	Rp. 300.000,-	jumlah	desa	1.429
Tahun	1977/1978	besarnya	bantuan	Rp. 350.000,-	jumlah	desa	1.484
Tahun	1978/1979	besarnya	bantuan	Rp. 350.000,-	jumlah	desa	1.484

### PELITA III

Tahun	1979/1980	besarnya	bantuan	Rp. 450.000,-	jumlah	desa	1.484
Tahun	1980/1981	besarnya	bantuan	Rp. 750.000,-	jumlah	desa	1.484
Tahun	1981/1982	besarnya	bantuan	Rp. 1.000.000,-	jumlah	desa	1.497

Peningkatan besarnya bantuan setiap desa dan peningkatan jumlah desa yang mendapat bantuan itu ternyata memang benar-benar merangsang peningkatan status desa itu di dalam perkembangannya. Penggunaan dana bantuan desa itu diarahkan kepada usaha untuk membangun empat jenis prasarana desa antara lain :

- Prasarana Produksi
- Prasarana Perhubungan
- Prasarana Pemasaran
- Prasarana Sosial.

Pada pelaksanaannya, maka pada tahap pertama desa itu mulai membangun prasarana produksi, dan kalau prasarana pertama itu telah terpenuhi barulah dilanjutkan pembangunan prasarana kedua dan seterusnya.

Seperti telah dikemukakan di dalam GBHN maka bantuan terhadap desa itu pada pokoknya adalah :

- a. Menggerakkan swadaya masyarakat, karena pada dasarnya pembangunan desa itu adalah oleh desa itu sendiri. Pemerintah hanya memberikan bantuan, bimbingan, pembinaan dan pengarahan dalam penggunaan dan penggalian potensi di desa itu

- yang berupa tenaga, sarana dan dana.
- b. Selain itu juga bertujuan untuk menyerap tenaga di desa itu sendiri. Sebagai contoh adanya perluasan sawah tentu akan dapat menampung tenaga-tenaga petani.
  - c. Bantuan juga bertujuan menambah kemampuan desa itu dalam soal pengelolaan fisik dan lain-lainnya.

Di bagian depan telah dijelaskan bahwa subyek pelaksana pembangunan itu adalah desa itu sendiri. Dengan bantuan dan bimbingan pemerintah, maka dirangsanglah desa itu untuk berkarya dan berpartisipasi, sehingga kemampuan fisik desa itu ditingkatkan, dan sekaligus juga meningkatkan status desa dari desa yang kurang mampu membiayai diri sendiri, dengan bimbingan pemerintah perkembangan dapat dikelola sesuai dengan tuntutan teknologi dan pengetahuan dewasa ini. Misalnya dalam hal meningkatkan produksi secara intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Hal tersebut barulah merupakan salah satu keuntungan yang diperoleh dari adanya bantuan desa itu. Sebab perbaikan prasarana pada satu segi akan berpengaruh pada kemajuan segi lainnya. Misalnya dengan perbaikan prasarana produksi, maka hasil produksi menjadi melimpah, sehingga perlu dipasarkan. Dengan adanya transportasi yang baik produksi itu mudah dipasarkan. Dengan sendirinya pendapatan penduduk meningkat. Dan hal ini akan berpengaruh pula pada segi kehidupan mereka : kesehatan, pendidikan, peribadatan dan lain-lain.

Di bawah ini perlu diuraikan secara sepintas lalu mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan desa itu. Pada tingkat pusat pelaksanaan bantuan itu berupa Instruksi Presiden kepada tiga Menteri yaitu : Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Ekuin. Di dalam Inpres itu ditetapkan jumlah bantuan desa yang diberikan/dialokasikan kepada setiap Propinsi. Kemudian disusul dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang berupa petunjuk pelaksanaan (juklak) penggunaan desa tersebut. Surat Keputusan Otorisasi dari masing-masing Propinsi penyaluran dananya disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi tersebut maka Gubernur memberikan alokasi dana pada masing-masing daerah Tingkat II dan selanjutnya langkah itu dilanjutkan sampai ke Kecamatan untuk desa-desa yang bersangkutan. Karena dana itu telah diketahui bahwa



dialokasikan pada tahun anggaran yang akan datang, maka desa diminta telah membuat perencanaan penggunaan dana itu sesuai dengan pengarahannya dan bimbingan yang telah diberikan. Penetapan alokasi dana bagi setiap desa ditentukan dengan Surat Keputusan dari Bupati atau Walikota realisasinya diwujudkan berupa DIP yang pengalokasian dananya melalui Bank Rakyat Indonesia.

Kemudian dengan upacara pada tiap Kecamatan, kecuali untuk Kotamadya dipusatkan di Ibukota Kotamadya, dengan disaksikan oleh Bupati atau Walikota diserahkan DIP itu kepada desa masing-masing. Laporan pelaksanaan proyek itu adalah kepada Bupati atau Walikota dalam hal ini di Daerah Tingkat II dikelola oleh Kantor Pembangunan Desa. Bahwa bantuan desa itu sangat bermanfaat bagi desa itu sendiri dan juga telah mengembangkan masyarakat sekitarnya telah disebut di depan. (bahan dari PMD Dati I Propinsi Lampung).

Pengaruh Pelita di dalam kenaikan pendapatan penduduk dapat dilihat dari daftar di bawah ini.

Pendapatan Regional Daerah Lampung dan angka-angka per kapita tahun 1969 – 1974 :

1. Pendapatan Regional per kapita (rupiah) atas dasar harga yang berlaku tahun 1969 dan 1971 :
 

1969	1970	1971	1972	1973	1974
20.022,0	22.581,0	25.166,7	33.588,6	46.436,4	57.463,6
2. Pendapatan Regional per kapita (rupiah) atas dasar harga konstan 1969 dan 1971
 

1969	1970	1971	1972	1973	1974
20.002,0	20.863,0	25.166,7	27.431,4	28.389,9	28.531,3
3. Pendapatan Regional per kapita (rupiah) atas dasar harga yang berlaku tahun 1975
 

1975	1976	1977	1978	1979	1980
68.182,7	87.199,8	103.623,5	115.458,8	149.334,9	177.404,0
4. Pendapatan Regional per kapita (rupiah) atas dasar harga konstan tahun 1975
 

1975	1976	1977	1978	1979	1980
68.182,7	68.506,0	69.981,4	74.55,3	74.969,3	75.731,5

(Data dari Kantor Statistik Tingkat I Propinsi Lampung).

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka dapat diperhitungkan bahwa terdapat kenaikan pendapatan regional per kapita dalam Pelita I, Pelita II dan Pelita III. Kenaikan tersebut pada Pelita I dapat diperhitungkan sebagai berikut :

$$\text{Dari tahun 1969} - 1970 = 2.579,0 = 12,89\%$$

$$\text{Dari tahun 1970} - 1971 = 2.585,7 = 11,45\%$$

$$\text{Dari tahun 1971} - 1972 = 8.421,9 = 33,46\%$$

$$\text{Dari tahun 1972} - 1973 = 12.847,8 = 38,25\%$$

$$\text{Dari tahun 1973} - 1974 = 11.927,2 = 33,74\%$$

$$\text{Jadi dalam Pelita I} = 38.361,6 = 119,79\% \text{ kenaikan.}$$

Maka kenaikan rata-rata pendapatan per kapitan atas dasar harga yang berlaku dengan dasar tahun 1969 dan 1971 adalah :

$$\frac{38.361,6}{5} = \underline{\underline{7.672}} \text{ atau } \frac{119,79}{5} \% = \underline{\underline{23,95\%}}$$

Sedang kenaikan pendapatan per kapita atas dasar harga konstan dengan dasar tahun 1969 dan tahun 1971 adalah sebagai berikut :

$$\text{Dari tahun 1969} - 1970 = 867 = 4,33\%$$

$$\text{Dari tahun 1970} - 1971 = 4.297,7 = 20,59\%$$

$$\text{Dari tahun 1971} - 1972 = 2.264,7 = 8,99\%$$

$$\text{Dari tahun 1972} - 1973 = 1.223,2 = 4,46\%$$

$$\text{Dari tahun 1973} - 1974 = 2,5 = 3,37\%$$

$$\text{Jadi kenaikannya adalah } 11.152,6 = 41,74\%$$

Maka kenaikan pendapatan per kapita rata-rata per tahun dalam Pelita I atas dasar harga konstan dengan dasar tahun 1969 adalah :

$$\frac{11.152,6}{5} = 2.231,5 \text{ atau } 8,34\%$$

Sedang kenaikan pendapatan pada Pelita II dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Kenaikan pendapatan per kapita rata-rata atas dasar harga yang berlaku dengan dasar tahun 1975 adalah sebagai berikut :

$$\text{Dari tahun 1975} - 1976 = 19.017,1 = 27,9\%$$

$$\text{Dari tahun 1976} - 1977 = 16.423,7 = 18,8\%$$

$$\text{Dari tahun 1977} - 1978 = 11.835,3 = 11,4\%$$

$$\text{Dari tahun 1978} - 1979 = 33.876,0 = 29,3\%$$

$$\text{Dari tahun 1979} - 1980 = 28.069,1 = 18,8\%$$

Jadi kenaikan itu dalam Pelita II  $109.221,2 = 106,2\%$  atau rata-rata :

$$\frac{109.221,2}{5} = 21.844,24 \text{ atau } \frac{106,2}{5} = \underline{\underline{21,24\%}}$$

Kenaikan pendapatan pada Pelita II per kapita atas dasar harga konstan tahun 1975 – 1980 dengan dasar tahun 1975 adalah sebagai berikut :

Dari tahun 1975 – 1975 = 323 = 0,47%

Dari tahun 1976 – 1977 = 1.475,5 = 2,15%

Dari tahun 1977 – 1978 = 4.573,9 = 6,54%

Dari tahun 1978 – 1979 = 1.414,0 = 1,90%

Dari tahun 1979 – 1980 = 762,2 = 1,00%

Maka kenaikan itu adalah :

$$\frac{8.548,5}{5} = 1.709,7 \text{ atau } \frac{12,06}{5} = \underline{\underline{2,41\%}}$$

*Catatan :* Data mengenai kenaikan pendapatan per kapita tahun 1975 – 1980 atas dasar data yang bersifat sementara, karena masih menunggu pengesahan dari Kantor Statistik Pusat di Jakarta.

Mengenai kegiatan Lomba Desa di Propinsi Lampung dilaksanakan sejak tahun 1971. Adapun tujuan lomba desa itu adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa dalam membangun desanya.
- b. Meningkatkan tingkat perkembangan desa dari desa swadaya, swakarya menuju desa swasembada.
- c. Sebagai alat koordinasi dan alat evaluasi serta alat pengendalian operasional dari berbagai Dinas Instansi dalam pembangunan desa.
- d. Alat pemberian stimulans/hadiah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Di Propinsi Lampung Lomba Desa itu dilaksanakan berdasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa No. SY18/3/46 tanggal 19 April 1976.

Di dalam perlombaan itu ternyata belum semua desa dapat ikut ser-

ta karena :

- a. Kondisi desa yang belum memungkinkan, sehingga belum sanggup berkompetisi dengan desa lain.
- b. Biaya yang cukup besar untuk pelaksanaan mengikuti lomba desa itu.

### 3. Tipologi dan Klasifikasi Desa

Di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, pada setiap tahun diadakan penelitian/survei potensi desa dari Desa Swadaya ke desa Swakarya meningkat ke desa Swasembada. Data klasifikasi tingkat perkembangan desa itu dari tahun 1969/1970 sampai tahun 1980/1981 adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah	Tingkat Perkembangan Desa		
			Swadaya	Swakarya	Swasembada
1.	1969/1970	1.092	902	190	—
2.	1970/1971	1.140	892	247	1
3.	1971/1972	1.249	968	275	6
4.	1972/1973	1.334	997	327	10
5.	1973/1974	1.382	942	400	40
6.	1974/1975	1.409	934	420	55
7.	1975/1976	1.446	673	693	80
8.	1976/1977	1.484	557	792	135
9.	1977/1978	1.484	436	852	191
10.	1978/1979	1.484	352	891	241
11.	1979/1980	1.488	312	918	258
12.	1980/1981	1.497	277	931	289

Faktor-faktor yang menyebabkan jumlah desa setiap tahun bertambah adalah :

- a. Penyerahan Desa Transmigrasi dari Instansi yang bersangkutan kepada Departemen Dalam Negeri c.q. Gubernur/KDH Tingkat I Propinsi Lampung.  
Jenis transmigrasi itu adalah : transmigrasi umum, transmigrasi sosial, transmigrasi Angkatan Darat, transmigrasi Angkatan

Udara, transmigrasi Angkatan Laut, transmigrasi Kepolisian.

- b. Pemekaran atau pemecahan Desa berhubungan dengan adanya pertambahan penduduk karena transmigrasi spontan. Suatu kenyataan adalah kelemahan desa dalam menyajikan data. Hal ini perlu diatasi dengan :
  - 1) Perlu ditingkatkan kemampuan ketrampilan Kepala Desa/Lurah.
  - 2) Urusan Pembangunan Desa di Kecamatan perlu ditambah menjadi minimal dua orang.
  - 3) Unifikasi cara penyajian data di desa.
  - 4) Juga unifikasi cara mendapatkan dana.

Selain itu ada juga masalah mengenai Desa Swasembada :

- a. Di antara satu dengan lain Desa Swasembada kondisi dan situasinya tidak sama.
- b. Sulit menilai desa dengan kriteria yang persis sama karena adanya faktor-faktor yang tidak sama tetapi sangat menentukan.
- c. Belum dihitung hasil per kapita.

#### 4. Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)

UDKP adalah suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara terpadu yang dilaksanakan oleh berbagai dinas/instansi di suatu Kecamatan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tata lingkungan hidup di pedesaan dalam rangka mencapai tingkat Swasembada. Pada Pelita III jumlah Kecamatan UDKP di Propinsi Lampung ada 32 buah yaitu :

Kodya Tanjungkarang — Telukbetung	= 1 buah
Kabupaten Lampung Utara	= 0 buah
Kabupaten Lampung Tengah	= 0 buah
Kabupaten Lampung Selatan	= 1 buah

Sampai tahun 1982 UDKP di Propinsi Lampung ada 700 buah terdiri dari :

Kodya Tanjungkarang — Telukbetung	= 7 buah
Kabupaten Lampung Utara	= 179 buah

Kabupaten Lampung Tengah	= 236 buah
Kabupaten Lampung Selatan	= 278 buah

Hambatan yang dialami UDKP antara lain :

- Ada Kecamatan yang daerahnya sangat luas, desanya terpecah sehingga komunikasi tidak lancar.
  - Belum terlaksana secara terpadu/terkoordinasi.
  - Belum terwujud skala prioritas di Kecamatan UDKP.
- Untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan persiapan yang lebih intensif.

#### 5. Pemukiman Kembali Penduduk (Resettlement)

Propinsi Lampung merupakan wilayah yang strategis ditinjau dari sudut geografis maupun pembangunan. Apalagi kalau ditinjau dari segi letaknya yang berada pada jalur perhubungan antara pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Kalau dilihat dari perkembangan penduduk maka penduduk Propinsi Lampung berkembang sangat pesat. Hal itu dapat dilihat dari data di bawah ini :

Tahun 1961 : 1.667.511 jiwa  
 Tahun 1971 : 2.777.085 jiwa  
 Tahun 1976 : 3.643.086 jiwa  
 Tahun 1980 : 4.622.247 jiwa.

Peningkatan penduduk per tahun 5,82%. Dari penduduk itu 80% berusaha di sektor pertanian dan tinggal di pedesaan. Areal hutan di Lampung 1.272.144 Ha terdiri dari hutan lindung seluas 314.858 ha. Hutan Suaka Alam 394.630 ha, hutan produksi termasuk HPH 502.606 ha. Jadi luas hutan seluruhnya 1.212.094 ha. Dari hutan seluas itu yang masih efektif hanya 19,32% sedang 51,94% telah dijadikan daerah pemukiman dan usaha pertanian. Setelah diinventarisir maka penduduk yang mendiami daerah kawasan hutan/*catchment area* : 43.347 Kepala Keluarga atau 170.903 jiwa. Mengingat bahwa fungsi hutan adalah berperan dalam peningkatan pembangunan di bidang pertanian (berfungsi sebagai hidrologis, irigasi), maka jika hutan dirusak, dihuni/dijadikan tempat pemukiman akan berakibat rusak dan kurang produktivitas penggunaan tanah, rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ancaman/bencana bagi ma-

syarakat. Berdasarkan pemikiran di atas perlu diambil tindakan untuk mengamankan daerah hutan dan daerah aliran sungai agar bebas dari penghunian penduduk.

Maka diadakan pemindahan penduduk/pemukiman kembali dari :

- a. daerah kawasan hutan.
- b. daerah yang terkena proyek strategis.
- c. daerah yang padat penduduknya, ke daerah-daerah yang telah direncanakan dan ditentukan sebagai tempat pemukiman baru.

Adapun target yang diharapkan pemukiman kembali penduduk selama Pelita III dengan prioritas penduduk yang bermukim di kawasan hutan lindung :

- |    |                 |   |                         |
|----|-----------------|---|-------------------------|
| a. | Tahun 1980/1981 | = | 5.000 kepala keluarga.  |
| b. | Tahun 1981/1982 | = | 10.000 kepala keluarga. |
| c. | Tahun 1982/1983 | = | 10.000 kepala keluarga  |
| d. | Tahun 1983/1984 | = | 10.000 kepala keluarga. |

---

Jumlah = 35.000 kepala keluarga.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/074/DPD/HK/1980 tanggal 26 April 1980 maka dicadangkan tanah di Kabupaten Lampung Utara seluas : 110.500 ha. Dari daerah itu yang telah ditempati 13.541 ha, yaitu di Kecamatan Sungai Utara 4.359 ha. Kepada para pemukim baru itu diberikan bantuan berupa bahan-bahan perumahan, pangan, alat pertanian, bibit pertanian dan bantuan kesehatan. Pembiayaan selain dari APBD, APBN juga Bantuan Presiden.

Selain kegiatan-kegiatan di atas juga dilaksanakan :

- a. Pemugaran rumah dan lingkungan desa, dari tahun 1980/1981 dipugar 360 buah rumah penduduk.
- b. Listrik masuk desa. Dari tahun 1980/1981 telah dilaksanakan listrik masuk desa di Padang Cermin satu unit, Kecamatan Belalau satu unit, Kecamatan Blambangan Umpu satu unit. Keadaan fisik dengan kekuatan masing-masing 25 KVA.
- c. Prasarana Desa, meliputi kegiatan-kegiatan :
  - 1) Pembuatan 1 unit MCK di desa Kenali, Kecamatan Benalu.
  - 2) Pembuatan los pasar di desa Bawang, Kecamatan Padang Cermin.

- 3) Pembangunan Balai Desa di Negara Batin, Lampung Utara.
- 4) Pembuatan Jembatan desa di Kota Negara, Sungkai, Lampung Utara.

—oOo—



## B A B IV

### PENGARUH PELITA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

#### A. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Seperti telah kita bicarakan di depan, bahwa peraturan yang berlaku di luar Jawa dan Madura pada masa Kolonial adalah IGOB *Stbl* No. 490 Tahun 1938.

Di Lampung daerah yang setingkat dan sejenis dengan desa di Jawa adalah : marga. Sebelum tahun 1952 jumlah marga di Lampung 79 buah. Marga-marga tersebut mempunyai hak otonomi berdasarkan adat. Marga-marga itu merupakan bagian dari wilayah Distrik.

Pada tahun 1952 diadakan perubahan yang sangat prinsip yaitu Keputusan Residen Lampung tanggal 3 September 1952 No. 153/D/1952 yang isinya antara lain : perubahan nama dari *marga* menjadi *negeri* serta penetapan-ketetapan batas wilayah kekuasaannya berikut dengan nama-nama dari tiap-tiap negeri dalam wilayah Lampung.

Akibat dari pada keputusan Residen No. 153/D/1952 itu, maka marga tidak lagi merupakan hubungan genealogis kebabakan, tetapi sudah merupakan hubungan teritorial atau dengan kata lain kesatuan didasarkan atas wilayah yang mereka diami/tempati.

Peraturan tersebut mengatur daerah-daerah yang berdasarkan norma adat ditingkatkan menjadi daerah yang berdasarkan pada peraturan/undang-undang. Dengan adanya peraturan itu maka dari 79 marga diubah/dibentuk menjadi 35 negeri, yang berarti pula bahwa batas wilayah negeri berlainan dengan batas wilayah marga.

Disebutkan juga bahwa hutang-piutang marga menjadi tanggung jawab negeri. Administrasi Pemerintahan Propinsi Lampung berdiri pada tanggal 8 Maret 1964. Dengan demikian Lampung yang sebelumnya menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Selatan, sejak keluarnya peraturan itu berdiri sendiri sebagai suatu Propinsi dengan ibukota Tanjungkarang — Telukbetung.

Pada tahun 1965 IGOB No. 490 Tahun 1938 tentang pemerintahan Desa dicabut dan dikeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965.

Tentang Desapraja Peraturan itu tidak mengatur Desa atau daerah yang setingkat dengan desa tetapi menghapus desa. Berdasarkan peraturan itu Negeri di Daerah Lampung akan terhapus dan dipersiapkan menjadi suatu Desapraja, sebagai peralihan untuk menjadi Daerah Otonom Tingkat III. Tetapi Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 itu ternyata gugur sebelum dilaksanakan, sehingga desa dan daerah setingkat desa termasuk Negeri tetap berdiri.

Dengan pecahnya peristiwa G 30 S/PKI, maka mengakibatkan adanya perubahan dalam kebijaksanaan dan sistem pemerintahan daerah. Terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 1965 dan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ditinjau kembali berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966, yaitu mengenai otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Sebagai hasil pelaksanaan Ketetapan tersebut dikeluarkanlah Undang-undang No. 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlaku lagi berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang antara lain Undang-undang No. 18 Tahun 1965 dan Undang-undang No. 19 Tahun 1965.

Pernyataan itu dimuat di dalam Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37. Disebutkan juga bahwa tidak berlakunya Undang-undang yang bersangkutan ditetapkan pada saat Undang-undang penggantinya mulai berlaku. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada tanggal 1 Desember 1979, maka berarti Undang-undang No. 19 Tahun 1965 tidak berlaku lagi.

Di Propinsi Lampung, proses perubahan Negeri menjadi Desa itu terjadi pada tahun 1979. Pada waktu itu Gubernur Kepala Daerah Tk. I. Propinsi Lampung mengeluarkan Surat Keputusan No. G/21/I/69 tanggal 24 Pebruari 1969 tentang : Pemilihan, Pengakuan, Pengerahan, Pemberhentian Pamong-pamong Negeri di dalam Daerah Propinsi Lampung. Hakekat Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah pemerintahan terendah yang memiliki Otonomi dan dipandang setingkat dengan desa adalah Negeri.

Sejak terbentuknya Propinsi Lampung maka distrik dihapuskan dan dibentuk Daerah Kecamatan. Usaha untuk memecahkan masalah itu pada tahun 1970, Pemerintah Daerah Propinsi Lampung mengeluarkan Surat Edaran tanggal 10 Pebruari 1970 No. G/III/TU/70 tentang Tugas Kecamatan. Isi dari Surat Edaran itu antara lain mengenai wewenang Kecamatan untuk mengkoordinir Negeri-Negeri yang ada di wilayahnya.

Dengan demikian ada satu Negeri yang dikoordinasi oleh dua Kecamatan. Di dalam Surat Edaran itu dinyatakan juga bahwa dengan sepengetahuan Kepala Negeri, maka Camat dapat berhubungan langsung dengan Kepala Kampung. Sedangkan sudah kita ketahui bahwa Kampung adalah bagian dari Negeri.

Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung No. A/6002/VII-I/71 tanggal 15 Nopember 1971 tentang pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Negeri, maka otomatis otonomi negeri tidak dapat dilaksanakan, atau dengan kata lain Negeri menjadi Daerah Administrasi berarti merupakan langkah hapusnya Negeri menuju terbentuknya Desa.

Kepala Daerah Propinsi Lampung No. G/01/II/TU/72 tanggal 10 Pebruari 1972 tentang Perubahan Dewan Perwakilan Rakyat Negeri, dan dengan ini pula berarti Pemerintahan Negeri sudah tidak lengkap lagi. Selanjutnya keluarlah Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung No. A/1170/I.I/2118/72 tanggal 18 Maret 1972 tentang kedudukan Camat merangkap Jabatan Kepala Negeri.

Disebutkan juga dalam Surat Edaran itu bahwa Kepala Negeri yang sudah habis masa jabatannya, maka jabatan itu beralih kepada Camat. Dengan ini berarti Kecamatan sebagai wilayah Administratif memiliki otonomi yang diterima dari Negeri.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung No. G/334/DI/HK/73 tanggal 20 Oktober 1974 tentang Pengalihan Income Negeri kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, maka bagi Kepala Negeri yang jabatannya belum dirangkap oleh Camat, otonominya menjadi hapus, begitu juga Kecamatan yang memiliki otonomi dari Negeri, juga menjadi hilang karena berdasar peraturan ini beralih kepada Pemerintah Daerah Tk. II. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung No. SE/10/74 tanggal 8 Juli 1974 tentang penghapusan predikat Camat yang menjabat jabatan Kepala Negeri, sehingga Camat kembali sebagai Kepala Wilayah Administratif Kecamatan. Dengan proses berangsur-angsur hilangnya Negeri, maka Camat menjadi berhubungan langsung dengan Kepala Kampung dan Kepala Kampung menjadi bagian dari Kecamatan dan dikoordinasi langsung oleh Camat.

Dengan adanya penghapusan Negeri, maka dimungkinkan pendewasaan kampung menjadi setingkat dengan desa. Pendewasaan

itu juga didukung oleh keadaan dan situasi kampung yang memang memenuhi syarat-syarat dan unsur terbentuknya desa.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka terdapat dua jenis/corak desa, yaitu :

- a. Desa adalah wilayah yang langsung di bawah kecamatan dan terdapat di luar ibukota Negeri, ibukota Propinsi, ibukota Kotamadya, ibukota Kabupaten dan Kota Administratif. Desa dikepalai oleh Kepala Desa yang bersama Lembaga Musyawarah Desa merupakan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa itu dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Dusun. Dusun adalah wilayah bagian dari desa. Kepala Desa diangkat Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II atas nama Gubernur dari calon yang terpilih untuk masa jabatan delapan tahun.
- b. Kelurahan adalah wilayah yang langsung di bawah Camat yang berada di ibukota Negeri, ibukota Propinsi, ibukota Kotamadya, ibukota Kabupaten dan Kota Administratif. Kelurahan dikepalai oleh Lurah yang bersama-sama Perangkat Kelurahan merupakan Pemerintah Kelurahan. Perangkat Kelurahan itu terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala Lingkungan di bawah oleh Kepala-kepala Urusan Lingkungan adalah wilayah bagian dari Kelurahan. Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan dan Kepala Lingkungan adalah pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

## **B. CARA PEMILIHAN DAN PERANAN APARAT DESA**

Pemilihan Kepala Desa semula berdasar I S (*Indische Staat-sregeling*) pasal 128 yang menetapkan antara lain wewenang masyarakat desa untuk memilih kepala yang dikehendakinya yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Bupati KDH sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Selain berdasarkan pilihan oleh warga desa yang bersangkutan seringkali pengangkatan Kepala Desa juga berdasarkan karena keturunan dari keluarga-keluarga yang berpengaruh secara tradisional.

Persyaratan bagi yang berhak memilih dan dipilih menjadi Kepala Desa adalah antara lain warga desa yang memiliki tanah *Inlands Bezitrecht* (= gogol) ialah hak tanah yang masih dikuasai koleh hak wilayah desa (hal ini berlaku di Jawa Timur dan Jawa Tengah). Kemudian menurut *Kiesreglement* S. 1907 No. 212 peraturan itu diubah dengan warga desa yang terkena wajib gugur gunung.

Setelah masa Kemerdekaan adalah berlaku ketentuan semua orang dewasa laki-laki yang berumur 18 tahun ke atas, sedang yang belum berumur 18 tahun tetapi sudah kawin dianggap berhak untuk memilih Kepala Desa. Ketentuan ini berdasar pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1946 secara yuridis formal. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Bab II pasal 4 mengenai : Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian, disebutkan bahwa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
3. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
4. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
6. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.
8. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
9. sehat jasmani dan rohani.
10. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang sederajat dengan itu.

Selanjutnya di dalam pasal 5 disebutkan :

- (1) Kepala Desa dipilih secara langsung, Umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/ pernah kawin.
- (2) Syarat-syarat lain mengenai pemilih serta tata cara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Dalam pasal 6 disebutkan :

Kepala desa diangkat oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih.

Pasal 7 menyebutkan :

Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali menjadi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud termuat dalam ayat (2) pasal 8. Kepala Desa dapat diberhentikan atau berhenti oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena :

- a. meninggal dunia.
- b. atas permintaan sendiri.
- c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru.
- d. tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang ini.
- e. melanggar sumpah/janji yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang ini.
- f. melanggar larangan bagi Kepala Desa yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang ini.
- g. sebab-sebab lain.

Isi sumpah/janji Kepala Desa antara lain :

1. Tidak menerima pemberian dalam pengangkatannya sebagai Kepala Desa.
2. Taat dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
3. Tidak membocorkan rahasia.
4. Mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Desa.
5. Berusaha sekuat tenaga membantu mewujudkan kesejahteraan.

Mengenai peranan Kepala Desa yaitu hak dan wewenang dapat di-perinci :

Berhak, berwenang dan berkewajiban :

1. menyelenggarakan rumah tangga desa.
2. menjalankan pimpinan pemerintahan desa.
3. menyelenggarakan dan bertanggungjawab di bidang pemerintahan.
4. menyelenggarakan dan bertanggungjawab di bidang pembangunan.
5. menyelenggarakan dan bertanggungjawab di bidang kemasyarakatan.
6. menyelenggarakan dan bertanggungjawab di bidang pemerintahan umum.
7. membina ketenteraman dan ketertiban.
8. mendamaikan perselisihan yang terjadi di desanya.
9. menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong.
10. melakukan usaha pemantapan koordinasi.
11. pelaksanaan urusan pembantuan.

Selanjutnya Kepala Desa juga :

1. Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan wewenang dan kewajibannya kepada Bupati/Walikota/madya melalui Camat.
2. Memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa.
3. Memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan.
5. Dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat desa.

6. Setelah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa mengusulkan dan memberhentikan Sekretaris Desa.
7. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan.
8. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun.
9. Bermusyawarah dengan pemuka-pemuka masyarakat di Desa membentuk Lembaga Musyawarah Desa.
10. Karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
11. Menetapkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.
12. Mengajukan usul Pengesahan Keputusan Desa kepada Bupati/Walikotamadya, Kepala Daerah Tk. II melalui Camat atas Keputusan Desa yang :
  - a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
  - b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa, misalnya penjualan, pelepasan dan penukaran kekayaan desa.
  - c. menetapkan segala sesuatu yang memberatkan beban keuangan desa.
13. Menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.

Di bagian depan telah diuraikan serba sedikit mengenai Struktur Pemerintahan Desa. Selain Kepala Desa maka masih ada aparat desa yang bertugas membantu Kepala Desa yaitu :

1. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa.
2. Sekretaris Desa menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa jika Kepala Desa berhalangan. Pertimbangan ini didasarkan Sekretaris Desa lebih mengetahui masalah-masalah desa dari pada unsur staf yang lain.
3. Sekretaris dibantu Kepala-kepala Urusan yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II atas usul Kepala Desa.
4. Kepala Dusun melaksanakan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerja tertentu.



Peranan Kepala Desa selain sebagai pemimpin formal juga berfungsi sebagai pemimpin informal terutama dalam hubungan dengan anggota masyarakat yang menyangkut segi-segi yang berhubungan dengan tugas Kepala Desa sebagai pembimbing dan pembina desanya.

### C. KEPEMIMPINAN NON FORMAL

Mengingat cara terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok terutama disebabkan karena naluri alamiah mereka untuk mempertahankan kelompok, maka di dalam kelompok itu terjalin sendi-sendi yang melandasi hubungan antara sesama warga kelompok berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan. Hal ini disebabkan juga oleh karena tempat tinggal mereka yang saling berdekatan dan adanya persamaan kepentingan. Berdasar pada persamaan kepentingan itu lalu tumbuhlah desa itu dengan corak yang sesuai dengan pertumbuhan masyarakatnya dalam kegiatan bidang-bidang tertentu. Misalnya : desa nelayan, desa pariwisata, desa perintis, desa penghasil pertanian, kerajinan dan sebagainya. Pada umumnya pertumbuhan desa itu mengenal pelopor atau pemimpin pendiri desa atau yang disebut cikal bakal desa. Pemimpin itu memiliki wibawa dan kharisma yang tinggi sehingga secara tradisional dihormati secara turun temurun. Di Jawa pada umumnya ada tradisi "bersih desa", yaitu upacara selamat dan tolak bala untuk menghindarkan desa itu dari mara bahaya.

Pada beberapa desa di Lampung tradisi itu masih ada, terutama pada desa-desa transmigrasi yang telah mencapai umur agak tua misalnya Gedong Tataan, Pringewu dan lain-lain. Pada masyarakat yang berpenduduk mayoritas Lampung masih terdapat tradisi penghormatan kepada makam-makam keramat dari pemimpin desa atau adat.

Tokoh-tokoh non formal yang dihormati di masyarakat seperti juga di Jawa adalah pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, membela kepentingan rakyat setempat. Tokoh-tokoh itu semula adalah pemimpin adat sesuai dengan penggolongannya. Selain itu tokoh dukun atau pawang masih dihormati. Pemimpin yang berpengaruh terhadap sikap mental dan tanggapan sosial ekonomis dan kebudayaan masyarakat desa juga dihormati.

Selain tetua desa di atas, pemimpin paguyuban agama, guru/ustad, pendeta. Kadang-kadang pengaruh pemimpin itu dapat melebihi Kepala Desa yang bersifat formal dalam beberapa hal tertentu. Makin maju cara berfikir masyarakat desa, maka pola berfikir mereka mulai beralih dari tradisional ke arah modern. Proses dinamika masyarakat itu sejalan dengan adanya pembangunan di desa tersebut.

Maka tokoh-tokoh : dokter, penyuluh pertanian, pekerjaan umum mulai mendapat simpati masyarakat. Masyarakat pedesaan secara umum menjalani transisi dari pola tradisional ke arah masyarakat kota. (dari *rural society* ke *urban society*).

Mobilitas sosial itu disebabkan oleh :

1. pendidikan formal yang telah dicapai.
2. komunikasi desa dan kota yang makin lancar.
3. hubungan kekerabatan antara warga desa dengan warga kota.

#### **D. ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK**

Semenjak Proklamasi Kemerdekaan, maka segala bentuk kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan pedoman Pancasila, terutama sila ke-5 : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah melalui sistem konvensional dan sistem dinamis. Mobilitas dan dinamika masyarakat perlu dibina dan dikembangkan untuk menyesuaikan dengan gerak dan langkah pemerintah dalam usaha pembangunan.

Di samping itu juga harus ditumbuhkan inisiatif masyarakat sendiri dalam hal pembangunan itu. Dalam kehidupan masyarakat yang maju, timbul banyak kebutuhan akan pelayanan umum bagi kelangsungan hidup masyarakat sebagai kelompok maupun perorangan. Untuk hal itu diperlukan pelbagai jenis lembaga yang bersifat sosial ekonomis dan sosial budaya guna memberikan pelayanan sesuai dengan ragam kepentingan masyarakat. Lembaga-lembaga itu merupakan kerjasama antara perorangan dari kelompok lokal, hingga merupakan gabungan antara kelompok teritorial maupun nasional.

Lembaga itu ada yang bersifat formal yaitu yang pembentukannya disponsori oleh pihak pemerintah dan dibiayai untuk seluruh

atau sebagian dari dana-dana yang disediakan dalam anggaran Pemerintah Pusat maupun Daerah sedang lembaga informal adalah lembaga-lembaga badan atau organisasi yang dibentuk berdasarkan inisiatif kelompok warga masyarakat tertentu dari dana warga masyarakat yang bersangkutan.

Selain itu organisasi masyarakat non politik dapat juga dibedakan atas jenis yang bersifat tradisional dan non tradisional dan fungsional.

Yang termasuk organisasi kemasyarakatan tradisional :

1. Organisasi kekeluargaan, marga yang bergerak di bidang adat misalnya perkawinan, kelahiran, penobatan waktu menerima gelar marga.
2. Gotong royong, hajatan, kematian, mendirikan rumah, menuai padi, bersih desa dan lain-lain.
3. Biada, sinoman,
4. Dalam bidang produksi, arisan, lumbung, pengairan sawah.

Yang termasuk non tradisional :

1. Bidang pendidikan BP3, kursus menjahit.
2. Bidang Olah raga.
3. Bidang Kesenian.

Yang bersifat fungsional :

1. Gerakan Keluarga Berencana.
2. BUUD dan KUD.
3. Darmatirta.
4. Pembangunan Masyarakat Desa.
5. PKK.

Lembaga Sosial Desa atau LSD dibentuk berdasar Surat Keputusan Presiden No. 81 Tahun 1971 juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1972 dan Surat Menteri Dalam Negeri No. DD. 136/PMD/V-2/72.

Fungsinya antara lain :

1. Wadah partisipasi masyarakat desa.
2. Menampung dan melaksanakan aspirasi serta inisiatif yang hidup dan tumbuh dari kalangan masyarakat.
3. Mengkoordinir setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang pembangunan desa.

4. Sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
5. Merupakan himpunan tokoh-tokoh, pemuka-pemuka dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat.

Sedangkan program LSD :

1. Membina pelaksanaan PKK.
2. Melaksanakan program pembangunan dari pemerintah di bidang BUUD/KUD, KB, BKIA, pramuka, dan pembangunan prasarana ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan.

Tentang organisasi politik di desa, pada umumnya kurang dapat berkembang, karena rakyat di pedesaan pada dewasa ini kurang perhatiannya terhadap politik. Hal ini mungkin disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang melanda rakyat pedesaan yang tidak tahu perkembangan politik, tetapi menjadi korban politik itu. Misalnya : peristiwa G 30 S/PKI, gerombolan Warman dan lain-lain.

Rakyat pedesaan kini lebih memperhatikan gerak pembangunan dari pada masalah-masalah politik. Di lampiran dicantumkan tentang keadaan organisasi politik pada tahun 1971 sebagai gambaran pada masa itu.

—oOo—

## B A B V

### RANGKUMAN DAN KESIMPULAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Lampung merupakan daerah transmigrasi yang terbesar bahkan termasuk yang tertua di Indonesia karena sudah dimulai sejak tahun 1950 yang terkenal dengan nama kolonisasi.

Perpindahan penduduk dari Jawa ke Lampung atau dari arah utara seperti dari Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Barat tidak menutup kemungkinan perbenturan kepentingan dan perubahan dalam segala bidang sehingga menyangkut masalah pembangunan.

Berdasarkan perjalanan sejarah daerah Lampung sejak awal kemerdekaan termasuk sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Selatan sampai tahun 1964, maka dapatlah dikatakan pembangunan daerah kurang begitu lancar.

Sampai tahun 1964 pembangunan daerah Lampung dapat dikatakan sangat lamban, sehingga para tokoh di Lampung berusaha untuk "memperjuangkan" daerah Lampung sebagai sebuah propinsi. Usaha ini berhasil dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 14 tahun 1964 tanggal 18 Maret 1964. Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari tiga kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan serta Kotamadya Tanjungkarang – Telukbetung.

Menurut hierarkhi struktur pemerintahan di Lampung sampai pada tahun 1972 yaitu Pemerintahan Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Negeri. Sejak tanggal 10 Pebruari 1972 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur KDH Propinsi Lampung masing-masing tanggal 15 Nopember 1971 No. A/6002/VII/1971 dan tanggal 10 Pebruari 1972 No. H/1172/2181/TP/1972, maka Pemerintahan Negeri dihapuskan dan diganti menjadi Pemerintahan Desa.

Seperti kita ketahui bahwa judul penelitian ini adalah Sejarah Pengaruh Pelita terhadap kehidupan masyarakat pedesaan, di daerah Lampung di mana penekanan penelitian terhadap pemerintahan

desa. Perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, keamanan dan lain-lain merupakan indikator yang dapat dilihat dalam pelaksanaan Pelita di daerah Lampung yang sudah dimulai sejak tahun 1969.

Dalam banyak hal terjadi peningkatan dalam pengembangan dan penambahan produksi pangan, sarana perhubungan dengan perbaikan dan penambahan jalan dan jembatan, peningkatan pola berfikir masyarakat yang berusaha meningkatkan pendidikan anak-anaknya sehingga menyadari pentingnya pendidikan bagi generasi muda, perbaikan dalam struktur pemerintahan desa dengan mendatangkan/didatangkan tenaga BUTSI untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan desa, usaha peningkatan koperasi KUD, dan sebagainya. Dari hasil penelitian ini ternyata ada pengaruh positif dari Pelita yang dilaksanakan sejak tahun 1969 sampai sekarang terutama bidang yang diteliti yaitu pemerintahan desa.

Pada mulanya pengertian tentang desa beraneka ragam coraknya. Keaneka-ragaman ini dapat dilihat dari segi administrasi dan perangkat pemerintahannya. Hal ini karena belum adanya suatu Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Desa. Setelah Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dikeluarkan, maka sejak itu pengertian tentang desa dapat diseragamkan. Menurut Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desanya, ia adalah administrator pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban di desanya. Kepala Desa memegang peranan yang penting dalam menentukan berhasilnya segala kegiatan dan program pemerintah yang dilaksanakan di desanya.

Untuk mengisi jabatan kepala desa, dilakukan dengan jalan pemilihan langsung, umum, bebas dan rahasia oleh masyarakat desa itu sendiri, dengan melalui tata cara baru pemilihan yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 jo. No. 13 Tahun 1979, dan sebagai pelaksanaan dari peraturan tersebut

dikeluarkan beberapa surat keputusan, baik oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung maupun oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Pencalonan Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum berfungsinya Lembaga Musyawarah Desa, sehingga calon Kepala Desa mengajukan permohonan langsung kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sebagian Besar Kepala Desa yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan rakyat tidak memenuhi persyaratan pendidikan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978, di mana mereka hanya berpendidikan Sekolah Dasar.

Dalam kenyataan biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada calon yang bersangkutan, karena belum adanya anggaran dalam rencana anggaran dan belanja daerah tingkat II yang bersangkutan. Besarnya biaya sekitar Rp. 140.000,- untuk Kabupaten Lampung Selatan sedangkan untuk Kabupaten lainnya hampir sama saja, sehingga kalau ia calon tunggal maka biaya tersebut dipikul sendiri oleh calon tersebut.

Keterbatasan waktu dan personil Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya menyebabkan pelaksanaan pemilihan kepala desa belum menunjukkan adanya hasil sebagaimana yang diharapkan. Adanya panitia yang memihak kepada salah satu calon, akan mengurangi kemurnian dari hasil pemilihan kepala desa. Hal ini banyak menimbulkan protes-protes keras dari masyarakat terhadap hasil pemilihan tersebut. Hal ini terjadi kasus di Kabupaten Lampung Selatan.

Tuntutan bagi seorang calon kepala desa yang memenuhi persyaratan mampu, berwibawa, jujur dan adil perlu diimbangi dengan jaminan penghasilan yang tetap dan memadai. Oleh karena itu usaha pemerintah menjadikan kepala desa sebagai pegawai negeri merupakan suatu usaha yang menuju ke arah perbaikan sehingga tidak timbul citra bahwa kepala desa hidupnya tergantung dari rakyatnya.

Banyak hal yang telah terjadi akibat Pelita di daerah Lampung terutama di daerah pedesaan, sistem ekonomi yang mempergunakan Koperasi Unit Desa, BIMAS dan INMAS, penambahan gedung SD Inpres, rehabilitasi gedung-gedung Sekolah Dasar dan Menengah, sehingga secara kualitatif terdapat pengaruh positif dari Pelita di daerah Lampung. Secara kuantitatif dan berdasarkan analisa statistik belum

begitu meyakinkan karena data yang diperoleh belum menggambarkan populasi dari desa-desa yang dijadikan sampel.

Sebagai kesimpulan akhir bahwa dengan pelaksanaan Pelita yang bertahap, berencana dan terarah diimbangi dengan biaya yang memadai, disertai pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi setiap kegiatan pembangunan akan memungkinkan pengembangan wilayah sebagai *hinterland* ibukota Jakarta, maka daerah Lampung akan merupakan wilayah dan daerah yang mempunyai potensi yang cukup baik untuk masa depan. Semuanya ini akan berhasil apabila diimbangi oleh manusia dari generasi muda yang sadar bahwa masa depan yang gemilang terletak di tangan mereka.

—oOo—



## BIBLIOGRAFI

- BAPPEDA — Kantor Statistik Propinsi Lampung, *Lampung dalam Angka*, 1979 Edisi 12.
- , *Lampung Dalam Angka*, 1980, Edisi 13
- Biro Pusat Statistik, *Hasil Sensus Penduduk 1980*, Jakarta 1981.
- Bukri, cs., *Monografi Daerah Lampung*, Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, 1979.
- Burger, D.H. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid I, PN. Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Bunga Rampai Adat Budaya* No. 1 th. 1 Telukbetung, 1973.
- , *Bunga Rampai Adat Budaya* No. 2 tahun II, Telukbetung 1974.
- Ina Slamet, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Jakarta, 1963.
- Kampto Utomo, Dr. *Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah W. Sekampung*, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Kuncaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta, 1969.
- Lipton dan Moore, *Metodologi Studi Pedesaan di Negara-negara Berkembang*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1980.
- Pemda Propinsi Lampung, *Penelitian Potensi Desa Tahun 1979/1980*, Telukbetung, 1980.
- Republik Indonesia, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga, 1979/1980 — 1983/1984* (Rancangan) Jilid I.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Pemerintahan di Daerah No. 5 tahun 1961*.
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghallia Indonesia, Jakarta, 1979.
- Sutardjo Kartohadikusumo, *Desa*, Jakarta, 1953.
- Tambunan SH. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 Tentang Pokok Pembangunan Daerah*. Binacipta Bandung, 1979.

Taliziduhu Ndaraha, *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*, Bina Aksara, Jakarta.

Tim Penelitian Fakultas Keguruan Universitas Lampung, *Historiografi Daerah Lampung*, Tanjungkarang, 1975.

—————, *Monografi Propinsi Lampung*, Tanjungkarang, 1972.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, 1968.

Universitas Lampung, *Laporan Rektor Unila pada Dies natalis Unila*, 1980.

—oOo—

## DAFTAR INFORMAN/RESPONDEN

### A. KOTAMADYA TANJUNGKARANG – TELUKBETUNG

1. Nama : Hi. M. Amin Zahrie  
Tempat/tgl. lahir : Tanjungkarang, 21 Oktober 1921.  
Alamat : RK II/4 No. 193 Kp. Sawah Lama Kec. Tanjungkarang Timur.  
Pendidikan : Sanawiyah  
Pekerjaan : Kepala Kelurahan Kampung Sawah Lama.
2. Nama : Sumardi  
Tempat/tgl. lahir : Purbolinggo, 25 Mei 1953  
Alamat : RK IVA RT I No. 45 Kp. Sawah Lama Kec. Tanjungkarang Timur.  
Pendidikan : STP Negeri.  
Pekerjaan : Sekretaris Kelurahan.
3. Nama : F. Soekaryo  
Tempat/tgl. lahir : Kutoarjo, 17 April 1938  
Alamat : RK V RT II No. 65A Kp. Sawah Lama Kec. Tanjungkarang Timur.  
Pendidikan : SMEP Negeri Kutoarjo  
Pekerjaan : Staf Kelurahan Kampung Sawah Lama.
4. Nama : Walidjo. S  
Tempat/tgl. lahir : Metro, 8 Desember 1943.  
Alamat : Gg. Purwo Kp. Sidodadi Kedaton Kec. Tanjungkarang Timur.  
Pendidikan : SMP/KPd. PM.  
Pekerjaan : Pelaksana TU Kandep P dan K Kec. Tanjungkarang Timur.
5. Nama : Kasir Muchtar.  
Tempat/tgl. lahir : Tanjungkarang, 15 Nopember 1952.  
Alamat : Kp. Sawah Lama RK III RT III No. 6 Kec. Tanjungkarang Timur.
6. Nama : Parino.

Tempat/tgl. lahir : Kutoarjo, 1 Pebruari 1940.  
 Alamat : Kp. Sawah Lama Kec. Tanjungkarang  
 TIMUR.  
 Pendidikan : SMP.  
 Pekerjaan : Staf Kelurahan Kp. Sawah Lama.

7. Nama : M. Solikin.  
 Tempat/tgl. lahir : Kutoarjo, 16 Agustus 1940.  
 Alamat : Kp. Sawah Lama Kec. Tanjungkarang  
 Timur.  
 Pendidikan : SMP.  
 Pekerjaan : Staf Kelurahan Kp. Sawah Lama.

8. Nama : Mahfuz Efendi Masir  
 Tempat/tgl. lahir : Telukbetung, 2 Pebruari 1952.  
 Alamat : Jl. Talang No. 4 Telukbetung Selatan.  
 Pendidikan : SMA.  
 Pekerjaan : Kepala Kampung Gedong Pakuon.

9. Nama : Mandak.  
 Tempat/tgl. lahir : Kalianda, 1929.  
 Alamat : Jl. Selat Panjang No. 11 Telukbetung  
 Selatan.  
 Pendidikan : SD.  
 Pekerjaan : Kep. Seksi Pemerintahan Kec. Telukbe-  
 tung Selatan.

10. Nama : Dairobi.  
 Tempat/tgl. lahir : Talang Padang, 24 Juni 1944.  
 Alamat : Jl. Talang Blok IV No. 21 Kec. Teluk-  
 betung Selatan.  
 Pendidikan : SMA (Taman Madya).  
 Pekerjaan : Carik (Sek. Desa) Gedong Pakuon Talang.

11. Nama : A. Rasyid Thahir.  
 Tempat/tgl. lahir : Liwa, 4 Desember 1932.  
 Alamat : Jl. Selat Gaspar No. 40 Telukbetung Se-  
 latan.  
 Pendidikan : SGA.

Pekerjaan : Kepala Kandep P dan K Kec. Telukbetung Selatan.

12. Nama : Jamluddin.  
Tempat/tgl. lahir : Telukbetung, 12 Mei 1954.  
Alamat : Gg. Notaris Cimeng Blok II Telukbetung Selatan.  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Ketua RT XVIII Gedong Pakuon Talang.

**B. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

13. Nama : Ali Rachman Amran.  
Tempat/tgl. lahir : Rangkas Bitung, 33 tahun.  
Alamat : Desa Kota Agung, Kecamatan Kota Agung.  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Kepala Desa Kota Agung.
14. Nama : M. Rusli SI.  
Tempat/tgl. lahir : Terbaya, 22 Pebruari 1939.  
Alamat : Terbaya Kota Agung Kecamatan Kota Agung.  
Pendidikan : SPG.  
Pekerjaan : Kepala Sekolah Dasar Campang Tiga Kota Agung.
15. Nama : Kemala Siah.  
Tempat/tgl. lahir : Kota Agung, 35 tahun.  
Alamat : Kota Agung Kecamatan Kota Agung.  
Pendidikan : SPG.  
Pekerjaan : Guru SD Kota Agung.
16. Nama : A. Azis Alipi Nasir.  
Tempat/tgl. lahir : Kagungan Kota Agung, 55 tahun.  
Alamat : Kota Agung Kecamatan Kota Agung.  
Pendidikan : Penilik Penmas Kandep P dan K Kota Agung.  
Pekerjaan : —

17. Nama : Amran Haji Ujon.  
Tempat/tgl. lahir : Rangkas Bitung, 89 tahun.  
Alamat : Campang Tiga Kota Agung Kec. Kota Agung.  
Pendidikan : SR.  
Pekerjaan : Tani/Ex. Kepala Desa.
18. Nama : A. Rashid M.  
Tempat/tgl. lahir : Kota Agung, 42 tahun.  
Alamat : Kota Agung Kecamatan Kota Agung.  
Pendidikan : SPG.  
Pekerjaan : Wakil Kepala SD Kota Agung.
19. Nama : Sulastri.  
Tempat/tgl. lahir : Kota Agung, 20 tahun.  
Alamat : Kota Agung Kec. Kota Agung.  
Pendidikan : SPG.  
Pekerjaan : Guru SD Kota Agung.
20. Nama : Sukardi Sulaiman.  
Tempat/tgl. lahir : Yogyakarta, 51 tahun.  
Alamat : Gisting Atas Kec. Kota Agung.  
Pendidikan : SPG.  
Pekerjaan : Penilik TK/SD Kandep P dan K Kec. Kota Agung.
21. Nama : Abdul Djapar.  
Tempat/tgl. lahir : Gadingrejo, 53 tahun.  
Alamat : Pringsewu Kec. Pringsewu.  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Kepala Desa Pringsewu.
22. Nama : A. Hasyim.  
Tempat/tgl. lahir : Lahat, 38 tahun.  
Alamat : Pringombo Pringsewu Kec. Pringsewu.  
Pendidikan : STM.  
Pekerjaan : Kepala Bandes/Unit Bandes Kec. Pringsewu.

23. Nama : Hasanuddin.  
 Tempat/tgl. lahir : Sinarbaru, 10 Nopember 1943.  
 Alamat : Komplek Pesantren Kh. Gholib Pringsewu  
 Kec. Pringsewu.  
 Pendidikan : PGSLP.  
 Pekerjaan : Kepala SMP Islam Pesantren Kh. Gholib  
 Pringsewu.
24. Nama : Ki. Ms. Madiyo Sastro.  
 Tempat/tgl. lahir : Deparejo Kebumen, 64 tahun.  
 Alamat : Pringombo I Pringsewu Kec. Pringsewu.  
 Pendidikan : Vervolk School  
 Pekerjaan : Menteri Pengawas Pasar.
25. Nama : Mahfuzh Syahid.  
 Tempat/tgl. lahir : Madiun, 51 tahun.  
 Alamat : Pringsewu Kec. Pringsewu.  
 Pendidikan : PGA 6 tahun.  
 Pekerjaan : Pegawai KUA Kec. Pringsewu.
26. Nama : Hi Slamet Cipto Sisworo.  
 Tempat/tgl. lahir : Purworejo, 74 tahun.  
 Alamat : Pringsewu Barat Kec. Pringsewu.  
 Pendidikan : Menteri Vervolks.  
 Pekerjaan : Pensiunan Kesehatan.
27. Nama : F.Y. Sumardi.  
 Tempat/tgl. lahir : Purworejo, 54 tahun.  
 Alamat : Pringombo Pringsewu Kec. Pringsewu.  
 Pendidikan : HIS.  
 Pekerjaan : Pel. TU Kandep P dan K Kec. Pringsewu.
28. Nama : Siti Hapsah Djafar.  
 Tempat/tgl. lahir : Gadingrejo, 40 tahun.  
 Alamat : Pringsewu Kec. Pringsewu.  
 Pendidikan : SR.  
 Pekerjaan : Ketua Umum PKK Pringsewu.
29. Nama : R. Suratto.

- Tempat/tgl. lahir : Plaju Palembang, 61 tahun.  
 Alamat : Jl. Sukoharjo No. 16 Kec. Pringsewu.  
 Pendidikan : HIS.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.
30. Nama : Rusdi Hp.  
 Tempat/tgl. lahir : Kalianda, 42 tahun.  
 Alamat : Desa Sukaratu Kec. Kalianda.  
 Pendidikan : SMA.  
 Pekerjaan : Kepala Desa Sukaratu.
31. Nama : Makmun.  
 Tempat/tgl. lahir : Sukaratu, 37 tahun.  
 Alamat : Desa Sukaratu Kec. Kalianda.  
 Pendidikan : SD.  
 Pekerjaan : Tani/Sekretaris Desa.
32. Nama : Muhtar.  
 Tempat/tgl. lahir : Sukaratu, 48 tahun.  
 Alamat : Sukaratu Kec. Kalianda.  
 Pendidikan : SD.  
 Pekerjaan : Tani/Ketua LKMD.
33. Nama : Bustami.  
 Tempat/tgl. lahir : Sukaratu, 43 tahun.  
 Alamat : Sukaratu Kec. Kalianda.  
 Pendidikan : —  
 Pekerjaan : Tani/Pamong Desa.
34. Nama : Mantok Tahir.  
 Tempat/tgl. lahir : Sukaratu, 48 tahun.  
 Alamat : Sukaratu Kec. Kalianda.  
 Pendidikan : SD.  
 Pekerjaan : Tani/P3NTR.
35. Nama : Abd. Karim.  
 Tempat/tgl. lahir : Sukaratu, 53 tahun.  
 Alamat : Sukaratu Kec. Kalianda.  
 Pendidikan : —  
 Pekerjaan : Tani/Tokoh Masyarakat.



36. Nama : Tumenggung Jamaluddin.  
 Tempat/tgl. lahir : Kecapi Kalianda, 60 tahun.  
 Alamat : Sukaratu Kec. Kalianda.  
 Pendidikan : —  
 Pekerjaan : Tani/Tokoh Adat.
37. Nama : A. Rahman.  
 Tempat/tgl. lahir : Sukaratu, 65 tahun.  
 Alamat : Desa Sukaratu Kec. Kalianda.  
 Pendidikan : Sekolah Agama.  
 Pekerjaan : Tani/Tokoh Masyarakat.
38. Nama : M. Nur.  
 Tempat/tgl. lahir : Sukaratu.  
 Alamat : Desa Sukaratu Kec. Kalianda.  
 Pendidikan : SD.  
 Pekerjaan : Tani/Tokoh Masyarakat.

#### C. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

40. Nama : M. Dahlan.  
 Tempat/tgl. lahir : Kutoarjo, 52 tahun.  
 Alamat : Gunungsugih Kec. Gunungsugih.  
 Pendidikan : Vervolk School.  
 Pekerjaan : Kepala Kampung Gunungsugih.
41. Nama : Abdullah.  
 Tempat/tgl. lahir : Gunungsugih, 16 Agustus 1945.  
 Alamat : Gunungsugih Pasar Kec. Gunungsugih.  
 Pendidikan : SD.  
 Pekerjaan : Sekretaris Desa/Carik.
42. Nama : Suhar.  
 Tempat/tgl. lahir : Gunungsugih, 49 tahun.  
 Alamat : Gunungsugih Pasar Kec. Gunungsugih.  
 Pendidikan : SD.  
 Pekerjaan : P3NTR.

43. Nama : Misbach.  
Tempat/tgl. lahir : Gunungsugih, 48 tahun.  
Alamat : Gunungsugih Pasar Kec. Gunungsugih.  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Kepala Suku/RK I.
44. Nama : Sahlan.  
Tempat/tgl. lahir : Jawa Tengah, 48 tahun.  
Alamat : Kampung Baru Kec. Gunungsugih.  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Kepala Suku/RK II.
45. Nama : Suparno S.  
Tempat/tgl. lahir : Gunungsugih, 27 Juli 1953.  
Alamat : Jl. Komerling Gunungsugih Kec. Gunung-  
sugih.  
Pendidikan : SMP.  
Pekerjaan : Ketua RT/Tani.
46. Nama : Ramlan.  
Tempat/tgl. lahir : Jawa Tengah, 40 tahun.  
Alamat : Gunungsugih Pasar Kec. Gunungsugih.  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Hansip.
47. Nama : Bawan.  
Tempat/tgl. lahir : Gunungsugih, 30 tahun.  
Alamat : Gunungsugih Kec. Gunungsugih.  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Hansip.
48. Nama : Dasuki.  
Tempat/tgl. lahir : Jawa Tengah, 45 tahun.  
Alamat : Gunungsugih Kec. Gunungsugih.  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Kamra.
49. Nama : Wandu.  
Tempat/tgl. lahir : Jawa Tengah, 45 tahun.

- Alamat : Gunungsugih Pasar Kec. Gunungsugih.  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Tani.
50. Nama : Abdul Hadi.  
Tempat/tgl. lahir : Pekalongan Jawa Tengah, 52 tahun.  
Alamat : Pekalongan Kec. Pekalongan.  
Pendidikan : SMP.  
Pekerjaan : Kepala Kampung.
51. Nama : Latip.  
Tempat/tgl. lahir : Tulungagung Jawa Timur, 39 tahun.  
Alamat : Pekalongan Kec. Pekalongan.  
Pendidikan : SMP.  
Pekerjaan : Carik Desa.
52. Nama : Slamet AT.  
Tempat/tgl. lahir : Kebumen, 30 tahun.  
Alamat : Pekalongan Kec. Pekalongan.  
Pendidikan : SMP.  
Pekerjaan : P3NTR.
53. Nama : Mukhibin.  
Tempat/tgl. lahir : Banyumas Jawa Tengah, 30 tahun.  
Alamat : Pekalongan Kec. Pekalongan.  
Pendidikan : IAIN.  
Pekerjaan : P3NTR.
54. Nama : HB Tamizi.  
Tempat/tgl. lahir : Sukadana, 5 Juli 1943.  
Alamat : Yosodadi Kec. Pekalongan.  
Pendidikan : KPAA.  
Pekerjaan : Peg. Kandep P dan K Kec. Pekalongan.
55. Nama : Supardi Hs.  
Tempat/tgl. lahir : Purwokerto, 15 Agustus 1942.  
Alamat : Tulusrejo Kec. Pekalongan.  
Pendidikan : SMP.  
Pekerjaan : Peg. Kandep P dan K Kec. Pekalongan.

56. Nama : Ridwan Sanusi.  
 Tempat/tgl. lahir : Sukadana, 1 Juli 1950.  
 Alamat : 15B Timur Metro Kec. Pekalongan.  
 Pendidikan : SMA.  
 Pekerjaan : Peg. Kandep P dan K Kec. Pekalongan.
57. Nama : Palil.  
 Tempat/tgl. lahir : Tulungagung Jawa Timur<sup>4</sup> 53 tahun.  
 Alamat : Pekalongan Kec. Pekalongan.  
 Pendidikan : SD.  
 Pekerjaan : Tani.
58. Nama : Suwardi.  
 Tempat/tgl. lahir : Tulungagung, 20 Juli 1955.  
 Alamat : Pekalongan Kec. Pekalongan.  
 Pendidikan : SMEA.  
 Pekerjaan : Guru.

#### **D. KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

59. Nama : M. Hatta Kantar.  
 Tempat/tgl. lahir : Bukitkemuning, 6 Juli 1934.  
 Alamat : Bukitkemuning Kec. Bukitkemuning.  
 Pendidikan : SLA.  
 Pekerjaan : Kepala Kelurahan Bukitkemuning.
60. Nama : M. Muchtar.  
 Tempat/tgl. lahir : Bukitkemuning, 27 Pebruari 1942.  
 Alamat : Bukitkemuning Kec. Bukitkemuning.  
 Pendidikan : SMP.  
 Pekerjaan : Sekretaris Kelurahan Bukitkemuning.
61. Nama : M. Tabin.  
 Tempat/tgl. lahir : Bukitkemuning, 36 tahun.  
 Alamat : Bukitkemuning Kec. Bukitkemuning.  
 Pendidikan : PGA.  
 Pekerjaan : Kep. Urusan Umum Kelurahan.

62. Nama : Umarbik.  
Tempat/tgl. lahir : Kutai, 1 Desember 1942.  
Alamat : Bukitkemuning, Kec. Bukitkemuning.  
Pendidikan : SMA.  
Pekerjaan : Kep. Urusan Kelurahan.
63. Nama : Muchtar Hasan.  
Tempat/tgl. lahir : Sumendo, 42 tahun.  
Alamat : Bukitkemuning Kec. Bukitkemuning.  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Kep. Urusan Ekonomi Kelurahan.
64. Nama : Ujang Bakar.  
Tempat/tgl. lahir : Pulau Panggung, 19 Pebruari 1936.  
Alamat : Jl. Sumberjaya No. 9 Bukitkemuning.  
Pendidikan : SMP.  
Pekerjaan : Kep. Urusan Bangunan Kelurahan.
65. Nama : Hadarumi.  
Tempat tgl. lahir : Saungnaga, 23 Desember 1934.  
Alamat : Bukitkemuning Kec. Bukitkemuning.  
Pendidikan : SGA.  
Pekerjaan : Kepala Kandep P dan K Kec. Bukitkemuning.
66. Nama : Abdul Wahid.  
Tempat/tgl. lahir : Demak, 16 Oktober 1944.  
Alamat : Kodorongok Kec. Bukitkemuning.  
Pendidikan : MAAIN.  
Pekerjaan : Kepala SD.
67. Nama : Abdul Dauli  
Tempat/tgl. lahir : Pulau Panggung, 4 Maret 1937.  
Alamat : Komplek SMP Negeri Bukitkemuning.  
Pendidikan : PGSLP.  
Pekerjaan : Kepala SMP Negeri Bukitkemuning.
68. Nama : Rosihan Arifin.  
Tempat/tgl. lahir : Pulau Panggung, 23 Nopember 1953.

- |            |   |                                   |
|------------|---|-----------------------------------|
| Alamat     | : | Bukitkemuning Kec. Bukitkemuning. |
| Pendidikan | : | SMA.                              |
| Pekerjaan  | : | Peg. TU SMA Negeri Bukitkemuning. |
69. Nama : Ismet Muchtar.  
 Tempat/tgl. lahir : Blambangan Pagar, 5 September 1941.  
 Alamat : Blambangan Kec. Abung Selatan.  
 Pendidikan : SMP.  
 Pekerjaan : Kepala Kampung Blambangan.
70. Nama : M. Saleh Ys.  
 Tempat/tgl. lahir : Blambangan, 23 Juli 1939.  
 Alamat : Blambangan Kec. Abung Selatan.  
 Pendidikan : SGB.  
 Pekerjaan : Carik Desa Blambangan.
71. Nama : Djalaluddin Malik.  
 Tempat/tgl. lahir : Blambangan, 5 September 1950.  
 Alamat : Blambangan Kec. Abung Selatan.  
 Pendidikan : SMP.  
 Pekerjaan : Kandep P dan K Kec. Abung Selatan.
72. Nama : Hi. M. Dustur.  
 Tempat/tgl. lahir : Blambangan, 4 Juni 1948.  
 Alamat : Blambangan Kec. Abung Selatan.  
 Pendidikan : SLA.  
 Pekerjaan : Pegawai/Tokoh Adat
73. Nama : A. Tihang.  
 Tempat/tgl. lahir : Blambangan, 48 tahun.  
 Alamat : Blambangan Kec. Abung Selatan.  
 Pendidikan : KPG.  
 Pekerjaan : Kepala SD Blambangan.
74. Nama : Minak Wakak Mega.  
 Tempat/tgl. lahir : Ujung Gunung Ilir, 7 Maret 1925.  
 Alamat : Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala.  
 Pendidikan : Sekolah Guvernemen.  
 Pekerjaan : Kep. Kampung Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala.

75. Nama : Awang Syan Wkm.  
 Tempat/tgl. lahir : Ujung Gunung Ilir, 24 Juli 1951.  
 Alamat : Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala.  
 Pendidikan : SD.  
 Pekerjaan : Sekretaris Desa Ujung Gujung Ilir Kec. Menggala.
76. Nama : Adhan.  
 Tempat/tgl. lahir : Ujung Gunung Ilir, 2 Januari 1951.  
 Alamat : Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala.  
 Pendidikan : SPG.  
 Pekerjaan : Guru SD No. 10 Menggala.
77. Nama : Abu Tazid Ms.  
 Tempat/tgl. lahir : Ujung Gunung Ilir, 27 Januari 1940.  
 Alamat : Menggala Kec. Menggala.  
 Pendidikan : KPPM.  
 Pekerjaan : Peg. Kandep P dan K Kec. Menggala.
78. Nama : CS Raja Pasirah.  
 Tempat/tgl. lahir : Ujung Gunung Ilir, 6 April 1932.  
 Alamat : Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala.  
 Pendidikan : MINU.  
 Pekerjaan : Peg. Kandep P dan K Kec. Menggala.

—oOo—

## SITUASI PARPOL DAN GOLKAR PROPINSI LAMPUNG s/d. AWAL 1971

No.	PARPOL/GOLKAR	Jumlah Cabang, Anak Cabang dan Ranting															Jumlah Kecamatan dan Desa										Jumlah Anggota di DPRD Tk. I & II									
		Lampung Utara			Lampung Tengah			Lampung Selatan			Kodya			Propinsi Lampung			Lampung Utara			Lampung Tengah			Lampung Selatan			Kodya			Propinsi Lampung			Lam-pung utara	Lam-pung tengah	Lam-pung selatan	Ko-dya	Pro-pin-si
		C	AC	RT	C	AC	RT	C	AC	RT	C	AC	RT	C	AC	RT	Kec	Ds	Kec	Ds	Kec	Ds	Kec	Ds	Kec	Ds	Kec	Ds	Kec	Ds						
	A. PARPOL																14	247	22	375	15	439	4	24	53	1112	14	17	16	14	22					
1.	PSII	1	12	—	1	11	—	1	13	—	1	4	—	4	40	—	14	—	15	—	14	—	4	—	47	—	4	2	4	2	5					
2.	NU	—	14	—	—	26	—	—	—	—	1	—	—	1	40	—	14	—	21	—	15	—	4	—	54	—	3	4	4	4	5					
3.	PARMUSI	1	9	—	1	22	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	18	—	14	—	3	—	44	—	1	2	1	2	2					
4.	PNI	3	4	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	6	—	—	4	—	20	—	14	—	4	42	—	2	4	2	3	5					
5.	IPKI	1	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	7	—	3	—	18	—	1	1	1	1	1					
6.	PARKINDO	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	2	—	10	—	1	1	1	1	1	1					
7.	P.I. PERTI	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	1	—	8	—	1	1	1	1	1					
8.	P. KATHOLIK	—	2	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—	5	—	2	—	18	—	1	2	1	1	1					
9.	P. MURBA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1					
	B. GOLKAR	1	14	—	1	22	—	1	15	—	1	4	—	4	55	—	14	274	22	375	15	434	4	24	55	1112	15	18	18	16	23					
10.	KINO HANKAM	1	4	—	1	22	—	1	5	—	1	4	—	4	55	—	14	—	22	—	15	—	4	24	55	—	—	—	6	4	9					
11.	KINO SOKSI	1	2	—	1	10	—	1	11	—	1	4	—	4	27	—	2	—	11	—	13	—	—	—	26	—	—	—	—	1	3					
12.	KINO MKGR	1	—	—	1	—	—	1	12	—	1	3	3	4	39	—	1	—	2	—	8	—	4	15	—	—	—	—	—	1	3					
14.	KINO PROPDASI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	7	—	1	—	14	—	—	—	1	1	1					
15.	KINO GAKARI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	21	—	14	—	4	—	53	—	—	—	—	7	7					
16.	KARYA PEMB.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

Keterangan : C = cabang  
 AC = Anak Cabang  
 RT = Ranting  
 Kec. = Kecamatan  
 Des. = Desa.



**PERINCIAN ANGKA-ANGKA PER KAPITA  
TAHUN 1969 - 1974**

No.	PERINCIAN	1969	1970	1971	1972	1973	1974
<b>I.</b>	<b>ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU</b>						
	1. Produk Domestik Regional Bruto pada harga pasar (rupiah juta)	53.777.4	63.658.9	77.863.0	105.831.3	145.708.6	185.680.1
	2. Penyusutan (rupiah juta)	4.486.8	5.058.8	5.764.6	9.378.2	11.662.8	15.267.1
	3. Produk Domestik Regional Netto pada harga pasar (rupiah juta)	49.290.6	58.600.1	72.098.4	96.453.1	134.045.8	170.413.0
	4. Pajak Tak Langsung Netto (rupiah juta)	348.4	427.8	525.4	643.2	792.4	979.2
	5. Produksi Domesti Regional Netto atas dasar biaya faktor/pendapatan Regional (rupiah juta)	48.942.2	58.172.3	71.573.0	95.807.9	133.253.4	169.439.8
	6. Penduduk Pertengahan Tahun (000. jiwa)	2.446.9	2.576.2	2.708.2	2.811.8	2.899.5	3.043.9
	7. Produksi Domesti Regional Bruto per kapita (rupiah)	21.998.0	24.710.0	28.751.0	37.638.0	50.253.0	61.001.0
	8. Pendapatan Regional per kapita (rupiah)	20.002.0	22.581.0	26.428.0	34.074.0	45.957.0	55.665.0
<b>II.</b>	<b>ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1969 :</b>						
	9. Produk Domestik Regional Bruto (rupiah juta)	53.777.4	58.602.4	67.318.3	80.647.4	87.409.0	93.318.0
	10. Penyusutan (rupiah juta)	4.486.8	4.502.3	5.092.3	6.542.2	6.522.3	6.672.1
	11. Produk Domestik Regional Netto (rupiah juta)	49.290.6	54.100.1	62.226.1	74.105.2	80.886.7	86.645.9
	12. Pajak Tak Langsung Netto (rupiah juta)	348.4	352.8	352.1	443.5	591.6	597.0
	13. Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi/pendapatan Regional (rupiah juta)	48.942.2	53.747.3	61.873.6	73.661.7	80.295.1	86.048.9
	14. Penduduk Pertengahan Tahun (000. jiwa)	2.446.9	2.576.2	2.708.2	2.811.8	2.899.5	3.043.9
	15. Penduduk Domestik Regional Bruto per kapita (rupiah)	21.998.0	22.827.0	24.857.0	28.682.0	30.146.0	30.657.0
	16. Pendapatan Regional per Kapita (rupiah)	20.002.0	20.863.0	22.847.0	26.197.0	27.693.0	28.269.0

**PENDAPATAN REGIONAL DAN PENDAPATAN PER KAPITA  
PROPINSI DATI I LAMPUNG TAHUN 1975 – 1978**

No.	PERINCIAN	SATUAN	1975	1976	1977	1978
<b>A.</b>	<b>ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU :</b>					
1.	Produk Domestik Regional Bruto pada harga pasar.	jutaan rp.	218.332,2	283.228,2	389.543,4	424.392,4
2.	Penyusutan	jutaan rp.	11.651,6	15.282,6	20.327,0	23.135,2
3.	Produk Domestik Regional Netto pada harga	jutaan rp.	206.680,6	267.945,4	369.216,4	401.257,2
4.	Pajak Tak Langsung Netto	jutaan rp.	2.617,4	3.055,3	4.202,2	4.578,1
5.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor/Pendapatan Regional	jutaan rp.	204.063,2	264.890,1	365.014,2	396.679,1
6.	Penduduk Pertengahan Tahun	ribuan jiwa	3.227,6	3.437,3	3.676,7	3.763,9
7.	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	rupiah	67.645,4	82.398,4	105.949,2	112.753,4
8.	Pendapatan Regional Per Kapita	rupiah	63.224,4	77.063,4	99.277,7	105.390,4
<b>B.</b>	<b>ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1971 :</b>					
1.	Produk Domestik Regional Bruto pada harga pasar	jutaan rp.	99.396,9	107.990,0	122.888,5	132.347,3
2.	Penyusutan	jutaan rp.	5.555,6	6.139,6	6.867,0	7.608,5
3.	Produk Domestik Regional Bruto pada harga pasar	jutaan rp.	93.841,3	101.850,4	116.021,5	124.738,8
4.	Pajak Tak Langsung Netto	jutaan rp.	1.162,3	1.186,1	1.420,8	1.441,0
5.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor/Pendapatan Regional	jutaan rp.	92.679,0	100.644,3	114.600,7	123.279,8
6.	Penduduk Pertengahan Tahun	ribuan jiwa	3.227,6	3.437,3	3.676,7	3.763,9
7.	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	rupiah	30.795,9	31.417,1	33.423,6	35.162,3
8.	Pendapatan Regional Per Kapita	rupiah	28.714,5	29.285,9	31.169,4	32.758,0

**INDEKS PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL DAN PENDAPATAN  
PER KAPITA PROPINSI DATI I LAMPUNG  
(TAHUN 1971 = 100,00)**

No.	PERINCIAN	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
<b>A.</b>	<b>ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU :</b>								
1.	Produk Domestik Regional Bruto pada harga pasar	100,00	138,03	196,43	254,63	298,53	387,26	532,63	580,28
2.	Penyusutan	100,00	132,52	185,39	247,87	290,70	381,29	507,15	577,21
3.	Produk Domestik Regional Netto pada harga pasar	100,00	138,35	197,07	255,02	298,98	387,61	534,11	580,46
4.	Pajak Tak Langsung Netto	100,00	123,00	163,73	210,07	269,61	314,72	432,86	471,58
5.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor/Pendapatan Regional		138,57	197,55	255,66	299,40	388,65	535,55	582,01
6.	Penduduk Pertengahan Tahun	100,00	103,82	107,06	111,97	119,18	126,92	135,76	138,98
7.	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	100,00	132,95	183,47	227,41	250,49	305,12	392,33	417,53
8.	Pendapatan Regional Per Kapita	100,00	133,46	184,52	228,33	251,22	306,21	394,48	418,77
<b>B.</b>	<b>ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1971 :</b>								
1.	Produk Domestik Regional Bruto pada harga pasar	100,00	113,02	120,44	126,59	135,91	147,66	168,03	180,96
2.	Penyusutan	100,00	111,35	118,22	127,51	138,61	153,18	171,33	189,83
3.	Produk Domestik Regional Netto pada harga pasar	100,00	113,11	120,56	126,53	135,75	147,34	167,84	180,45
4.	Pajak Tak Langsung Netto	100,00	109,13	105,73	97,95	119,72	122,18	146,35	148,43
5.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor/Pendapatan Regional	100,00	113,17	120,78	126,94	135,98	147,70	168,14	180,90
6.	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	100,00	108,85	112,49	113,05	114,04	116,34	123,77	130,21
7.	Pendapatan Regional Per Kapita	100,00	109,00	112,81	113,37	114,10	116,37	123,85	130,16

**PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA-ANGKA PER KAPITA PROPINSI LAMPUNG  
ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU TAHUN 1975 – 1980**

No.	PERINCIAN	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar	232.056.618 (ribuan rupiah)	315.663.221	401.019.369	458.344.962	607.512.507	774.032.486
2.	Dikurangi penyusutan	9.287.736	12.337.111	15.625.301	18.290.165	25.001.154	31.098.180
3.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar	222.768.882	303.326.110	385.394.068	440.054.797	682.511.443	742.934.306
4.	Dikurangi pajak tak langsung Netto	2.702.345	3.594.375	4.401.572	5.479.906	6.004.011	7.665.587
5.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor/pendapatan Regional	220.066.537	299.731.735	380.992.496	434.574.891	576.507.432	735.268.719
6.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	3.227,6 (ribuan jiwa)	3.437,3	3.676,7	3.763,9	3.860,5	4.144,6
7.	Produk Domestik Regional Bruto per kapita	71.897,6 (rupiah)	91.834,6	109.070,5	121.773,9	157.366,3	186.756,9
8.	Pendapatan Regional per kapita	68.182,7 (rupiah)	87.199,8	103.623,5	115.458,8	149.334,9	177.404,0

**PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA-ANGKA PER KAPITA PROPINSI LAMPUNG  
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975**

No.	PERINCIAN	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Produk Domestik Regional atas dasar harga pasar	232.056.618 (ribuan rupiah)	248.576.236	271.742.627	296.537.806	306.728.947	332.131.509
2.	Dikurangi Penyusutan	9.287.736	10.189.699	11.300.286	12.481.978	13.747.897	14.599.362
3.	Produk Domestik Regional atas dasar harga pasar	222.768.882	238.386.537	260.442.341	284.055.828	292.981.050	317.532.147
4.	Dikurangi pajak tak langsung Netto	2.702.345	2.910.661	3.141.736	3.436.971	3.561.943	3.655.457
5.	Produk Domestik Regional atas dasar biaya faktor/pendapatan Regional	220.066.537	235.475.876	257.300.605	280.618.857	289.419.107	313.876.690
6.	Jumlah Penduduk pertengahan tahun	3.227,6 (ribuan jiwa)	3.437,3	3.676,7	3.763,9	3.860,5	4.144,6
7.	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	71.897,6 (rupiah)	72.317,3	73.909,4	78.784,7	79.453,2	80.136,0
8.	Pendapatan Regional per Kapita	68.182,7 (rupiah)	68.506,0	69.981,4	74.555,3	74.969,3	75.731,5

**PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAN ANGKA-ANGKA PER KAPITA PROPINSI LAMPUNG**  
**ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU TAHUN 1975 – 1980 (Tahun Dasar 1975 = 100,00)**

No.	PERINCIAN	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1.	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.	100,0	136,03	172,81	197,51	261,79	333,55
2.	Penyusutan	100,0	132,83	168,24	196,93	269,18	334,83
3.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar	100,0	136,16	173,00	197,54	261,49	333,50
4.	Pajak tak langsung Netto	100,0	133,01	162,88	202,78	222,18	283,66
5.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor/pendapatan Regional	100,0	136,20	173,13	197,47	261,97	334,11
6.	Penduduk Pertengahan Tahun	100,0	106,50	113,91	116,62	119,61	128,41
7.	Produk Domestik Regional Bruto per kapita	100,0	127,73	151,70	169,37	218,88	259,75
8.	Pendapatan Regional per Kapita	100,0	127,89	151,98	169,34	219,34	260,19

**PERKEMBANGAN PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA-ANGKA PER KAPITA  
PROPINSI LAMPUNG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975 (Tahun Dasar 1975 = 100,00).**

No.	PERINCIAN	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1.	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar	100,00	107,12	117,10	127,79	132,18	143,13
2.	P e n y u s u t a n	100,00	109,71	121,67	134,39	149,02	157,19
3.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar	100,00	107,01	116,91	127,51	131,52	142,54
4.	Pajak tak langsung Netto	100,00	107,71	116,26	127,18	131,81	135,27
5.	Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor/pendapatan Regional	100,00	107,00	116,92	127,52	131,51	142,63
6.	Penduduk pertengahan tahun	100,00	106,50	113,91	116,62	119,61	128,41
7.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	100,00	100,58	102,80	109,58	110,51	111,46
8.	Pendapatan Regional Per Kapita	100,00	100,47	102,64	109,35	109,95	111,07

## CONTOH PENGISIAN KUESIONER YANG TELAH DIPEROLEH

Desa : Ujung Gunung Hilir  
Kec. Menggala LU.

### SEJARAH PENGARUH PELITA DI DAERAH TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN

#### I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Minak Wakak Mega
  - Nama kecil : Achmad
  - Nama dewasa : .....
2. Umur/tgl. lahir : 7 - 3 - ..... /56 tahun.
3. Tempat lahir : Ujung Gunung Hilir Kec. Menggala.
4. Pendidikan : Sekolah Gubernemen/tamat.
5. Pekerjaan/jabatan : Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir.
  - a. Sejak kapan jabatan itu dipegang : 6 - 6 - 1973.
  - b. Dengan cara penunjukkan/pemilihan/keturunan dan lain-lain.  
Secara aklamasi (calon tunggal)
6. Agama : Islam.
7. Alamat sekarang : Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala  
Lampung Utara.
8. Sejak kapan menjadi penduduk desa itu : .....  
(penduduk asli/pendatang/pindahan) : penduduk asli.
9. Jabatan di desa yang pernah dipegang sebelum ini :
  - Pembantu Kepala Kampung di bidang keamanan.
  - .....

#### II. IDENTITAS DESA.

1. Nama desa : Ujung Gunung Ilir
  - a. Nama lama/nama baru, sejak : Ujung Gunung
  - b. Sejak kapan berstatus desa : Desa tertua di Kec.  
Menggala.
2. Kecamatan : Menggala.
  - Sejak kapan berstatus Kecamatan itu : 1955.
3. Kabupaten : Lampung Utara.



— Sejak kapan berstatus Kabupaten itu : . . . . .

4. Keadaan geografis desa.

a. Luas desa : 20.000 ha.

b. Keadaan tanah : . . . . .

1.1. dataran rendah : 18.000 ha (90%).

1.2. gunung/pegunungan/bukit : . . . ha ( . . . )

1.3. Rawa-rawa : 2.000 ha (10%).

2.1. Sawah

— pengairan teknis : . . . . . ha ( . . . . . )

— pengairan sederhana : . . . . . ha ( . . . . . )

— tadah hujan : . . . . . ha ( . . . . . )

2.2. Tanah kering

— pekarangan : 100 ha (0,5%)

— ladang : 3.000 ha (15%)

— tegalan : 15.000 ha (75%)

— lain-lain : 1.900 ha (9,5%)

2.3. Tanah perikanan

— rawa : 2.000 ha (10%)

— kolam : . . . . . ha ( . . . . . )

— tambak : . . . . . ha ( . . . . . )

2.4. Tanah perkebunan

— perkebunan negara : . . . . . ha ( . . . . . % )

— perkebunan swasta : . . . . . ha ( . . . . . % )

— perkebunan desa : . . . . . ha ( . . . . . % )

— perkebunan perorangan : 1.900 ha (9,5%)

3. Sungai

— Sungai besar/kecil : 20 ha (0,1%)

— fungsi : pengairan/transportasi/perikanan/batu/pasir dan lain-lain.

4. Hutan

— jenis hutan : belukar

— hasil hutan : kayu dan karet.

5. Jalan raya

a. Jalan negara

— panjang jalan : 5 km  
— diaspal : 5 km

a. Jalan kampung

— panjang jalan : 15 km  
— diaspal : 15 km

c. Fungsi jalan : transportasi manusia/pengangkutan hasil bumi/barang perdagangan dan lain-lain : Ya.

6. Jumlah penduduk

Tahun 1950 — 1965 : lk. 1.156; pr. 1.280; jml. 2.436  
Tahun 1965 — 1969 : lk. 1.166; pr. 1.291; jml. 2.457  
Tahun 1969 — 1974 : lk. 1.181; pr. 1.309; jml. 2.490  
Tahun 1974 — 1979 : lk. 1.187; pr. 1.319; jml. 2.506  
Tahun 1979 — 1981 : lk. 1.158; pr. 1.782; jml. 2.940

7. Jenis penduduk

WNA : ..... (China, Belanda, Arab dan lain-lain).  
WNI : 2.940.

8. Keadaan pendidikan

a. Jumlah sekolah :

Tahun 1950 - 1965 : SD/Madrasah dll. 4 buah.  
SMP/SMEP/ST dll. ....  
SLTA : SMA/SGA/SMEA dll.

.....  
(harap disebut negeri/swasta).

Tahun 1965 - 1969 : SD/Madrasah dll. 4 buah.  
SMP/SMEP/ST dll. ....  
SLTA : SMA/SGA/SMEA dll.

.....  
Tahun 1969 - 1974 : SD/Madrasah dll. 5 buah.  
SMP/SMEP/ST dll. ....  
SLTA : SMA/SGA/SMEA dll.  
1 buah.

Tahun 1979 - 1981 : SD/Madrasah dll. 5 buah.  
 SMP/SMEP/ST dll. ....  
 SLTA : SMA/SGA/SMEA dll.  
 1 buah.

b. Jumlah guru (sesuai dengan wewenangny).

Tahun 1950 - 1965 : SD : 17  
 SLTP : -  
 SLTA : -

Tahun 1965 - 1969 : SD : 19  
 SLTP : -  
 SLTA : -

Tahun 1969 - 1974 : SD : 27  
 SLTP : -  
 SLTA : -

Tahun 1974 - 1979 : SD : 40  
 SLTP : 1  
 SLTA : 1

Tahun 1979 - 1981 : SD : 48  
 SLTP : 1  
 SLTA : 1

c. Jumlah murid

SD/Madrasah : 1950-1965 : lk. 279; pr. 243; jml. 522  
 1965-1969 : lk. 284; pr. 261; jml. 545  
 1969-1974 : lk. 331; pr. 312; jml. 643  
 1974-1979 : lk. 345; pr. 327; jml. 672  
 1979-1981 : lk. 355; pr. 378; jml. 733

SLTP : 1950-1965 : lk. ....; pr. ....; jml. ....  
 1965-1969 : lk. ....; pr. ....; jml. ....  
 1969-1974 : lk. ....; pr. ....; jml. ....  
 1974-1979 : lk. 5; pr. 4; jml. 9  
 1979-1981 : lk. 7; pr. 6; jml. 13

SLTA : 1950-1965 : lk. ....; pr. ....; jml. ....

1965 – 1969 : lk. .... pr. ... jml. ...  
 1969 – 1974 : lk. .... pr. ... jml. ...  
 1974 – 1979 : lk. .... pr. ... jml. ...  
 1979 – 1981 : lk. .... pr. ... jml. ...

d. Kursus-kursus

- ketrampilan : – bh, jml. peserta : –
- kejuruan : – bh, jml. peserta : –
- pengetahuan umum : 1 bh, jml. peserta : 20 orang  
 dan lain-lain (sebutkan jenis kursusnya), PKK menjahit :  
 12 orang; memasak : 8 orang.

9. Mata pencaharian penduduk  
 sebelum dan sesudah Pelita

a. Pertanian

- |               |             |     |           |       |
|---------------|-------------|-----|-----------|-------|
| – Petani      | : 280 orang | 70% | 240 orang | 60%   |
| – Nelayan     | : 80 orang  | 20% | 48 orang  | 12%   |
| – Peternak    | : –         | –   | 4 orang   | 1%    |
| – Hasil hutan | : 8 orang   | 2%  | 2 orang   | 0,25% |

b. Industri

- |                      |           |      |          |    |
|----------------------|-----------|------|----------|----|
| – pengusaha industri | : –       | –    | –        | –  |
| – pengrajin          | : 6 orang | 1,5% | 12 orang | 3% |

c. Perdagangan

- |                     |           |       |         |      |
|---------------------|-----------|-------|---------|------|
| – perdagangan tetap | : 1 orang | 0,25% | 6 orang | 1,5% |
| – perdagangan kecil | : 6 orang | 1,5%  | 8 orang | 2%   |

d. Pegawai Negeri

- |                    |     |   |          |       |
|--------------------|-----|---|----------|-------|
| – guru             | : – | – | 28 orang | 7%    |
| – bidang kesehatan | : – | – | 3 orang  | 0,85% |
| – pegawai lain     | : – | – | 8 orang  | 2%    |

e. ABRI

f. Pegawai Swasta	:	—	—	—	—
g. Tukang					
— kayu batu	:	8 orang	2%	10 orang	2,5%
— jahit	:	—	—	8 orang	2%
— pandai besi	:	3 orang	0,75%	—	—
h. Bidang angkutan.					
— kendaraan bermotor	:	—	—	—	—
— pengusaha	:	4 orang	1%	—	—
— pengemudi	:	4 orang	1%	8 orang	2%
i. Jasa ahli.					
— dokter	:	—	—	—	—
— advokat	:	—	—	—	—
— dan lain-lain	:	—	—	9	2,15%
10. Produksi					
a. pangan (padi, jagung ketela, dll.).	:	2.200	44	2.300	45
b. buah-buahan	:	25	0,5	50	1
c. sayur-sayuran	:	250	5	200	4
d. perkebunan	:	—	—	—	—
— kelapa	:	300	6	250	5
— karet	:	—	—	150	3
— lada	:	300	6	225	4,5
— cengkeh	:	400	8	350	7
— kopi	:	250	5	175	3,5
e. Peternakan					
— sapi	:	50	1	—	—
— kerbau	:	75	1,5	37	0,75
— kuda	:	—	—	—	—
— kambing, babi dll.	:	250	4,25	150	3
f. Unggas (ayam, itik, dll.).	:	1.400	2,5	150	0,25
g. Hasil lain	:	orang	%	orang	%
— ikan	:	300	6	50	1

— kayu, getah, rotan	:	200	4	200	4
— industri (tahu, tempe, tapioka)	:	—	—	25	0,5
h. Sandang (tekstil)					
anyaman dll.	:	150	3	75	1,5
i. Keramik (batu, genteng, dll.)					
:	:	—	—	—	—
j. Tegel, teraso					
:	:	—	—	—	—
k. Perdagangan (toko, warung, dll.)					
:	:	9	2,25	17	4
l. Jasa					
— tukang meubel	:	—	—	2	0,5
— tukang cukur	:	—	—	—	1
— tukang kayu/ batu	:	8	2	26	6,5
— tukang jahit dll.	:	—	—	2	3
11. Jumlah rumah					
— permanen	:	—	—	4	1,84
— semi permanen	:	—	—	152	31,92
— sederhana	:	384	100	228	66,24
12. Faktor sosial budaya					
a. Adat istiadat					
— kelahiran bayi	:	13 orang	17 orang		
— perkawinan	:	8	5		
— kematian	:	9	6		
— lain-lain	:	2	4		
b. Lembaga desa					
1. Lembaga Pemerintahan					
— pamongdesa	:	3 orang	3 orang		

– RK/RT	:	–	–
– Mudes	:	–	–
– Ulu-ulu	:	–	–
– Lain-lain	:	1	1

## 2. Lembaga ekonomi

– BUUD	:	–	–
– Lumbung desa	:	–	–
– Pasar	:	–	–
– Bank desa	:	–	–
– Dharma tirta:	–	–	–

## 3. Lembaga sosial

– Kematian	:	1	–
– arisan	:	–	3
– panti asuhan:	–	–	–
– amil zakat	:	–	–

## 4. Lembaga pendidikan/kebudayaan dan lain-lain.

– kesenian	:	–	1
– olahraga	:	2	4
– pemuda/ pelajar	:	4	5
– PKK	:	–	1
– pramuka	:	–	5
– BP3	:	–	5

## 5. Lembaga Keagamaan

5.1. Islam	:	1	1
Kristen	:	–	–
Hindu	:	–	–
Katholik	:	–	–
Budha	:	–	–
5.2. Wakaf	:	– buah	1 buah
5.3. Pondok/pesantren	:	–	–
5.4. Pengajian	:	1	1

## 6. Lembaga kesehatan

- a. rumah sakit : — buah — buah
- b. puskesmas : — —
- c. BKIA : — —
- d. balai desa : — —

#### 7. Lembaga Pembangunan

- LSD : — 1
- PKK : — 1
- Siaran pedesaan : — —
- BPPD : — 1

#### 8. Lembaga Hukum

- Hansip/Wanra : — orang 12 orang
- PKD : — —

#### 9. Pendidikan (tingkat pendidikan penduduk)

- tamat SD : 2 orang 256 orang
- tamat SLP : — 94
- tamat SLA : — 142
- tamat PT : — 3
- Madrasah : 25 75
- Akademi : — —
- buta huruf : 1.200 38

### 13. Faktor Prasarana

#### a. Prasarana perhubungan

- jalan raya : 5 km 5 km
- jembatan : 2 buah 5 buah
- sungai : 2 buah 2 buah

#### b. Prasarana produksi

- bendungan waduk : — buah — buah
- saluran : — —
- listrik : — kk — kk
- pompa air : — buah — buah



c. Prasarana pemasaran

— pasar	:	— buah	— buah
— toko	:	—	—
— warung/kios	:	8	17
— KUD	:	—	—
— Bank	:	—	—

d. Prasarana Sosial

— masjid	:	1 buah	1 buah
— langgar	:	1	1
— gereja	:	—	—
— dll.	:	—	—

e. Gedung Umum

— balai desa	:	— buah	— buah
— balai kesenian	:	—	—
— sanggar pramuka	:	—	—
— balai pertemuan	:	—	—
— balai adat	:	—	—
— bioskop	:	—	—
— pos keamanan	:	—	4

f. Transport

— kendaraan bermotor	:	— buah	5 buah
— gerbong dll.	:	—	40
— radio	:	—	48

g. Produksi

— gilingan padi	:	—	1
— pabrik dll.	:	—	—

14. Struktur Pemerintahan Desa.

Buatlah struktur pemerintahan desa sesuai dengan jenjang kekuasaan/kesenangan mereka di desa.

Struktur itu dibuat 2 buah yaitu sebelum dan sesudah Pelita.

15. Cara pemilihan perangkat desa.  
Pemilihan, atau dengan cara lain sebelum dan sesudah Pelita.
16. Keadaan Organisasi Politik.  
Sebutlah partai-partai politik yang ada secara berurutan dari yang besar ke yang kecil, dari masing-masing kurun waktu berikut :  
Tahun 1950 – 1965 : NU dan PNI  
Tahun 1965 – 1969 : NU dan PNI  
Tahun 1969 – 1974 : NU dan PNI  
Tahun 1974 – 1979 : Golkar, P3 dan PDI  
Tahun 1979 – 1981 : Golkar, P3 dan PDI
17. Kedudukan dan peran pemimpin masyarakat non pemerintah.
  - a. Pemuka Adat : 3 orang biasa saja
  - b. Pemuka Agama : 3 orang biasa saja
  - c. Tokoh masyarakat : 4 orang biasa saja
  - d. G u r u : —
  - e. Lain-lain : —
 (Di dalam jabatan ini agar dijelaskan dengan singkat kedudukan/ peran pemimpin non pemerintah itu bagaimana, misalnya : masih lebih disegani, sangat menonjol, berperan di bidangnya saja, biasa saja dan lain-lain).  
 Sedapatnya dilukiskan dengan agak jelas perbedaan peran mereka sebelum dan sesudah Pelita.
18. Landasan pelaksanaan Pelita di bidang pemerintahan desa. (Peraturan-peraturan atau undang-undang mana yang menjadi dasar/landasan pelaksanaan Pelita di desa tersebut).
  - a. PP 52
  - b. 160 B – 1939
  - c. PP 5/1979
  - d. Peraturan lainnya : atas perintah Kepala Daerah setempat.
19. Pelaksanaan Pelita di daerah di bidang pemerintahan desa.
  - 19.1. Bagaimana cara memilih Kepala Desa dan aparatnya?  
Pemilihan : .....
  - 19.2 Peran Lembaga-lembaga di desa :
    - 19.2.1. LSD : berjalan dengan baik.

19.3. Subsidi Desa.

19.3.1. Berapakah besarnya subsidi desa sebelum dan sesudah Pelita?

Rp. .... Rp. 750.000,—

Atau kalau berupa material berupa apa?

.....

19.3.2. Dalam bidang pembangunan apa subsidi desa itu digunakan?

— jalan raya/jalan kampung

— jembatan

— gorong-gorong

19.3.3. Sarana pendidikan yang didapat dari subsidi desa.

— kejuruan, kursus dan lain-lain.

19.3.4. Kemajuan desa di bidang material.

— jumlah kendaraan 31 buah

— kendaraan bermotor roda dua 22 buah

— radio 30 buah

— TV 18 buah

— peserta KB 70 orang (4%)

— peserta PKK 20 orang, jahit 12 orang dan memasak 8 orang

19.3.5. Hasil-hasil yang diperoleh

— di bidang pertanian

— di bidang peternakan

— di bidang industri

— dan lain-lain.

19.3.6. Faktor-faktor penghambat.

Uraikan dengan singkat, faktor apa yang menghambat jalannya Pelita di desa, yang merupakan faktor penghambat dari dalam desa itu sendiri maupun faktor penghambat dari luar desa. Faktor intern tidak ada.

Faktor ekstern : pencemaran air sungai Miring oleh pabrik Sagu Bumi Waras.

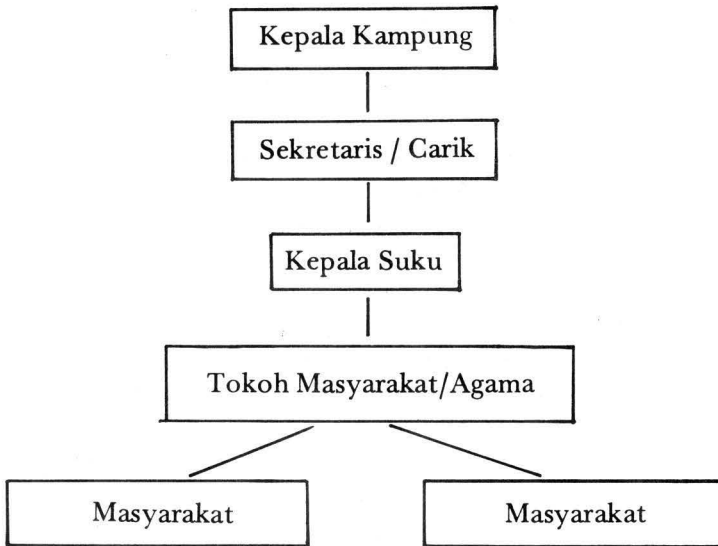
20. Pengaruh Pelita dalam Pemerintahan Desa.

20.1. Struktur pemerintahan menurut PP Nomor 5 tahun 1979.

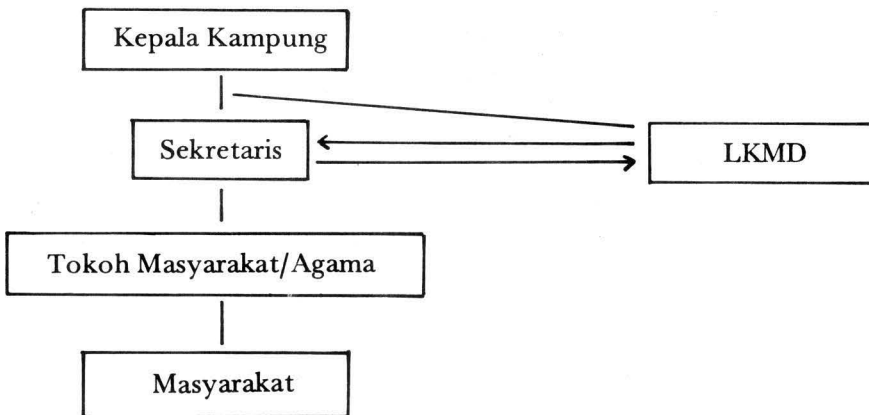
Buatlah skema pemerintahan menurut peraturan tersebut.

Struktur Pemerintahan Desa Ujung Gunung Hilir.

**A. Sebelum Pelita**



**B. Sesudah Pelita**



- 20.2. Apakah pengaruh positif Pelita terhadap struktur pemerintahan desa.  
Sebutkan pengaruh negatifnya.

Ujung Gunung Hilir, 10 Oktober 1981

Telukbetung, Juli 1981

Kepala Kampung,

Ketua Tim,

cap. dto.

ttd.

(MINAK WAKAK MEGA)

(DRS. HUSIN SAYUTI)

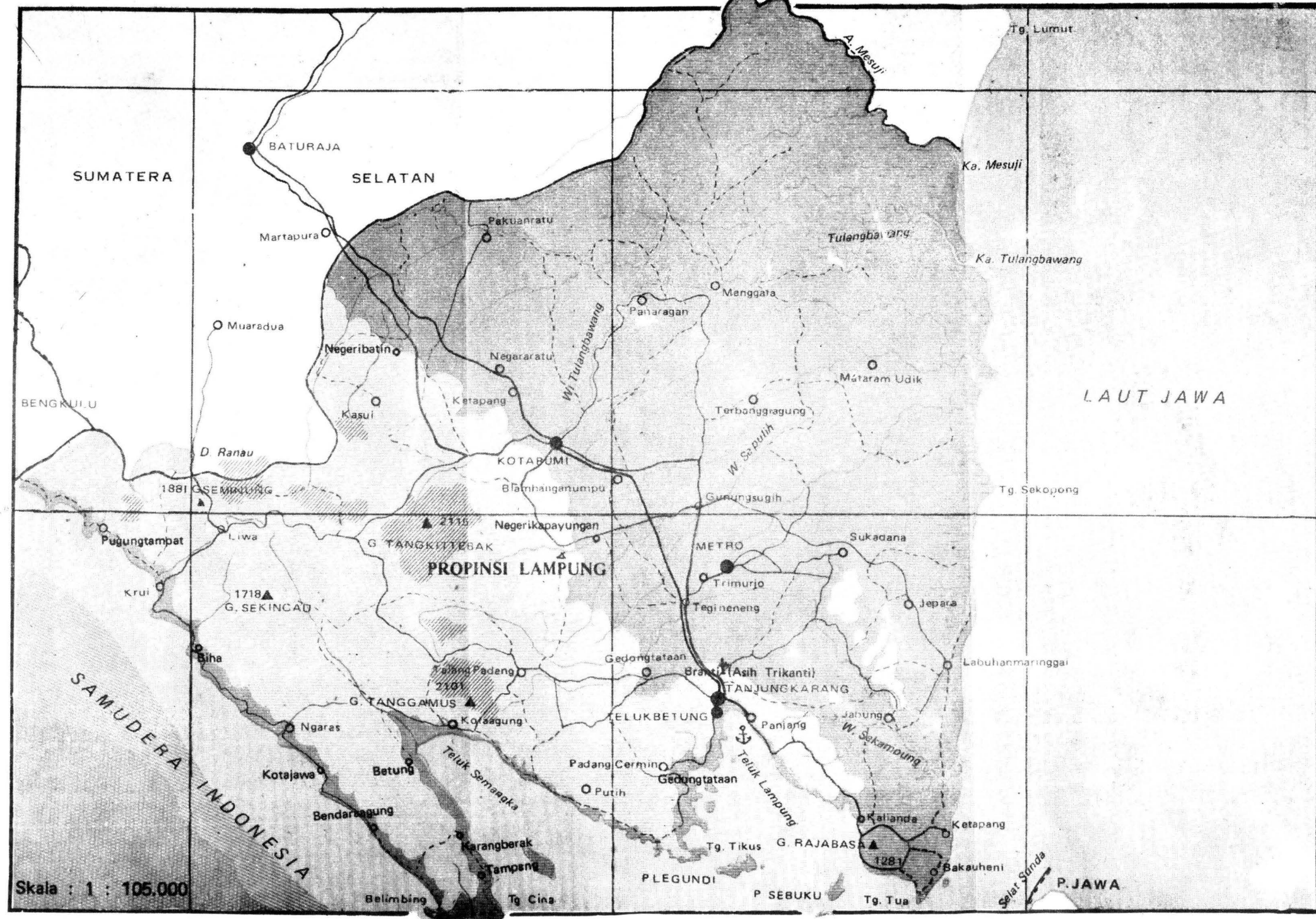
NIP. 130265397

Pencatat,

ttd.

BHUDIYONO  
NPM. 3160581

# PROP. LAMPUNG





Tidak diperdagangkan untuk umum

